



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II



**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
TAHUN 2021 - 2024**



PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
PROGRAM PEMERINTAH											
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim											
1.2.1 * Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
1.2.2 * Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	6318.QAA.001	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Orang	163.400.000	219.900.000	277.500.000	280.000.000	419.644,0	Pusat	Kemensos
		6318.UAB.001	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Sistem Informasi	1	1	1	1	631.678,5	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos
6283	Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi	6283.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	6.000	6.000	6.000	6.000	501.778,9	Pusat	Kemensos
		6283.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	6.000	6.000	6.000	6.000	501.778,9	Pusat	Kemensos
		6283.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	6.000	6.000	6.000	6.000	503.998,9	Pusat	Kemensos
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemensos
6273	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	6273.ACD.101	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Institusi	-	1.200	1.200	1.200	17.485.081,0	Pusat	Kemensos
		6273.ACD.102	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)	Institusi	-	270	270	270	1.152.556,0	Pusat	Kemensos
6274	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	6274.BDB.101	Karang Taruna Yang Diberdayakan	Lembaga	-	608	608	608	4.015.610,0	Pusat	Kemensos
		6274.BDB.102	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yang Diberdayakan	Lembaga	-	100	100	100	485.490,0	Pusat	Kemensos
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemosos
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	Penduduk (juta)	96,8	110,0	111,4	112,9	266.061.200,0	34 Provinsi	Kemenkes
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemenaker
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	755,6	Pusat	Kemenaker
		5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66				395,0	34 provinsi	Kemenaker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,4	Pusat	Kemenaker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	Penduduk (juta)	96,8	110,0	111,4	112,9	266.061.200,0	34 Provinsi	Kemenkes
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	755,6	Pusat	Kemenaker
		5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66				395,0	34 provinsi	Kemenaker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,4	Pusat	Kemenaker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemenaker
035.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4545	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	4545.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Paket Rekomendasi	2	2	2	2	5.000,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemenaker
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	755,6	Pusat	Kemenaker
		5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66				395,0	34 provinsi	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,4	Pusat	Kemenaker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar											
010.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.FBA.037	Fasilitasi Penyusunan RAD AMPL	Daerah	-	-	-	-	34.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum dan Air Limbah	Provinsi	412	412	412	412	44.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Provinsi	34	34	34	34	21.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Provinsi	34	34	34	34	20.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Provinsi	34	34	34	34	30.000,0	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Provinsi	34	34	34	34	45.000,0	Pusat	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6139.UBA.017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan/pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Provinsi	34	34	34	34	20.000,0	Pusat	Kemendagri
1244	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	1244.AEC.002	Desa yang telah bekerjasama antar desa dalam pengelolaan air minum dan sanitasi	Kerjasama Desa	32	-	-	-	29.243,0	Provinsi	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RAI.002	Sarana Pelayanan Dasar yang dibangun/ dikembangkan/ direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	14.053,0	Kab. Banyuwangi dan Buol	Kemendes PDTT
6470	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	6470.RBG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Unit	1	2	3	4	15.900,0	Kab. Jayawijaya	Kemendes PDTT
		6470.RBG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang dibangun	Unit	2	2	2	2	20.350,0	Kab. Boven Digoel dan Kab. Kepulauan Aru	Kemendes PDTT
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan											
056.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan											
4402	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	4402.QAB.001	Penatausahaan Tanah Ulayat	Provinsi	33	33	33	33	49.000,0	33 Satker	Kemen ATR/BPN
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang	6416.QAA.001	SHAT PTSL Kategori 1	Bidang	150.000	665.469	1.008.702	955.781	1.710.891,6	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.002	SHAT PTSL Kategori 2	Bidang	208.503	587.909	604.564	672.331	2.076.345,3	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.003	SHAT PTSL Kategori 3	Bidang	500.150	2.441.202	2.569.412	2.831.480	4.277.334,8	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.004	SHAT PTSL Kategori 4	Bidang	600.000	747.677	831.724	1.031.726	4.213.510,4	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.005	SHAT PTSL Kategori 5	Bidang	6.055.772	4.726.016	4.366.125	4.038.703	33.505.520,7	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.009	SHAT PTSL PM Kategori 3	Bidang	119.254	0	0	0	709.239,8	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.010	SHAT PTSL PM Kategori 4	Bidang	720.000	0	0	0	3.578.762,9	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.013	SHAT Mandiri Kategori 1	Bidang	9.637	0	0	0	123.759,3	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.014	SHAT Mandiri Kategori 2	Bidang	20.125	0	0	0	224.355,6	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.015	SHAT Mandiri Kategori 3	Bidang	39.232	0	0	0	372.802,2	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.016	SHAT Mandiri Kategori 4	Bidang	16.002	0	0	0	123.402,7	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
6416.QAA.017	SHAT Mandiri Kategori 5	Bidang	47.755	0	0	0	285.064,1	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN		

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6418.QAA.001	SK Redistribusi Tanah Kategori I	SK	25.891	43.415	205.000	155.000	177.007,1	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.002	SK Redistribusi Tanah Kategori II	SK	122.289	80.044	165.500	130.240	173.035,0	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.003	SK Redistribusi Tanah Kategori III	SK	209.510	227.661	432.774	377.500	375.958,0	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.004	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	SK	73.318	41.150	148.500	138.500	100.974,2	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.005	SK Redistribusi Tanah Kategori V	SK	41.300	25.150	20.120	20.120	21.683,5	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.006	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	SK	9.510	6.000	0	0	8.010,2	2 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.007	SK Redistribusi Tanah Kategori VII	SK	816	1.000	0	0	406,3	1 Provinsi	Kemen ATR/BPN
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3891	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat	3891.QEE.003	Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Kegiatan	10	10	10	10	1.056.400,0	34 provinsi	BNPB
4285	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat	4285.UAC.001	Pengelola infrastruktur darurat	Personil	100	100	100	100	6.100,0	34 provinsi	BNPB
4286	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	4286.UAC.002	Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Orang	570	570	570	570	56.000,0	34 Provinsi	BNPB
4287	Layanan pusat pengendalian operasi	4287.UAC.001	Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	Personil	105	105	105	105	8.200,0	Pusat	BNPB
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6281	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	6281.BEE.101	Korban Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	Paket	5.800	30.000	40.000	50.000	76.800,1	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6281.QEE.101	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	Paket	150.000	200.000	250.000	250.000	1.099.734,2	Pusat	Kemensos
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4288	Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	4288.QEE.001	Pemenuhan kebutuhan logistik PB	Kab/Kota	33	33	33	33	89.341,1	33 Provinsi	BNPB
3885	Pemulihan dan Peningkatan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3885.QAH.001	Layanan Pemulihan dan Peningkatan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Lokasi	8	8	8	8	25.200,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	Daerah	133	375	468	568	15.625,0	Kabupaten/ Kota	Kemendagri
		6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Daerah	34	34	34	34	6.060,0	Provinsi	Kemendagri
		6136.UBA.005	Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat	Daerah	34	34	34	34	4.240,0	Provinsi	Kemendagri
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3882	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Banjir dan Gunungapi	Lokasi	2	2	2	2	2.400,0	Pusat	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3893	Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
		3893.QMB.002	Budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
103.WA Program Dukungan Manajemen											
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah	Orang	760	760	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah											
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	6141.UBA.002	Daerah yang Memenuhi Indikator <i>Mandatory Spending</i>	Daerah	350	400	459	542	1.912,0	Jakarta	Kemendagri
		6141.UBA.004	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	Daerah	210	318	426	542	3.762,0	Jakarta	Kemendagri
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.1.1 * Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)											
2.1.2 * Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan pangan											
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)											
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	1761.CAI.611	Kawasan Kedelai	Unit	125.000	129.377	133.902	138.590	1.152.831,0	26 Provinsi	Kementan
		1761.RAI.612	Kawasan Ubi Kayu	Unit	35.000	36.226	37.492	38.805	488.339,7	18 Provinsi	Kementan
		1761.RAI.613	Kawasan Ubi Jalar	Unit	2.000	2.072	2.142	2.218	36.872,2	4 Provinsi	Kementan
		1761.CAI.614	Kawasan Kacang Tanah	Unit	1.000	1.035	1.071	1.109	122.728,3	24 Provinsi	Kementan
		1761.CAI.615	Kawasan Kacang Hijau	Unit	5.000	5.175	5.356	5.544	46.709,0	16 Provinsi	Kementan
		1761.CAI.618	Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya (Ha)	Unit	4.000	4.141	4.286	4.434	100.899,0	Jawa Barat, Banten	Kementan
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan	1762.RAI.621	Kawasan Padi	Unit	540.000	540.000	540.000	540.000	4.691.890,0	Pusat, 32 Provinsi	Kementan
		1762.RAI.622	Kawasan jagung	Unit	15.000	15.000	15.000	15.000	245.925,0	27 Provinsi	Kementan
		1762.RAI.625	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Unit	50.000	100.000	150.000	200.000	707.400,0	Sentra padi	Kementan
		1762.CAI.626	Kawasan Sereal/Lainnya	Unit	5.000	5.000	5.000	5.000	25.982,5	20 Provinsi	Kementan
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1777.RAI.006	Kawasan Sagu	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	25.461,9	Pusat, 14 Provinsi	Kementan
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1785.PDA.001	Benih Ternak Unggul	Produk/Dosis	956.095 produk	5.901.000	5.901.000	5.901.000	237.772,0	3 Kab	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		1785.PDA.002	Bibit Ternak Unggul	Produk/ Dosis	970.450 produk	970.100	970.100	970.100	317.981,5	Pusat, 8 Kab/Kota	Kementan
		1785.QEH.003	Ternak ruminansia potong	Ekor/ Kelompok Masyarakat	1.477 Kelompok Masyarakat	500	500	500	173.761,8	Pusat, 17 Kab/Kota	Kementan
		1785.QEH.002	Ternak ruminansia perah	Ekor/ Kelompok Masyarakat	44 Kelompok Masyarakat	500	500	500	556.569,9	Pusat, 12 Provinsi	Kementan
		1785.QEH.004	Ternak unggas dan aneka ternak	Ekor/ Kelompok Masyarakat	5.556 Kelompok Masyarakat	100.500	100.500	100.500	973.637,8	Pusat, 14 kab/kota	Kementan
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1771.CAI. 014	Kawasan Sayuran Lainnya	Unit	850	850	850	850	44.020,0	40 Kab/Kota	Kementan
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	5886.CAI.010	Kawasan Pisang	Unit	1.100	1.100	1.100	1.100	111.615,0	4 Provinsi	Kementan
		5886.CAI.011	Kawasan Manggis	Unit	800	800	800	800	39.600,0	Pusat, 10 Provinsi	Kementan
		5886.CAI.016	Kawasan Jeruk	Unit	500	500	500	500	29.900,0	Pusat, 7 Provinsi	Kementan
		5886.CAI.017	Kawasan Buah Lainnya	Unit	1.015	1.015	1.015	1.015	108.684,0	Pusat, 4 Provinsi	Kementan
		5886.RAI.012	Kawasan Durian	Unit	1.340	1.340	1.340	1.340	78.748,0	26 Kab	Kementan
		5886.RAI.013	Kawasan Mangga	Unit	750	750	750	750	32.708,0	Pusat	Kementan
1814	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1814.BDD.001	Pangan yang terdistribusi	Kelompok Masyarakat	32.150	32.150	32.150	32.150	125.000,0	22 Provinsi	Kementan
1815	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1815.QDD.001	Pertanian keluarga	Kelompok Masyarakat	200	200	200	200	177.718,7	17 Provinsi	Kementan
		1815.BMA.003	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Layanan	549	549	549	549	143.669,8	Pusat, 34 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1816	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1816.BDD.001	Diversifikasi pangan	Lokasi	35	35	35	35	263.191,5	34 Provinsi	Kementan
		1816.QDD.001	Pekarangan Pangan Lestari	Lokasi	5.100	5.100	5.100	5.100	1.311.725,9	34 Provinsi	Kementan
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RAG.004	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan	Unit	6	6	6	6	23.152,0	Pusat	Kemendes PDPT
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.2.1 * Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita											
2.2.2 * Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Ibu Hamil KEK	238.000	210.000	140.000	140.000	607.197,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Balita	140.000	190.000	240.000	290.000	69.414,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.002	Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Balita Kurus	441.000	325.000	210.000	210.000	626.695,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.004	Ibu hamil dan balita yang diberikan pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal	Ibu Hamil dan Balita	114.184	115.000	115.000	115.000	139.000,0	Pusat	Kemenkes
		2080.QKA.504	Surveilans gizi yang ditingkatkan kualitasnya	Laporan	515	515	515	515	143.469,0	Pusat dan 34 Provinsi	Kemenkes
5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5833.PEA.002	Koordinasi LP/LS peningkatan posyandu aktif	Kegiatan	35	35	35	35	110.164,7	Pusat, provinsi, dan Kabupaten kota lokus	Kemenkes
		5833.PEA.003	Koordinasi LP/LS Pencegahan <i>Stunting</i>	Kegiatan	35	35	35	35	5.742,0	Pusat dan provinsi	Kemenkes
		5833.QDD.003	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan <i>Stunting</i>	Kelompok Masyarakat	360	460	514	514	94.402,3	Kabupaten/kota lokus	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.UBA.001	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kab/Kota	514	514	514	514	175.875,0	34 provinsi	Kemenkes
		5834.UBA.003	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)	Kab/Kota	514	514	514	514	176.209,0	34 provinsi	Kemenkes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.002	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi	Orang	762	708	708	708	2.673,0	Pusat dan DKI Jakarta	Kemenkes
		2058.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi imunisasi	Layanan	13	13	13	13	388.093,2	Pusat	Kemenkes
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.518	Paket penyediaan obat gizi	Paket	1	1	1	1	1.458.394,8	Pusat	Kemenkes
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan											
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Produk	2.550	2.670	2.700	2.700	15.262,8	34 Provinsi	Badan POM
		3165.QDB.002	Desa pangan aman	Desa	427	648	874	1.105	183.153,0	34 Provinsi	Badan POM
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.QDE.001	Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK	Keluarga	4.122.784	4.122.784	4.122.784	4.122.784	136.018,0	34 Provinsi	BKKBN
		3331.QDD.001	PIK Remaja yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remajaputrisebagai calonibu	Kelompok	29.620	31.101	32.656	34.289	261.088,0	34 Provinsi	BKKBN
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	4459.BDB.145	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	Lembaga	1.000	671	1.000	1.000	55.134,2	Pusat	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4459.QDB.143	Satuan PAUD yang menyelenggarakan pendekatan holistik integratif	Lembaga	5.000	5.000	5.000	5.000	111.831,0	Pusat	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.144	Satuan PAUD yang mendapatkan fasilitasi peningkatan pencapaian perkembangan anak	Lembaga	1.000	370	1.000	1.000	31.359,7	Pusat	Kemendikbud Ristek
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494.QMB.003	Diseminasi Informasi Mengenai <i>Stunting</i>	Layanan	234	250	270	290	75.426,3	Pusat	Kemkominfo
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	2357.PEH.001	Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	Lokasi	34	34	34	34	137.500,0	34 Provinsi	KKP
010.CM Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.011	Daerah yang meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan <i>stunting</i>	Daerah	360	460	512	512	12.000,0	Pusat	Kemendagri
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.UBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	509	296	292	278	750.400,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4840.RBB.001	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	Unit	1.500	6.270	6.270	6.270	18.682.000,0	28 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		149.324						Kemen PUPR
		4840.RBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Unit	4.145	21.663	21.663	21.663	25.894.000,0	168 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.010	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	Unit	20.300						Kemen PUPR
		4840.RBB.004	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	Unit	30	101	152	151	4.435.000,0	374 kab/kota	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4840.RBB.011	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	Unit	51.300	-	-	-	568.059,1	100 Kab/Kota	Kemen PUPR
4973	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	4973.BAH.001	Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Air Minum	Layanan	1	1	1	1	35.908,0	Pusat	Kemen PUPR
		4973.RBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	1.279	5.658	7.282	8.486	329.539.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.002	Pembangunan SPAM Regional	Unit	7	7	7	7		7 wilayah pelayanan SPAM Regional Prioritas	Kemen PUPR
		4973.RBB.003	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	555	2.424	3.121	3.637		Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.004	Peningkatan SPAM Regional	Unit	2	2	2	2		Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
		4973.RBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	51.525	577.423	721.779	866.135		Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.006	Perluasan SPAM Regional	Unit	3	3	3	3	Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR	
		4973.RBB.007	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	400.200	-	-	-	1.571.634,6	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.DCB.001	Pembinaan Teknis Bidang Air Minum	Orang	800	800	800	800	33.020,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.UBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	509	509	509	509	1.285.226,9	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	2794.UBA.002	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Peningkatan Kapasitas PUG/PPRG Penurunan <i>Stunting</i>	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7	6	7	10	4.030,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (<i>Stunting</i>)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	40	40	40	40	3.529,68	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1816	Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1816.QDD.002	Pekarangan pangan lestari <i>Stunting</i>	Lokasi	1.000	1.000	1.000	1.000	302.912,0	260 Kabupaten/ kota	Kementan
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan	1762.RAI.625	Kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi)	Kawasan	50.000	100.000	150.000	200.000	707.400,0	Sentra Padi	Kementan
081.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
6248	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri	6248.SDB.015	Prototipe Produk Pangan Fungsional padat gizi untuk cegah <i>stunting</i> (<i>stunting</i>)	Prototipe	2	-	-	-	13.400,0	Kota Tangerang Selatan	BPPT
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.QDD.001	Desa yang mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	Kelompok Masyarakat	360	360	360	360	21.000,0	Pusat	Kemendes PDPT
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	114.839,3	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QEB.101	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	6.999.407	6.999.407	6.999.407	6.999.407	77.119,1	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	6.636.581	6.636.581	6.636.581	6.636.581	73.140,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6284.QEB.103	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui program sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	5.164.023	5.164.023	5.164.023	5.164.023	58.555,7	Pusat	Kemensos
025.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama											
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2104.QDE.001	Keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah	Orang	120.083	355.800	355.800	355.800	398.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
080.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
6333	Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Nuklir di Bidang Kesehatan	6333.PBU.001	Rekomendasi Kebijakan Penanganan <i>Stunting</i> berdasarkan Asesmen Kecukupan Gizi Mikro pada Baduta <i>Stunting</i> dengan Menggunakan Metode Analisis Berbasis Nuklir	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1.620.422,0	Provinsi Jawa Barat	BATAN
		6333.PBU.002	Rekomendasi Kebijakan untuk Produk Kemaritiman dan Olahannya di Daerah Kasus <i>Stunting</i> (Kabupaten Lamongan dan Sukabumi)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1.286.350,0	Provinsi Banten	BATAN
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.004	Ibu hamil dan balita yang diberikan Pendidikan Gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan Lokal	Kab/Kota	514	514	514	514	88.865,0	34 Provinsi	Kemkes
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.3.1*Volume produksi pertenaga kerja menurut kelas usahatani/tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan											
2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	2345.QEG.001	Sarana Kawasan Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	Unit	120	120	120	120	552.850,0	10 provinsi	KKP
2337	Pengelolaan Kapal	2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang	Unit	96	100	100	100	183.391,0	34 provinsi	KKP
		2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan	Unit	750	1.000	1.250	1.500	150.500,0	7 Lokasi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/ kehutanan											
018.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5885.CAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Unit	7.035	7.035	7.035	7.035	2.877.320,3	Pusat, 34 Provinsi	Kementan
		5885.CAG.002	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Unit	142	142	142	142	90.519,0	Pusat, 26 Provinsi	Kementan
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5887.RAG.010	Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	75	75	75	75	30.576,0	Pusat, 81 Kab/Kota	Kementan
		5887.RAG.011	Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	200	200	200	200	107.407,9	Pusat, 237 Kab/Kota	Kementan
		5887.RBK.010	Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	185	185	185	245.476,0	Pusat, 15 Kab/Kota	Kementan
		5887.RBK.011	Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	250	250	250	250	153.642,0	Pusat, 141 Kab/kota	Kementan
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	200	200	200	200	124.002,8	Pusat, 78 Kab/Kota	Kementan
		5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	735	735	735	735	485.651,3	Pusat, 238 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	194	194	194	194	196.006,1	Pusat, 78 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	757	757	757	757	611.078,8	Pusat, 238 Kab/Kota	Kementan
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	5891.RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	70	49	54	60	36.875,0	Pusat, 31 Kab/Kota	Kementan
		5891.RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	44	49	54	60	14.300,0	Pusat, 16 Provinsi	Kementan
018.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1810.PDI.001	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	1.000	1.100	1.209	1.333	19.485,7	Pusat, 7 Provinsi	Kementan
5892	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	5892.QDD.001	Wirasahawan Muda Pertanian	Kelompok	822	1.436	1.436	1.436	189.801,8	Pusat, 11 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor											
2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan											
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1795.PBR.002	Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Rekomendasi Kebijakan	55	55	55	55	127.363,6	15 provinsi	Kementan
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	5036.RBG.006	Bendung irigasi Serdang yang dibangun	Unit	1	1	1	1	656.411,6	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5036.RBS.001	Daerah irigasi Baliase yang dibangun	Km	87	87	87	87	715.412,2	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.004	Daerah irigasi Bubi yang dibangun	Km	12	12	12	12	271.173,0	Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5036.RBS.005	Daerah irigasi Dataran Kotamobagu yang direhabilitasi	Km	30	30	30	30	46.643,2	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5036.RBS.006	Daerah irigasi Di Tinco (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	6	6	6	6	12.066,6	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.009	Daerah irigasi Kalukku yang dibangun	Km	5	5	5	5	273.036,9	Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
		5036.RBS.012	Daerah irigasi Lembor (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	27.897,1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5036.RBS.013	Daerah irigasi Maloso yang ditingkatkan	Km	10	10	10	10	288.468,9	Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
		5036.RBS.015	Daerah irigasi Palaka (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	16	16	16	16	12.066,6	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.020	Daerah irigasi rawa Belanti I dan II (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	40	40	40	40	21.388,2	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.021	Daerah irigasi rawa Tabunganen (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	60	60	60	60	16.625,2	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.028	Daerah irigasi Tapin (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	20	20	20	20	12.762,8	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.RBS.030	Daerah irigasi Tommo yang ditingkatkan	Km	7	7	7	7	167.068,3	Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
		5036.RBS.031	Daerah irigasi Toraut yang direhabilitasi	Km	38	38	38	38	31.434,3	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024			
5036.RBS.033	Daerah irigasi Wawotobi-Ameroro yang direhabilitasi	Km	2	2	2	2	156.751,3	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
5036.RBS.034	Foodestate dikawasaneksPLG Kalimantan Tengah	Km	7.000	7.000	7.000	7.000	24.283.631,7	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.036	Daerah irigasi Ciujung yang direhabilitasi	Km	46	46	46	46	214.586,4	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5036.RBS.037	Daerah irigasi Cibaliung yang direhabilitasi	Km	3	3	3	3	195.591,6	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5036.RBS.048	Daerah irigasi Cikunten yang direhabilitasi	Km	22	22	22	22	202.615,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5036.RBS.049	Daerah irigasi Manganti yang direhabilitasi	Km	36	36	36	36	705.910,3	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5036.RBS.050	Daerah irigasi Manganti (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	48	48	48	48	62.189,4	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5036.RBS.060	Daerah irigasi Jragung yang direhabilitasi	Km	16	16	16	16	102.541,5	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.063	Daerah irigasi Serayu yang ditingkatkan	Km	42	42	42	42	975.049,4	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.064	Daerah irigasi Slinga yang dibangun	Km	6	6	6	6	752.770,2	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.065	Daerah irigasi Wadaslintang (IPDMIP) yang ditingkatkan	Km	2	2	2	2	48.960,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.067	Daerah irigasi Banjarcahaya yang direhabilitasi	Km	5	5	5	5	2.784,6	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5036.RBS.068	Daerah irigasi SIM (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	63.475,6	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036.RBS.069	Daerah irigasi Waduk Bening yang direhabilitasi	Km	3	3	3	3	175.107,6	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036.RBS.070	Daerah irigasi Pekalen yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	115.915,8	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036.RBS.075	Daerah irigasi Jambo Aye yang dibangun	Km	4	4	4	4	126.467,3	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
5036.RBS.076	Daerah irigasi Lhok guci yang dibangun	Km	3	3	3	3	211.018,6	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
5036.RBS.077	Daerah irigasi BaroRayayang direhabilitasi	Km	5	5	5	5	231.121,8	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
5036.RBS.083	Daerah irigasi Sei Ular (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	44.089,5	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
5036.RBS.084	Daerah irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan yang dibangun	Km	5	5	5	5	415.442,7	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.RBS.085	Daerah irigasi Batanghari yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	256.711,6	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.086	Daerah irigasi Batang Asai yang dibangun	Km	37	37	37	37	1.112.496,7	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.RBS.087	Daerah irigasi Air Manjuto yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	218.721,9	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.088	Daerah irigasi Air Ketahun yang direhabilitasi	Km	8	8	8	8	48.892,0	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.089	Daerah irigasi Air Seluma yang direhabilitasi	Km	8	8	8	8	71.632,9	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.090	Daerah irigasi Lematang yang dibangun	Km	2	2	2	2	235.201,2	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.092	Daerah irigasi Komerang yang dibangun	Km	55	55	55	55	140.657,7	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.094	Daerah irigasi Sekampung Batanghari yang ditingkatkan	Km	5	5	5	5	148.263,8	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.095	Daerah irigasi Way Rarem yang ditingkatkan	Km	8	8	8	8	224.934,9	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.096	Daerah irigasi Way Seputih yang ditingkatkan	Km	55	55	55	55	174.489,7	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.097	Daerah irigasi Way Tulung Mas yang ditingkatkan	Km	4	4	4	4	126.036,1	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.098	Daerah irigasi Way Umpu yang ditingkatkan	Km	22	22	22	22	668.385,4	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.099	Daerah irigasi Raman Utara yang ditingkatkan	Km	5	5	5	5	160.714,2	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.102	Daerah irigasi Panti Rao (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	6	6	6	6	34.420,4	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.103	Daerah irigasi Batang Tongar (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	4	4	4	4	27.626,8	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.029	Daerah irigasi Tapin yang dibangun	Km	8	8	8	8	396.542,5	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.041	Jaringan irigasi SS Macan (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	67.294,5	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.046	Daerah irigasi DI Cikeusik (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	136.909,5	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.047	Daerah irigasi Rentang yang dimodernisasi	Km	115	115	115	115	3.759.123,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5036.RBS.066	Daerah irigasi Kedungputri (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	14	14	14	14	134.589,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5036.RBS.093	Daerah irigasi rawa Karang Agung hilir yang direhabilitasi	Km	97	97	97	97	83.538,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.036	Daerah irigasi tambak Kersik putih yang ditingkatkan	Km	10	10	10	10	17.403,8	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.038	Daerah irigasi tambak Marangkayu yang dibangun	Km	5	5	5	5	18.146,3	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5036.CBS.039	Daerah irigasi tambak Sepunggur yang ditingkatkan	Km	23	23	23	23	33.879,3	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	5300.CDR.007	P3TGAI	Km	4	4	4	4	10.442.250,0	-	Kemen PUPR
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	5040.RBS.015	Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	Km	32	0	0	0	580.125,0	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah maupun jangka panjang											
018.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	4584.SDA.508	Sumber Daya Genetik yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Akses/ Produk	4.250 produk	4.250	4.250	4.250	5.394,2	Pusat	Kementan
4585	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	4585.DDA.508	Sumber Daya Genetik Peternakan yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Akses/ Produk	19 produk	19	19	19	9.965,0	3 Provinsi	Kementan
		4585.DDA.536	Sumber Daya Genetik Perkebunan yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Akses/ Produk	422 produk	5.820	5.837	5.875	7.556,5	5 Provinsi	Kementan
		4585.SDA.502	Galur Harapan Tanaman	Galur/ Produk	19 produk	7	7	7	56.963,2	3 Provinsi	Kementan
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah											
018.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
4585	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	4585.DDA.522	Bibit Ternak	Ekor/ Produk	100.320 produk	110.330	120.340	130.350	52.786,0	3 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.b.1* Subsidi ekspor pertanian											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 2.c.1* Indikator anomali harga pangan											
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1814.BMA.001	Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan	Layanan	35	35	35	35	158.607,0	Pusat, 34 Provinsi	Kementan
		1814.BDD.001	Pangan yang terdistribusi	Unit	32.150	32.150	32.150	32.150	125.000,0	22 Provinsi	Kementan
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.1.1 * Angka Kematian Ibu (AKI)											
3.1.2 * Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan											
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup											
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup											
024.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	2072.SDC.001	Model Penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian	Model	5	5	3	3	100.626,5	Pusat 17 Provinsi dan 17 kabupaten/kota	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2090.QDB.004	Pembinaan RS yang melakukan operasi <i>sectio caesaria</i> darurat dalam waktu kurang atau sama dengan 30 menit	Rumah sakit	66	66	66	66	11.100,0	Pusat	Kemenkes
2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	2087.AAG.002	Rancangan Revisi Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah	Rancangan	1	-	-	-	201,8	Pusat	Kemenkes
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.508	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak	Paket	2	2	2	2	7.000,0	Pusat	Kemenkes
		2065.QEC.516	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	Paket	1	1	1	1	4.891.609,8	Pusat	Kemenkes
		2065.QEC.517	Paket Penyediaan Vaksin Baru	Paket	1	1	1	1	31.125,0	Pusat	Kemenkes
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.004	Ibu hamil Terinformasi terkait kesehatan masa kehamilan, persalinan, nifas, KB dan perawatan BBL	Kegiatan	12	12	12	12	362,4	Pusat	Kemenkes
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Orang	238.000	210.000	140.000	140.000	607.196,7	Pusat	Kemenkes
		2080.QEA.003	Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro	Orang	140.000	190.000	240.000	290.000	69.414,0	Pusat	Kemenkes
024.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2076.SCJ.051	Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	Orang	199	100	100	100	10.300,0	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kemenkes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.002	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi	Orang	762	708	708	708	2.673,0	Pusat dan DKI Jakarta	Kemenkes
		2058.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi imunisasi	Layanan	13	13	13	13	388.093,2	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.007	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	Orang	275	300	300	325	1.130,0	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.007	Media Komunikasi, Informasi, edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	Layanan	5	5	5	5	627,6	Pusat	Kemenkes
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	2794.QDB.001	K/L Bidang sosial dan budaya yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG	K/L	11	11	13	13	3.744,1	Pusat	Kemen PPPA
		2794.UBA.003	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Penurunan AKI dan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Desa bidang Pendidikan	Daerah (Prov/Kab/Kot)	-	4	4	4	1.650,0	Provinsi	Kemen PPPA
		2794.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan kebijakan PUG bidang sosial dan budaya	Daerah (Prov/Kab/Kot)	7	9	11	13	5.417,5	Provinsi	Kemen PPPA
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (<i>Stunting</i>)	Daerah (Prov/Kab/Kot)	40	40	40	40	3.529,68	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana											
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3320.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	34	34	34	34	3.309,0	34 Provinsi	BKKBN
010.CP Program Tata Kelola Kependudukan											
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1271.UBA.002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	5	5	5	5	28.950,0	34 Provinsi	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.514	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	Paket	1	1	1	1	4.384.830,5	Pusat	Kemenkes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.007	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Orang	600	300	500	500	1.130,0	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.001	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Layanan	5	5	5	5	2.464,2	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.005	Deteksi Dini Penyakit HIV AIDS dan IMS di Papua dan Papua Barat	Layanan	5	5	5	5	3.238,7	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4249.QAH.014	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Layanan	338	338	338	338	4.720,6	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089.PEF.002	Orang yang diberi sosialisasi dan diseminasi serta edukasi pengendalian TB di tempat kerja (Tambahan TB)	Orang	10.169	-	-	-	13.287,5	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		2089.UBA.002	Provinsi / Kab Kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan pencegahan TB di tempat kerja (Tambahan TB)	Prov/Kab/Kota	200	-	-	-	5.842,8	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.511	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	Paket	1	1	1	1	2.061.936,1	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.QAH.007	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC	Layanan	3	4	4	4	594.132,9	DKI Jakarta	Kemenkes
		2060.PEF.003	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	Orang	300	400	500	600	19.511,8	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.003	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	Layanan	3	5	7	9	9.508,0	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.008	Layanan Diteksi Dini Terduga TBC Papua dan Papua Barat	Layanan	6	8	8	8	2.683,3	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	2060.QAH.015	Layanan deteksi dini terduga TBC	Layanan	467	467	467	467	6.641,7	Pusat	Kemenkes
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5836	Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	5836.QDB.007	Pembinaan RS Rujukan Nasional yang telah melakukan Surveilans AMR sesuai Standar	Lembaga	-	-	-	-	988,3	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang											
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.512	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria	Paket	1	1	1	1	90.092,4	Pusat	Kemenkes
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	2059.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	Orang	776	776	776	776	3.886,5	Pusat dan 32 Provinsi	Kemenkes
		2059.QAH.005	Surveilans dan deteksi dini penyakit malaria Tingkat Provinsi	Lokasi	32	32	32	32	14.619,0	Pusat	Kemenkes
		2059.QAH.006	IRS/Indoor Residual Spraying (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah)	Layanan	8	8	8	8	808,6	7 Provinsi	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2059.QAH.007	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit katagori I (daerah sulit selain Provinsi Papua dan Papua Barat)	Layanan	8	12	7	4	1.026,6	7 Provinsi	Kemenkes
		2059.QMA.001	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	Layanan	4	5	5	6	1.401,9	Pusat	Kemenkes
		2059.PEF.002	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat	Orang	100	100	100	100	120,0	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2059.QAH.022	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) Papua dan Papua Barat	Layanan	56	16	16	16	110,0	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2059.QAH.023	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit katagori II (Provinsi Papua dan Papua Barat)	Layanan	8	8	8	8	1.918,5	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4249.QAH.010	Layanan Pengendalian Vektor Malaria	Layanan	166	166	166	166	844,3	Pusat	Kemenkes
		4249.QAH.020	Layanan Penemuan Aktif Surveilans migrasi malaria	Layanan	588	588	588	588	375,8	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.006	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis	Orang	500	500	500	500	3.138,1	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.003	Surveilans dan Deteksi Dini Hepatitis	Layanan	22	22	22	22	3.202,7	Pusat	Kemenkes
		2060.QMA.006	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis	Paket	1	1	1	1	892,3	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta											
3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta											
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	2059.PEF.004	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan	Orang	200	200	200	200	1.494,4	Pusat	Kemenkes
		2059.QAH.001	Surveilans dan deteksi dini penyakit Filariasis dan Kecacingan	Layanan	35	55	55	55	7.072,9	Pusat	Kemenkes
		2059.QAH.031	Pelaksanaan POPM Filariasis dan Kecacingan	Layanan	48	48	48	48	48.914,6	Pusat	Kemenkes
		2059.QMA.004	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan	Layanan	8	9	9	9	3.532,8	Pusat	Kemenkes
		2059.PEF.007	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan Papua dan Papua Barat	Orang	60	60	60	60	605,8	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2059.QMA.009	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan Papua Papua Barat	Layanan	2	-	-	-	726,8	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.004	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	Orang	1.300	1.300	1.300	1.300	2.394,5	Pusat	Kemenkes
		2060.QAH.001	Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Kusta	Layanan	130	207	239	271	50.931,4	Pusat dan 32 Provinsi	Kemenkes
		2060.QAH.006	Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Kusta di Papua dan Papua Barat	Layanan	49	49	49	49	21.613,5	Papua dan Papua Barat	Kemenkes
		2060.QMA.004	Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	Layanan	3	3	3	3	901,3	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs:										
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun										
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun										
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2061.PEF.001	Sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan layanan upaya berhenti merokok	Orang	938	1.000	1.000	1.000	4.425,4	Pusat	Kemenkes
	2061.QMA.001	Media komunikasi, informasi, edukasi layanan upaya berhenti merokok	Layanan	1	1	1	1	2.793,7	Pusat	Kemenkes
	2061.PEA.006	Koordinasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok	Kegiatan	4	4	4	4	6.066,9	Pusat	Kemenkes
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan										
4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4123.QIA.001	Label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	Label dan Iklan	60.200	60.400	60.600	60.800	9.083,0	Pusat	Badan POM
INDIKATOR TPB/SDGs:										
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi										
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun										
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit										
2061 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2061.PEF.002	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	Orang	1.105	1.105	1.105	1.105	4.421,9	Pusat	Kemenkes
	2061.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	Layanan	1	1	1	1	3.024,8	Pusat	Kemenkes
	2061.PEF.003	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Orang	329	329	329	329	5.110,9	Pusat	Kemenkes
	2061.QMA.003	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Layanan	1	1	1	1	1.516,6	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2061.PEF.004	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah	Orang	830	900	900	900	4.779,8	Pusat	Kemenkes
		2061.QMA.004	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah	Layanan	1	1	1	1	684,8	Pusat	Kemenkes
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5833.PEH.001	Promosi Peningkatan Literasi Germas melalui berbagai media	Promosi	35	35	35	35	371.612,9	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		5833.QDD.001	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Kelompok Masyarakat	35	35	35	35	262.776,8	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089.UBA.001	Provinsi / Kab Kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan kerja	Kegiatan	368	368	368	368	46.076,2	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		2089.SCI.004	Tenaga kesehatan yang dilatih kesehatan olahraga	Orang	60	60	60	60	2.590,6	Pusat	Kemenkes
		2089.UBA.004	Provinsi yang difasilitasi dan dibina terkait penguatan Aktivitas Fisik Anak Sekolah (Tambahkan SKN)	Prov/Kab/Kota	34	-	-	-	6.512,5	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
		2089.UBA.005	Provinsi/kab/kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan olahraga	Prov/Kab/Kota	368	368	368	368	34.903,4	Pusat dan 34 provinsi	Kemenkes
090.EF Program Perdagangan Dalam Negeri											
3716	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3716.PEH.001	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat nusantara	PMKM	125	420	430	430	41.130,0	34 provinsi	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis											
3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
5837	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5837.PEA.004	Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Penyalahguna Napza yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis	Kegiatan	20	20	20	20	2.912,7	Pusat	Kemenkes
066.BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)											
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	3260.BDB.001	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Lembaga	635	700	730	750	123.741,2	Pusat dan Daerah	BNN
		3260.BDD.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	207	250	250	250	47.973,0	Pusat dan Daerah	BNN
		3260.PDD.001	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Lembaga	20	20	20	20	14.223,4	Pusat dan Daerah	BNN
		3260.QDD.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Kelompok Masyarakat	45	50	55	60	6.739,7	Pusat dan Daerah	BNN
4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	4020.BAA.001	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Orang	20	20	20	20	3.229,7	Daerah	BNN
		4020.BAA.002	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Orang	590	590	590	590	42.876,4	Daerah	BNN

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4020.BAA.003	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Orang	140	140	140	140	5.559,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.004	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Orang	12	12	12	12	1.677,1	Daerah	BNN
		4020.BAA.005	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Orang	138	138	138	138	10.138,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.006	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Orang	100	100	100	100	4.442,4	Daerah	BNN
		4020.BAA.007	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Orang	6	6	6	6	850,8	Daerah	BNN
		4020.BAA.008	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Orang	126	126	126	126	9.619,7	Daerah	BNN

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4020.BAA.009	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Orang	168	168	168	168	6.833,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.010	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Orang	10	10	10	10	1.162,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.011	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Orang	70	70	70	70	4.558,1	Daerah	BNN
		4020.BAA.012	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Orang	120	120	120	120	3.970,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.013	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Orang	6	6	6	6	632,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.014	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Orang	66	66	66	66	3.797,6	Daerah	BNN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4020.BAA.015	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Orang	88	88	88	88	2.535,4	Daerah	BNN
		4020.BAA.016	Program Rehabilitasi 12 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Orang	5	5	5	5	578,2	Daerah	BNN
		4020.BAA.017	Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Orang	40	40	40	40	2.606,3	Daerah	BNN
		4020.BAA.018	Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Orang	105	105	105	105	3.211,9	Daerah	BNN
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs:											
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern											
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama											
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.007	Komitmen/Kesepahaman Kab/Kota dalam Kesehatan Reproduksi	Kegiatan	4	4	4	4	1.404,6	Pusat	Kemkes
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana											
3316	Pembinaan Akses Pelayanan KB	3316.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Daerah	34	34	34	34	895,0	34 Provinsi	BKKBN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
3318	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lini Lapangan Program Bangga Kencana	3318.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan fasilitas pengelolaan SDM lini lapangan	Daerah	34	34	34	34	3.403,0	34 Provinsi	BKKBN
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3320.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	34	34	34	34	3.309,0	34 Provinsi	BKKBN
3327	Pembinaan Kualitas Pelayanan KB	3327.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB	Daerah	34	34	34	34	2.504,0	34 Provinsi	BKKBN
3322	Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus	3322.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus	Daerah	34	34	34	34	2.338,0	34 Provinsi	BKKBN
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.BDB.001	Faskes yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	Lembaga	7.546	7.546	7.546	7.546	37.029,0	34 Provinsi	BKKBN
		3331.QEI.001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon)	Lembaga	11.774	11.774	11.774	11.774	1.130.244,0	34 Provinsi	BKKBN
010.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV	6139.UBA.023	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	Provinsi, Kabupaten/ Kota	50	55	60	70	1.200,0	Pusat	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.8.1 * Cakupan pelayanan kesehatan esensial 3.8.1.(a) <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan 3.8.2 * Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)											

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	Penduduk (juta)	96,8	110,0	111,4	112,9	266.061.200,0	34 provinsi	Kemenkes
2051	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2051.RAB.003	FKTP yang dipenuhi SPA sesuai standar	Paket	1	-	-	-	70.000,0	Pusat	Kemenkes
		2051.QDB.001	RSUD yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan SPA Sesuai standar	Lembaga	130	130	130	130	1.593,0	Pusat	Kemenkes
		2051.QDB.002	RS DTPK yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana dan alat	Lembaga	7	7	7	7	1.062,1	Pusat	Kemenkes
		2051.QDB.003	Puskesmas DTPK yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan standar SPA	Lembaga	250	250	250	250	5.310,1	Pusat	Kemenkes
2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	2087.QAH.001	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Dekonsentrasi	Layanan	192	192	192	192	148.950,8	28 Provinsi	Kemenkes
2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2090.QDB.005	Fasyankes yang dilakukan pengembangan jejaring pelayanan <i>telemedicine</i>	Lembaga	67	67	67	67	8.387,4	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.516	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	Paket	1	1	1	1	4.891.609,8	Pusat	Kemenkes
		2065.UBA.001	Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Menerapkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	264	264	264	264	39.594,5	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.b.2* Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar											
063.WA Program Dukungan Manajemen											
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	Kesepakatan	2	2	2	2	5.000,0	Pusat	Badan POM
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2064	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	2064.QDB.002	Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Lembaga	1.355	1.355	1.355	1.355	7.354,9	Pusat	Kemenkes
		2064.QDB.001	Rumah Sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas	Lembaga	255	272	289	306	14.596,6	Pusat	Kemenkes
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.515	Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Paket	10	10	10	10	1.139.142,1	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan											
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	2078.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	Orang	1.493	1.200	1.200	1.200	296.800,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.003	Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	Orang	5.487	4.000	4.000	4.000	270.000,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Orang	270	200	200	200	14.300,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis	Orang	660	660	660	660	75.200,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Orang	40	40	40	40	6.800,0	Pusat	Kemenkes
		2078.QAA.006	Pendayagunaan Dokter pasca internsip	Orang	400	600	800	800	613.800,0	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2077	Pendidikan SDM Kesehatan	2077.SBA.001	Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah	Orang	500	1.000	1.500	1.500	1.407,8	Pusat	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 3.d.1* Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan											
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB/Wabah	Orang	532	200	200	200	3.016,4	Pusat	Kemenkes
		2058.QAH.001	Penyelidikan epidemiologi/investigasi penyakit potensial KLB/ wabah	Layanan	390	390	390	390	31.681,2	Pusat dan DKI Jakarta	Kemenkes
		2058.QAH.007	Surveilans dan deteksi dini penyakit potensial KLB/Wabah	Layanan	297	297	297	297	24.019,6	DKI Jakarta	Kemenkes
		2058.QAH.008	Tindakan pengendalian pada KLB/wabah	Layanan	1	1	1	1	5.312,2	Pusat	Kemenkes
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4249.QAH.003	Layanan Kekearifan Kesehatan di POS Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	Layanan	679	679	679	679	580.489,0	Pusat	Kemenkes
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS											
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika											
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran	2029.QDB.001	Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Asesmen	Lembaga	271.523	271.523	271.523	271.523	362.469,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.PBH.001	Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	5	3	5	5	127.605,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.SDC.001	Soal yang dikembangkan	Model	18.000	9.000	18.000	18.000	69.626,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.SDC.002	Model Penilaian Pendidikan	Model	9	3	9	9	45.380,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2029.SDC.003	Perangkat Pembelajaran Yang Dikembangkan	Model	213	213	213	213	47.129,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
2027	Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan	2027.PDI.002	Pengembang kurikulum yang berkompeten	Orang	50	25	50	50	8.371,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.QMA.001	Sistem Informasi kurikulum dan perbukuan	Layanan	1	1	1	1	8.814,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.SDC.001	Model kurikulum yang dikembangkan	Model	214	190	214	214	94.464,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.ABH.002	Kebijakan dan Standar Perbukuan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	7.846,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.SDC.002	Buku yang dinilai dan diawasi	Model	4.010	1.500	4.010	4.010	73.779,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		2027.SDC.003	Buku umum dan buku pendidikan yang dikembangkan	Model	291	50	291	291	325.157,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	4461.QDB.335	SMP yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	22.329	1.602	22.329	22.329	138.105,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4461.QDB.338	SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku	Lembaga	514	796	514	514	105.818,5	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	4460.QDB.235	SD yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	514	2.144	514	514	148.623,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4460.QDB.238	SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	Lembaga	2.570	1.338	2.570	2.570	151.757,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	4462.QDB.435	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	650	982	650	650	44.893,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4462.QDB.438	SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	Lembaga	810	982	810	810	51.864,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	4463.QDB.538	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Lembaga	2.259	685	2.259	2.259	157.055,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4463.QDB.541	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Lembaga	548	685	548	548	31.595,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	4262.QDB.050	SMK yang Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	Lembaga	200	0	200	200	91.661,5	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	4422.SDC.001	Model Pembelajaran Madrasah yang dikembangkan	Model	1	0	2.042	2.042	170.220,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.SDC.001	Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan	Model	1	5	1	1	65.500,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	2127.SDC.001	Model Kurikulum dan Pembelajaran PAI yang Dikembangkan	Model	1	1	1	1	35.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs:											
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat											
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2003	Pembinaan Sekolah Dasar	2003.QDB.203	SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi	Lembaga	757	274	437	437	91.074,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	2000.QDB.313	SMP yang mendapat pembinaan Afirmasi	Lembaga	450	164	450	450	53.247,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	5627.QDB.405	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	Lembaga	34	34	34	34	104.631,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
5637	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas	5637.FBA.005	Fasilitasi daerah dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan Dikdas	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	233.837,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		5637.UBA.002	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	30.726,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5638.FBA.006	Fasilitasi daerah dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan Dikmen dan Diksus	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	170.538,9	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		5638.UBA.003	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	22.026,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.QEK.005	Siswa MI Penerima BOS	Orang	3.958.979	3.959.206	3.973.614	3.973.614	14.279.075,4	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.QEK.006	Siswa MTs Penerima BOS	Orang	3.425.948	3.245.425	3.260.964	3.260.964	14.314.055,8	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.QEK.007	Siswa MA Penerima BOS	Orang	1.429.150	1.429.150	1.439.744	1.439.744	8.606.682,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.BEI.003	Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	Lembaga	5	143	450	450	36.150,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.BEI.001	Madrasah Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga	35	2.250	2.391	2.391	698.110,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.CBI.002	Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	Unit	634	216	269	269	4.345.745,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.QEK.005	Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	18.693	18.693	21.102	21.102	71.631,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.006	Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	99.202	99.202	107.109	107.109	453.884,2	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.007	Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Orang	69.925	71.925	69.925	69.925	422.550,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.BEK.001	Santri Penerima Beasiswa	Orang	1.625	1.625	3.800	3.800	31.900,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.BEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga	100	3.625	11.957	11.957	5.405.525,8	Pusat dan Daerah	Kemenag
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	2136.QEK.004	Siswa SMTK/SMK Penerima BOS	Orang	9.533	9.421	10.100	10.500	64.263,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.005	Siswa SMPTK Penerima BOS	Orang	3.636	3.611	4.520	5.150	18.572,1	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.006	Siswa SSDK Penerima BOS	Orang	3.482	3.305	3.950	4.150	13.561,6	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	2139.QEK.008	Siswa SMAK Penerima BOS (PN)	Orang	2.162	5.146	2.162	2.162	22.301,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	2142.QEK.001	Siswa penerima BOS Tk Adi	Orang	339	480	550	600	1.549,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.002	Siswa penerima BOS Tk Madya	Orang	107	160	180	200	924,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.003	Siswa penerima BOS Tk Utama	Orang	124	615	550	600	2.995,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.QEI.001	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan Bantuan	Lembaga	1.030	867	1.100	1.100	97.970,2	Pusat dan Daerah	Kemenag
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4253	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	4253.RBI.001	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	Unit	1.611	37	0	0	5.551.136,4	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Luar Biasa	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah	Unit	196	7	0	0	1.216.320,2	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.004	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Keagamaan	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.005	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kementerian PUPR
		4253.RBI.006	Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Provinsi/Kab/Kota
INDIKATOR TPB/SDGs:											
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin											
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	Daerah (Prov/Kab/Kota)	58	63	63	58	3.980,4	Provinsi/Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	2809.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	20	20	20	2.500,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.008	Komitmen/kesepahaman dalam pelayanan kesehatan balita	Kegiatan	79	79	79	79	5.784,5	Pusat	Kemenkes
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	6395.AEE.007	Kemitraan Bidang PAUD dan Parenting	Kesepakatan	12	12	12	12	2.343,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	4459.QDB.143	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Lembaga	5.000	5.000	5.000	5.000	111.832,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.142	Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Lembaga	1.626	590	1.626	1.626	121.042,1	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.136	Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Lembaga	1.112	1.112	1.112	1.112	205.676,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.138	Satuan PAUD yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku	Lembaga	1.542	565	1.542	1.542	134.358,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4459.QDB.144	Satuan PAUD yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Pencapaian Perkembangan Anak	Lembaga	1.000	370	1.000	1.000	31.359,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	6397.QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya	Lembaga	214.067	120.399	214.067	214.067	731.031,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
4272	Pembinaan PAUD	4272.RAA.141	Satuan PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran Termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	Paket	4.100	0	4.100	4.100	342.750,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4272.QEK.106	Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan	Orang	6.000	6.000	6.000	6.000	62.807,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4272.QDB.103	Satuan PAUD Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	Lembaga	274	237	274	274	75.499,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.QEK.008	Siswa RA penerima BOP	Orang	1.334.443	1.353.594	1.334.443	1.334.443	3.232.169,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.QEK.001	BOP Nava Dhammasekha	Orang	721	750	760	770	3.384,1	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin											
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	4278.QDC.001	Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Orang	50.000	30.000	50.000	50.000	740.369,5	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4278.QDC.002	Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Orang	16.676	16.676	16.676	16.676	362.171,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4278.QDB.001	Lembaga Kursus dan Pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kerja/ berbasis dunia kerja	Lembaga	200	0	100	100	83.444,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	4262.QDB.013	Kurikulum SMK yang Dikembangkan sesuai Kebutuhan IDUKA	Model	48	50	48	48	168.895,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4262.RBI.002	Unit SMK Baru yang dibangun	Unit	1	0	0	0	18.560,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		4262.QDB.007	SMK yang Direvitalisasi	Lembaga	895	0	895	895	3.904.632,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QDC.509	Remaja dan Perempuan Dewasa yang Mendapatkan pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5626.QDB.508	Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Lembaga	514	514	514	514	61.680,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.QEI.001	Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	Lembaga	5.000	5.000	275.000	275.000	11.200.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.RAA.001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan	Paket	246	63	1.300	1.325	41.156,1	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)											
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	4467.RBJ.003	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Unit	10	10	10	10	1.840.316,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	4471.RAA.003	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	Paket	18	5	5	5	990.559,6	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
025.DK Program Pendidikan Tinggi											
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	2132.BGC.001	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	Lembaga	18	18	18	18	8.497.689,3	Pusat	Kemenag
		2132.BGC.002	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui PNPB	Lembaga	40	40	40	40	4.116.933,3	Pusat	Kemenag
		2132.QEI.001	Bantuan Operasional Kopertais	Lembaga	71	70	70	70	49.500,0	Pusat	Kemenag
		2132.QEI.002	Bantuan pendanaan PTN-BH	Lembaga	1	1	1	1	346.923,6	Pusat	Kemenag
		2132.QEI.003	BOPTN	Lembaga	58	58	58	58	2.919.014,9	Pusat	Kemenag
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	5106.QEI.001	BOPTN	Lembaga	2	2	2	2	4.007,1	Pusat	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	5101.BEI.001	BOPTN	Lembaga	17.628	17.629	17.629	17.629	119.875,5	Pusat	Kemenag
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	2131.QEI.003	Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan yang menerima Bantuan operasional (PN)	Lembaga	25	22	25	25	12.900,0	Pusat	Kemenag
		2131.QEI.004	BOPTN (PN)	Lembaga	365	365	365	365	5.240,0	Pusat	Kemenag
4438	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali	4438.BEI.001	Bantuan operasional Ma'had Aly	Lembaga	22	60	60	60	60.600,0	Pusat	Kemenag
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	5104.QEI.001	BOPTN	Lembaga	4	4	4	4	44.490,6	Pusat	Kemenag
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4253	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan	4253.CBJ.001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	Unit	91	14	-	-	2.403.819,5	Daerah	Kementerian PUPR
		4253.CBJ.002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Unit	13	-	-	-	1.076.757,4	Daerah	Kementerian PUPR
		4253.CBJ.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Lainnya	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Daerah	Kementerian PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)											
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.BAH.001	Platform E-learning Madrasah yang dikelola	Layanan	100	100	100	100	25.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.CAA.001	Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	Paket	1.060	1.350	2.788	2.788	534.050,0	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas										
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun										
4465 Layanan Pembiayaan Dasar Menengah	4465.QEK.012	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614	10.360.614	16.881.920,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	4465.QEK.013	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968	4.369.968	5.483.715,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	4465.QEK.014	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.368.243	1.368.243	1.368.243	1.368.243	2.396.459,3	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	4465.QEK.015	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.829.167	1.829.167	1.829.167	1.829.167	3.095.743,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5626 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QEK.507	Siswa Penerima Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	2.895	2.895	2.895	2.895	417.445,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
	5626.QDB.540	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	500	500	500	500	43.818,1	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
2003 Pembinaan Sekolah Dasar	2003.QDB.204	Community Learning Center (CLC) SD yang mendapatkan Pembinaan	Lembaga	111	111	111	111	62.872,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.WA Program Dukungan Manajemen										
4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan	4269.BEJ.017	Beasiswa Unggulan	Orang	4.440	3.470	0	0	269.888,4	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi										
4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	4469.QEJ.016	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Orang	1.108.810	670.158	670.158	670.158	35.839.345,7	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
	4469.QEJ.018	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	7.382	8.417	8.417	8.417	684.577,4	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun										
2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.QEK.001	Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Orang	939.607	939.607	939.607	939.607	2.018.507,0	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2129.QEK.002	Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	Orang	745.315	745.086	745.086	745.086	2.235.509,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.QEK.003	Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Orang	320.372	320.372	320.372	320.372	2.235.509,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.QEK.001	SantriPPS Ula/PaketA/Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	23.487	23.487	30.930	30.930	48.975,3	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.002	SantriPPSWustha/PaketB/Hanya Mengaji/Muadalah Terima PIP	Orang	92.533	92.533	107.728	107.728	241.560,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2128.QEK.003	SantriPPSUlya/PaketC/Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	45.571	45.571	54.895	54.895	200.932,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	2136.QEK.001	Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	Orang	11.309	8.342	10.435	11.000	38.119,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.002	Siswa SMPTK Penerima PIP	Orang	2.769	2.760	3.870	4.644	67.995,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2136.QEK.003	Siswa SDKTK Penerima PIP	Orang	2.554	2.434	2.700	2.800	4.664,2	Pusat dan Daerah	Kemenag
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	2139.QEK.009	Siswa SMAK Penerima PIP (PN)	Orang	656	2.078	656	656	5.585,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	2142.QEK.004	Siswa penerima PIP Tk Adi	Orang	246	365	400	500	654,3	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.005	SiswapenerimaPIPTkMadya	Orang	102	150	175	200	511,7	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2142.QEK.006	SiswapenerimaPIPTkUtama	Orang	65	296	400	500	1.447,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
025.DK Program Pendidikan Tinggi											
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	2132.QEJ.004	Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	Orang	280	200	200	200	9.600,0	Pusat	Kemenag
		2132.QEJ.007	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Orang	61.030	71.645	52.795	52.795	3.121.349,2	Pusat	Kemenag
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	2131.QEJ.004	Mahasiswa penerima KIP Kuliah	Orang	370	370	350	350	15.805,0	Pusat	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	5106.QEJ.001	Mahasiswa PTKB Penerima PIP Kuliah	Orang	628	400	400	400	10.726,6	Pusat, STAB Raden Wijaya, dan STABN Sriwijaya	Kemenag
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	5104.QEJ.001	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Orang	2.844	3.198	2.314	2.314	139.746,2	Pusat	Kemenag
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	5101.QEJ.001	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Orang	5.238	7.288	6.310	6.310	296.462,0	Pusat	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun											
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QDB.511	Lembaga yang Mendapat Pembinaan Budaya Baca Masyarakat	Lembaga	200	200	200	200	42.721,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		5626.QDC.510	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Orang	97.177	97.177	97.177	97.177	290.442,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua) (WASH)											
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	2000.RAA.337	SMP Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan	Paket	6.435	0	6.435	6.435	2.028.411,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
2003	Pembinaan Sekolah Dasar	2003.RAA.237	SD Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	4.981	4.981	5.000	5.000	1.549.080,3	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	5627.RAA.406	SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan	Paket	1.195	0	1.195	1.195	371.168,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.RAA.537	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Paket	147	0	147	147	53.532,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	4262.RAA.020	SMK yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Pada Sektor Prioritas	Paket	575	575	575	575	270.578,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.BEI.002	Bantuan Madrasah daerah 3T	Lembaga	20	40	50	50	13.500,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
		2129.BEI.004	Bantuan Peningkatan Mutu UKS/M	Lembaga	90	450	420	420	84.700,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2128.BEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga	100	0	11.957	11.957	2.531.267,9	Pusat dan Daerah	Kemenag
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.QEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas	Lembaga	35	250	250	250	46.500,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.PEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan	Kegiatan	12	6	6	6	3.280,9	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA
		2810.UBA.001	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	Daerah (Prov/Kab/Kot)	8	8	8	8	2.801,1	Provinsi/Kab/Kota	Kemen PPPA
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	Daerah (Prov/Kab/Kot)	58	63	63	58	3.980,4	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
6393	Kebijakan Penguatan Karakter	6393.QMB.001	Layanan Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	Layanan	1	0	1	1	139.569,7	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		6393.QMB.002	Layanan Penguatan Karakter Keluarga	Layanan	1	0	1	1	92.683,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
		6393.QMB.003	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Layanan	1	1	1	1	141.105,6	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	4460.QDB.231	SD yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Lembaga	3.085	1.161	3.085	3.085	125.335,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	4461.QDB.331	SMP yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Lembaga	475	475	475	475	119.918,0	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	4462.QDB.431	SMA yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Lembaga	650	776	650	650	120.110,2	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	4422.SCI.001	Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	2.000	2.500	3.000	3.500	30.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	2127.SCI.003	Siswa Sekolah Umum yang mendapat penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	10	500	10	10	5.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.QDB.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Lembaga	1.000	1.000	3.120	3.120	19.600,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	4437.PEF.001	Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Orang	7.119	6.823	7.119	7.119	50.134,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.BEI.003	Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	Lembaga	5	143	450	450	36.150,0	Pusat dan Daerah	Kemenag
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang											
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4259	Pengembangan Kelembagaan	4259.QEJ.001	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Orang	528	396	396	396	178.626,6	Pusat	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan											
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	4271.PDG.001	Guru dan Tendik yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi	Orang	400	152	400	400	25.546,8	Pusat dan Daerah	Kemendikbud Ristek
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran											
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.PDG.002	Ustadz Guru Penerima Beasiswa Gelar S1	Orang	500	500	1.000	1.000	18.250,0	Pusat dan Daerah	Kemenag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER											
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.AFA.001	Rumusan NSPK Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	NSPK	1	-	-	-	1.050,0	Pusat	Kemen PPPA
		6372.AAA.001	Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Gender	UU	1	-	-	-	900,0	Pusat	Kemen PPPA
		6372.AAD.001	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Grand Design</i> Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	Peraturan Presiden	1	-	-	-	750,0	Pusat	Kemen PPPA
6376	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	6376.AFA.001	Rumusan NSPK Bidang Perlindungan Hak Perempuan	NSPK	1	-	-	-	4.583,4	Pusat	Kemen PPPA
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	6373.AAC.001	Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin	Peraturan Pemerintah	1	-	-	-	104,5	Pusat	Kemen PPPA
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5853	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5853.ABD.001	Rekomendasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM	Rekomendasi Kebijakan	9	12	15	18	375,5	Pusat	Kemenkum HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	1.000,0	Pusat	Komnas HAM/Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs:											
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir											
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6376	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	6376.QMA.001	Data dan Informasi Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	Layanan	1	-	-	1	14.389,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6375	Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	6375.QAA.001	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif	Orang	100	250	250	250	14.735,2	Pusat	Kemen PPPA
2797	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	2797.UBA.001	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ruang Publik, Situasi Darurat serta Kondisi Khusus	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17	20	27	34	4.960,3	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2797.QMB.001	KIE PHP dari KdRT, ruang publik, SDKK	Layanan	5	2	2	2	4.623,0	Pusat	Kemen PPPA
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	2800.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dalam naker dan dari TPPO	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17	17	21	29	4.749,7	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2800.BMB.001	KIE Pelaksanaan Kebijakan PHP dalam Ketenagakerjaan dan dari TPPO	Layanan	7	4	4	4	5.209,0	Pusat	Kemen PPPA
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	6377.QMA.001	Data dan Informasi SNP HAR	Layanan	1	-	-	1	40.000,0	Pusat	Kemen PPPA
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.UBA.001	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	8	8	8	2.801,1	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2810.BMB.001	KIE Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Layanan	3	3	4	4	1.238,0	Pusat	Kemen PPPA
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus	2805.UBA.001	Daerah yang di berikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PAKK	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	3	3	3	2.003,6	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2805.BMB.001	KIE Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Layanan	7	7	7	7	3.035,0	Pusat	Kemen PPPA
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6378.QAA.001	AMPK yang Mendapat Layanan Komprehensif	Orang	420	450	500	550	12.228,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6374	Peningkatan Partisipasi Keluarga	6374.UBA.001	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Keluarga dalam KG, PHP, dan PA	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11	11	11	11	9.400,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		6374.AAH.001	Kebijakan tentang Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam PPPA	Peraturan	1	1	1	1	1.300,0	Pusat	Kemen PPPA
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	6373.ABN.001	Rumusan Kebijakan Bidang Pengasuhan dan Lingkungan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.310,0	Pusat	Kemen PPPA
025.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama											
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2104.QDE.001	Keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah	Orang	120.083	355.800	355.800	355.800	398.000,0	Pusat	Kemenag
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	2137.BDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	1.271	1.497	1.600	1.700	334.333,3	Pusat	Kemenag
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2140.BDE.001	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga	350	700	350	350	22.227,3	Pusat	Kemenag
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	2143.BDE.001	Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga	2.060	130	3.500	4.000	37.510,5	Pusat	Kemenag
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	2145.QDE.001	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Keluarga	1.881	1.881	1.881	1.881	22.038,1	Pusat	Kemenag
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6277	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan	6277.BAA.104	Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	5.000	6.000	7.000	8.000	7.200.000,0	DKI Jakarta, Tanjung Pinang dan Pontianak	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6279	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak	6279.QAA.101	Jumlah Anak yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)	Orang	30.000	35.000	50.000	60.000	77.188.773,0	Kab Aceh Besar, Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kabupaten Magelang, Kota Mataram, Kota Kupang dan Kota Makasar	Kemensos
013.BF Peningkatan Pelayanan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian											
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1584.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Rekomendasi	28	28	28	28	11.930,0	Nasional	Kemendikbud
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	1587.AEC.001	Kerja Sama Keimigrasian	Kesepakatan	10	10	10	10	32.280,0	Nasional	Kemendikbud
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.DCI.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan bagi KorbanKtP/AdanTPPO	Orang	40	40	40	40	17.500,0	Pusat dan provinsi	Kemendikbud
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	-	-	-	1.193.958,0	Pusat dan Daerah	POLRI
		3142.BCE.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	-	90.299	90.299	90.299	3.707.134,0	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BP Program Modernisasi Almatsum dan Sarana Prasarana Polri											
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri	5062.RBM.005	Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Unit	3	4	4	4	45.000,0	Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat	POLRI
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2174	Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2174.BAA.003	Layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Orang	800	-	-	-	5.000,0	Pusat	Kemendikbud

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2174.BAA.001	Layanan Pelindungan CPMI	Orang	-	174.800	175.000	178.500	56.188,5	Pusat	Kemenaker
		2174.QAA.001	Layanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh atase dan staf teknis di 12 Negara Penempatan	Orang	200.000	250.000	250.000	250.000	134.070,7	Pusat	Kemenaker
104.DP Program Penempatan dan Pelindungan PMI											
3894	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan pekerja Migran Indonesia	3894.QAA.004	Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	Orang	17.131	12.000	17.131	17.131	56.169.700,0	Daerah	BP2MI
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.025	Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)	Provinsi, Kabupaten/ Kota	20	22	26	32	12.080,9	Pusat	Kemendagri
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494.QMB.002	Diseminasi Informasi Bidang PMK	Layanan	412	382	390	400	104.703,5	Pusat	Kemkominfo
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	1.000,0	Pusat	Komnas HAM/Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	2809.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20	20	20	20	2.500,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok masyarakat	29.620	31.101	32.656	34.289	261.088,0	34 Provinsi	BKKBN
025.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama											
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2104.QDE.001	Keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah	Orang	120.083	355.800	355.800	355.800	398.000,0	Pusat	Kemenag
		2104.QAA.002	Layanan Nikah dan Rujuk	Orang	2.646.587	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.985.831,5	Pusat dan Daerah	Kemenag
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	2137.BDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	1.271	1.497	1.600	1.700	334.333,3	Pusat	Kemenag
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2140.BDE.001	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Keluarga	350	700	350	350	22.227,3	Pusat	Kemenag
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	2143.BDE.001	Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga	2.060	130	3.500	4.000	37.510,5	Pusat	Kemenag
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	2145.QDE.001	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Keluarga	1.881	1.881	1.881	1.881	22.038,1	Pusat	Kemenag
059.GH Program Komunikasi Publik											
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494.QMB.002	Diseminasi Informasi Bidang PMK	Layanan	412	382	390	400	104.703,5	Pusat	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs:											
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah											
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.AAD.001	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Grand Design</i> Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen	Peraturan Presiden	1	-	-	-	750,0	Pusat	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	2790.QDB.001	K/L Bidang Politik dan Hukum yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	K/L	5	7	7	10	4.005,0	Pusat	Kemen PPPA
		2790.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG di Bidang Politik dan Hukum	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	4	5	7	6.467,0	Provinsi	Kemen PPPA
		2790.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8	7	7	7	10.740,0	Provinsi	Kemen PPPA
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364	Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	Unit	-	549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Satker (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	63.800,0	Pusat dan Daerah (Prov dan Kab/Kota)	KPU
010.CR Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum											
6145	Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	6145.QDC.001	Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	Orang	1000	1.100	8.000	10.000	11.200,0	Daerah	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs:											
5.6.1 * Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan											
5.6.2 * Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi											
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.007	Komitmen/Kesepahaman Kab/Kota dalam Kesehatan Reproduksi	Kegiatan	4	4	4	4	1.404,6	Pusat	Kemenkes
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana											
3316	Pembinaan akses pelayanan KB	3316.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	895,0	34 Provinsi	BKKBN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3320.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	3.309,0	34 Provinsi	BKKBN
3322	Peningkatan pelayanan KB wilayah khusus	3322.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	2.338,0	34 Provinsi	BKKBN
3327	Pembinaan kualitas pelayanan KB	3327.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB	Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)	34	34	34	34	2.504,0	34 Provinsi	BKKBN
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.QDD.001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok masyarakat	29.620	31.101	32.656	34.289	261.088,0	34 Provinsi	BKKBN
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.023	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	Provinsi, Kabupaten/ Kota	50	55	60	70	7.612,5	Pusat	Kemendagri
		6139.UBA.025	Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Provinsi, Kabupaten/ Kota	18	24	30	34	14.575,0	Pusat	Kemendagri
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
1606	Kerja Sama HAM	1606.ABD.002	Kota/Kabupaten Peduli HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	224,5	Pusat	Kemenkum HAM
INDIKATOR TPB/SDGs:											
5.a.1* (1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan											
5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol											
056.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanian											
4402	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	4402.QAB.001	Penatausahaan Tanah Ulayat	Provinsi	33	33	33	33	16.366,0	Satker	Kemen ATR/BPN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang	6416.QAA.001	SHAT PTSL ASN Kategori 1	Bidang	150.000	665.469	1.008.702	955.781	1.710.891,6	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.002	SHAT PTSL ASN Kategori 2	Bidang	208.503	587.909	604.564	672.331	2.076.345,3	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.003	SHAT PTSL ASN Kategori 3	Bidang	500.150	2.441.202	2.569.412	2.831.480	4.277.334,8	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.004	SHAT PTSL ASN Kategori 4	Bidang	600.000	747.677	831.724	1.031.726	4.213.510,4	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.005	SHAT PTSL ASN Kategori 5	Bidang	6.055.772	4.726.016	4.366.125	4.038.703	33.505.520,7	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.009	SHAT PTSL PM Kategori 3	Bidang	119.254	0	0	0	709.239,8	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.010	SHAT PTSL PM Kategori 4	Bidang	720.000	0	0	0	3.578.762,9	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.013	SHAT Mandiri Kategori 1	Bidang	9.637	1.062	0	0	2.812,7	3 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.014	SHAT Mandiri Kategori 2	Bidang	20.125	5.895	0	0	5.099,0	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.015	SHAT Mandiri Kategori 3	Bidang	39.232	14.122	0	0	8.472,8	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6416.QAA.016	SHAT Mandiri Kategori 4	Bidang	16.002	3.581	0	0	2.804,6	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
6416.QAA.017	SHAT Mandiri Kategori 5	Bidang	47.755	69.807	0	0	6.478,7	7 Provinsi	Kemen ATR/BPN		
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6418.QAA.U01	SK Redistribusi Tanah Kategori I	SK	25.891	43.415	205.000	155.000	177.007,1	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U02	SK Redistribusi Tanah Kategori II	SK	122.289	80.044	165.500	130.240	173.035,0	6 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U03	SK Redistribusi Tanah Kategori III	SK	209.510	227.661	432.774	377.500	375.958,0	10 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U04	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	SK	73.318	41.150	148.500	138.500	100.974,2	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U05	SK Redistribusi Tanah Kategori V	SK	41.300	25.150	20.120	20.120	21.683,5	5 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U06	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	SK	9.510	6.000	0	0	8.010,2	2 Provinsi	Kemen ATR/BPN
		6418.QAA.U07	SK Redistribusi Tanah Kategori VII	SK	816	1.000	0	0	406,3	1 Provinsi	Kemen ATR/BPN
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4501	Pengembangan Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband	4501.UBA.001	Penerapan Saluran Telekomunikasi (Ducting) Bersama	Kabupaten/ Kota	2	4	6	8	25.500,0	Tersebar	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.001	Palapa Ring	Kabupaten/ Kota	57	57	57	57	9.615.700,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.002	BTS/Last mile	Lokasi (Kumulatif)	2.417	3.704	9.510	9.510	23.557.000,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	Gbps	31	37	37	37	11.715.244,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.004	Akses Internet	Lokasi (Kumulatif)	15.532	37.532	77.532	117.532	8.968.840,0	Tersebar	Kemenkominfo
044.EB Program Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi											
2739	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	2739.BDG.002	Usaha Mikro yang difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui E-Commerce/Online	UMKM	1.000	540	540	540	5.653,3	Pusat	Kemen KUKM
2751	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM	2751.QDG.002	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	UMKM	250	152	152	152	11.728,7	Pusat	Kemen KUKM
2764	Pengembangan SDM UKM	2764.DAA.001	UKM/StartUp yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika	Orang	200	1.000	1.000	1.000	17.575,7	Pusat	Kemen KUKM
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6474	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	6474.UBB.001	Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Desa	200	250	250	250	130.000,0	Pusat	Kemendes PDPT
INDIKATOR TPB/SDGs: 5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.BMA.001	Rumusan Profil Tematik Bidang Kesetaraan Gender	Layanan	1	1	1	1	2.400,0	Pusat	Kemen PPPA
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6266	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	6266.ABN.408	Kebijakan Percepatan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Pusat	1	1	1	1	9.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	6269.UAB.500	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	Pusat	1	1	1	1	33.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.024	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Unit	22	24	28	34	9.250,0	Pusat	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.UBB.002	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Desa	74.593	74.961	74.961	74.961	43.250,0	Pusat	Kemendes PDTT
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK											
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4973	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	4973.RBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	1.279	1.530	1.530	0	PM	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.002	Pembangunan SPAM Regional	Unit	-	3	-	-	PM	Kota Binjai, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Wonogiri	Kemen PUPR
		4973.RBB.003	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	555	375	375	0	PM	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.004	Peningkatan SPAM Regional	Liter per detik	500	-	-	-	PM	Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
				Unit	-	1	-	-	PM	Kab. Bantul	Kemen PUPR
		4973.RBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	51.525	192.000	192.000	192.000	8.028.900,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
				Unit	-	41	-	-		36 Kabupaten/Kota	Kemen PUPR
		4973.RBB.006	Perluasan SPAM Regional	Unit	-	3	-	-	8.028.900,0	Kab. Rokan Hilir, Kab. Pasuruan, Kab. Buleleng	Kemen PUPR
				SR	400.200	400.000	400.000	400.000		PM	Seluruh provinsi
		4973.RBB.007	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	-	210.400	400.000	400.000	PM	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
SR	-			210.400	400.000	400.000	PM	Seluruh provinsi	Kemen PUPR		
4973.UBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	509	509	509	509	1.055.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR		

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6470 Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	6470.RBG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Unit	1	2	3	4	55.100,0	Kab. Kupang, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Lombok Utara, Kepulauan Sula, Sigi, Tojo Una-una, Kepulauan Mentawai, Puncak, Jayawijaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrauw, Pegunungan Arfak Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrauw,	Kemendes PDPT	
	6470.RBG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang Dibangun	Unit	1	2	2	2	30.000,0	Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Kep. Aru, Kab. Malaka, Kab. Supiori, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kemendes PDPT	
	6470.RBG.003	Prasarana Air Bersih di Pulau Kecil dan Terluar yang Dibangun	Unit	1	1	1	1	37.400,0	Kab. Nias Selatan (P. Simuk), Kab. Kep. Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi), Kab. Teluk Wondama	Kemendes PDPT	
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.PEF.003	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Sarana Air Minum	Orang	641	8.000	10.000	15.000	38.725,0	34 Provinsi	Kemendes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5834.UBA.003	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)	Kab/Kota	514	514	514	514	176.209,0	34 provinsi	Kemenkes
		5834.QEG.001	Reagensia dan Peralatan Surveilans Kualitas Air Minum	Unit	5.000	13.000	13.000	13.000	123.360,0	514 Kab/kota	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.RBB.001	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	KK	1.500	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	1	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	KK	149.324	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	7.909	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	KK	4.145	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	503	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.010	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	KK	20.300	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	10.920	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	KK	149.324	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	7.909	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.011	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	KK	51.300	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	51.500	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.014	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Komunal	KK	0	-	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
				KK	-	11.560	-	-	PM	PM	Kemen PUPR
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.PEF.001	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Orang	662	30.000	40.000	50.000	191.498,0	Pusat	Kemenkes
		5834.UBA.001	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kab/Kota	514	514	514	514	175.875,0	34 provinsi	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	75.814,0	Seluruh Provinsi	Kemen LHK
		6034.RAG.001	Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	Unit	10	10	21	21	124.591,0	DAS Citarum	Kemen LHK
		6034.RAG.002	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Unit	43	22	67	67	265.506,0	Seluruh Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku											
6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	5040.RBS.001	Emergency Reconstruction and Rehabilitation Assistance (for Palu) (ADB) untuk Air Baku yang direhabilitasi	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	278.460,00	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.002	Saluran Pembawa Air Baku Karian (KSCS) yang dibangun	Km	1,00	0,00	0,00	0,00	2.320,5	Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5040.RBS.003	Prasarana Air baku Bendungan Gondang yang dibangun	Km	11,00	0,00	0,00	0,00	243.884,6	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.004	Prasarana Air baku Tapin yang dibangun	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	139.230,0	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5040.RBS.005	Prasarana Air baku Bajulmati yang dibangun	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	184.890,5	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5040.RBS.006	Prasarana Air baku Waduk Jatigede yang dibangun	Km	0,10	0,00	0,00	0,00	99.781,5	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.RBS.007	Prasarana Air baku sistem Kesugihan yang dibangun	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	426.972,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.008	Prasarana Air baku KEK Kendal yang dibangun	Km	0,15	0,00	0,00	0,00	957.639,2	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.RBS.009	Prasarana Air baku sistem Gandus yang dibangun	Km	3,15	0,00	0,00	0,00	440.895,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5040.RBS.010	Prasarana Air baku Kota Pekalongan yang dibangun	Km	0,04	0,00	0,00	0,00	69.615,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5040.RBS.011	Prasarana Airbaku Long Storage Yeh Empas yang dibangun	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	194.178,6	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5040.RBS.012	Prasarana Air baku Aur Duri yang dibangun	Km	1,40	0,00	0,00	0,00	116.025,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5040.RBS.013	Prasarana Air Baku Jonggol dan Klapanunggal yang dibangun	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	392.799,9	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.RBS.014	Bendung Karet Tawang Sari yang direhabilitasi	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	167.076,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.RBS.015	Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	Km	31,50	0,00	0,00	0,00	580.125,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.RBS.016	Penyediaan air hortikultura Kab. Belu yang dibangun	Km	13,50	0,00	0,00	0,00	125.307,0	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5040.RBS.041	Penyediaan Air Baku Bendungan Penggauntuk KEK Mandalikadi Kab. Lombok Tengah yang dibangun	Km	5,00	0,00	0,00	0,00	163.595,3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.UBA.001	Fasilitasi Pemantauan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	33	40	60	60	29.540,0	15 DAS prioritas pemulihan	Kemen LHK
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6033.RAG.001	Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Unit	21	14	174	213	889.588,0	15 DAS Prioritas	Kemen LHK
		6033.QMA.002	Data dan Informasi Kualitas Air Manual	Layanan	591	652	591	591	45.500,0	Seluruh provinsi	Kemen LHK
5393	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	5393.DDA.001	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan	Produk	1	-	-	-	100,3	Pusat	Kemen LHK
		5393.PDF.001	Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	Lembaga	2	-	-	-	868,7	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.401	Cekungan Air Tanah yang Dipantau	CAT	6	4	13	16	30.380,2	Tersebar	Kemen ESDM
		6347.PBI.502	Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah	Rekomendasi	250	250	300	300	4.424,7	Provinsi DKI Jakarta	Kemen ESDM
		6347.ABI.401	Pemutakhiran Data Eksplorasi Air Tanah	Laporan	1	1	1	1	10.227,1	Pusat	Kemen ESDM
		6347.ABI.503	Pemutakhiran Data Konservasi Cekungan Air Tanah Jakarta	Laporan	1	(suspended) 0	1	1	1.302,3	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5040	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	5040.CBG.121	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang dibangun	Km	500,00	500,00	500,00	600,00	13.001.111,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBG.122	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang direhabilitasi	Km	40,00	45,00	50,00	40,00	1.643.256,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBS.001	Prasarana Air Baku di Kab. Indramayu yang dibangun	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	13.923,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.002	Penyediaan Air Baku Sistem Payaman Kab. Magelang yang dibangun	Km	0,20	0,00	0,00	0,00	23.205,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5040.CBS.006	Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Siborong-Borong yang dibangun	Km	6,00	0,00	0,00	0,00	32.487,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.CBS.007	Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tarutung, Kab. Tapanuli Utara yang dibangun	Km	11,00	0,00	0,00	0,00	245.973,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.CBS.008	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di IKK Siak Kab. Siak yang dibangun	Km	0,10	0,00	0,00	0,00	69.615,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5040.CBS.009	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di IKK Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dibangun	Km	5,96	0,00	0,00	0,00	116.025,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5040.CBS.010	Intake dan Jaringan transmisi Air Baku Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar yang dibangun	Km	3,00	0,00	0,00	0,00	116.025,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.011	Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Batang Karimo Kab. Sijunjung yang direhabilitasi	Km	2,00	0,00	0,00	0,00	59.404,8	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.012	Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sungai Lansek Kab. Dharmasraya yang dibangun	Km	2,50	0,00	0,00	0,00	37.128,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.013	Intake dan Pipa Transmisi Air Baku di Kab. Sarolangun yang dibangun	Km	4,62	0,00	0,00	0,00	139.230,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5040	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	5040.CBG.121	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang dibangun	Titik	450,00	450,00	550,00	550,00	2.988.404,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBG.122	Prasarana jaringan bidang air tanah dan air baku yang direhabilitasi	Titik	50,00	50,00	50,00	50,00	217.406,0	PM	Kemen PUPR
		5040.CBG.001	Prasarana Air Tanah untuk Air Baku di Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Selatan yang dibangun	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	7.193,6	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5040.CBG.002	Prasarana Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Bireuen dan Kab. Aceh Utara yang dibangun	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	6.033,3	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5040.CBG.003	Sumur Uji Produksi untuk Penanganan KHG di Provinsi Riau yang dibangun	Unit	30,00	30,00	30,00	30,00	13.923,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5040.CBG.004	Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Pada Daerah Kekeringan di Provinsi Sumatera Selatan yang dibangun	Unit	5,00	5,00	5,00	5,00	9.282,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5040.CBG.005	Penyediaan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Lampung Utara yang dibangun	Unit	8,00	8,00	8,00	8,00	18.564,0	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5040.CBG.006	Sumur Bor Air Tanah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Tengah yang direhabilitasi	Unit	26,00	1,00	1,00	1,00	9.282,0	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5040.CBG.007	Sumur Uji Produksi untuk Air Baku di Kec. Bandar Surabaya yang dibangun	Unit	1,00	1,00	1,00	1,00	18.564,0	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5040.CBG.008	Air Baku dari Air Tanah Pada Daerah Rawan Kering Di Provinsi Kalimantan Timur yang dibangun	Unit	3,00	1,00	1,00	1,00	27.846,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5040.CBG.009	Sumur dan jaringan air tanah untuk air baku di perluasan kawasan Food Estate di luar Eks-PLG Paket 2 yang dibangun	Unit	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
		5040.CBG.010	Sumur bor dan jaringan air tanah untuk air baku Kabupaten Kapuas yang dibangun	Unit	19,00	1,00	1,00	1,00	153.399,0	Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	5406.BDB.001	Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	1	1	21.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5406.QDB.001	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5406.UAB.001	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	Sistem Informasi	1	1	1	1	71.400,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
2419	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	2419.ABF.006	Pola pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direviu	Rekomendasi Kebijakan	12	12	12	12	4.019.708,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.007	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direviu	Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	10.712.850,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.001	Rekomendasi kebijakan pembinaan perencanaan jangka panjang bidang SDA yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1.600,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.002	Rekomendasi kebijakan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran bidang SDA yang disusun	Dokumen	14	14	14	14	81.151,9	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.003	Rekomendasi kebijakan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran bidang SDA yang disusun	Dokumen	14	14	14	14	32.216,4	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.004	Rekomendasi kebijakan pembinaan evaluasi dan pengadaan tanah bidang SDA yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	18.904,8	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.005	Rekomendasi kebijakan pembinaan kerja sama bidang SDA yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3.595,0	Pusat	Kemen PUPR
		2419.ABF.006	Rekomendasi kebijakan rencana, program, kerja sama, dan evaluasi program UPT Ditjen SDA yang disusun	Dokumen	57	57	57	57	150.951,2	Pusat	Kemen PUPR
4537	Layanan Teknis SDA	4537.ABF.001	Rekomendasi kebijakan pembinaan layanan teknis bidang SDA yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	9	9	9	9	9.841.300,0	Pusat	Kemen PUPR
		4537.BMA.001	SISDA yang dikelola	Layanan	45	45	45	45	38.675.767,0	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4537.BMA.002	Informasi hidrologi dan kualitas air yang dikelola	Layanan	36	36	36	36	83.034.020,0	Pusat	Kemen PUPR
		4537.BMA.003	EWS yang dikelola	Layanan	2	2	2	2	185.000,0	Pusat	Kemen PUPR
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
1244	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	1244.AEC.002	Desa yang telah bekerjasama antar desa dalam pengelolaan air minum dan sanitasi	Kesepakatan	32	50	-	-	49.295,4	Pusat	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs:											
6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional											
6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	220.000	220.000	220.000	14.653.035,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	2.500	3.000	3.000	3.000	312.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	54.900,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBH.001	Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	Unit	2	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.002	Bendung gerak Kanal Banjir Barat Kota Semarang yang dibangun	Unit	0,0001	PM	PM	PM	14.900.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.003	Checkdam Citarum Hulu yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.004	Check dam Hulu Sungai Wanggu yang dibangun	Unit	6	PM	PM	PM	45.000.000,00	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5037.RBH.005	Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	138.660.103,00	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.006	Pengendalian sedimen Batang Kuranji yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	45.606.098,00	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.008	Pengendalian sedimen DAS Bone Gorontalo yang dibangun	Unit	5	PM	PM	PM	59.500.000,00	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.009	Pengendalian sedimen DAS Milangodaa yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	97.960.000,00	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.010	Pintu air Demangan yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	63.378.900,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBH.011	Pompa Ancol Sentiong yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	201.635.361,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBH.012	FMSRB Sungai Way Batu Merah yang dibangun	Unit	4	PM	PM	PM	33.648.799,0	Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5037.RBH.013	Infrastructure Reconstruction Sector Loan Central Sulawesi yang dilaksanakan	Unit	0,0001	PM	PM	PM	39.493.718,0	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBH.014	Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun	Unit	1	PM	PM	PM	23.500.000,0	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.001	Drainase KI Batang yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	60.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.002	Drainase KI Subang yang dibangun	Km	10	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.003	Oxbow DAS Citarum yang ditangani	Km	1	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.006	Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun	Km	1	0	0	0	139.230,00	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.007	Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun	Km	3,47	0	0	0	717.777,10	Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5037.RBS.008	Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	464.100,00	Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.009	Pengamanan Pantai Limbangan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	162.435,00	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.010	Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	120.016,30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.011	Pengamanan Pantai pulau terluar di Provinsi Riau yang dibangun	Km	3,15	0	0	0	362.445,00	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.012	Pengamanan Pantai Ruas Gerokgak - Kalisada yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	148.950,00	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.013	Pengamanan Pantai Ruas Lembeng - Purnama yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	232.050,00	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.014	Pengamanan Pantai Sekotong yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	162.435,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.015	Pengamanan Pantai Shopialousia/Sepatang yang dibangun	Km	0,65	0	0	0	139.230,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.019	Pengendalian banjir Tukad Unda yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	147.611.961,0	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.020	Pengendalian banjir Air Selagan yang dibangun	Km	1,68	PM	PM	PM	44.500.000,0	Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
		5037.RBS.021	Pengendalian banjir Avfour Buntung yang dibangun	Km	0,184	PM	PM	PM	9.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.022	FMSRB Sungai Ciujung yang dibangun	Km	8	PM	PM	PM	84.000.000,0	Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5037.RBS.023	Pengendalian banjir avfour Watudakon yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	52.700.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.024	Pengendalian banjir Batang agam yang dibangun	Km	0,6	PM	PM	PM	19.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.025	Pengendalian banjir Batang Lembang yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	15.500.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.026	Pengendalian banjir Batang Siat yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.027	Pengendalian banjir Batang Suliti yang dibangun	Km	0,75	PM	PM	PM	25.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.028	Pengendalian banjir Batang Tambuo yang dibangun	Km	0,6	PM	PM	PM	19.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.029	Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	145.042.293,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.030	Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	Km	1185	PM	PM	PM	81.004.185,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.031	Pengendalian banjir DAS Bolango Hulu yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.032	Pengendalian banjir DAS Konawe yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.033	Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	Km	3,5	PM	PM	PM	134.251.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.034	Pengendalian banjir DAS Taludaa yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	8.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.035	Pengendalian banjir di Tandun yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.036	Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	Km	3	PM	PM	PM	332.048.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.037	Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	70.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.038	Pengendalian banjir Kali Bogel yang dibangun	Km	3,63	PM	PM	PM	48.834.988,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.039	Pengendalian banjir Kali Gunting yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	8.950.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.040	Pengendalian banjir Kali Jeroan yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	84.500.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.041	Pengendalian banjir Kali Kemuning yang dibangun	Km	3	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.042	Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	100.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.043	Pengendalian banjir Kali Welang yang dibangun	Km	0,9	PM	PM	PM	34.339.662,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.044	Pengendalian banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang yang dibangun	Km	2,2	PM	PM	PM	59.018.187,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.045	Pengendalian banjir Kota Makassar yang direvitalisasi	Km	0,6	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.046	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Km	1,7	PM	PM	PM	18.850.000,0	Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.047	Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	332.863.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.048	Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	17.500.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.049	Pengendalian banjir pertemuan Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.050	Pengendalian banjir Pertemuan tiga Sungai di kab. Ponorogo yang dibangun	Km	0,8	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.051	Pengendalian banjir Ring Ngotok Kanal yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.052	Pengendalian banjir rob Semarang -Demak yang dibangun	Km	5,3	PM	PM	PM	600.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.053	Pengendalian banjir segmen Griya Mukti yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	7.500.000,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.054	Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	Km	2,1	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.055	Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	Km	0,55	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.056	Pengendalian banjir Sungai Ampal yang dibangun	Km	0,35	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.057	Pengendalian banjir Sungai Andegile yang dibangun	Km	0,8	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.058	Pengendalian banjir Sungai Babakan yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	7.500.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.059	Pengendalian banjir Sungai Babura yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.060	Pengendalian banjir Sungai Batanghari Hilir yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.061	Pengendalian banjir Sungai Belawan yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.062	Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungaiinya yang dibangun	Km	2,5	PM	PM	PM	159.326.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.063	Pengendalian banjir Sungai Bolango Hilir yang dibangun	Km	1,2	PM	PM	PM	45.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.064	Pengendalian banjir Sungai bolango yang dibangun	Km	2,5	PM	PM	PM	41.692.820,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bone yang dibangun	Km	0,72	PM	PM	PM	83.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.066	Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	18.450.000,0	Provinsi Papua	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024			
5037.RBS.067	Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	Km	3,84	PM	PM	PM	114.400.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cibeet yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.069	Pengendalian banjir Sungai Ciberang yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5037.RBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun	Km	2	PM	PM	PM	73.500.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cilemah Abang yang dibangun	Km	0,8	PM	PM	PM	25.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.072	Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
5037.RBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cimanuk yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.074	Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	10.500.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.075	Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Banten	Kemen PUPR
5037.RBS.076	Pengendalian banjir Sungai Cisanggarung yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	7.000.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.077	Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	Km	0,35	PM	PM	PM	13.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.078	Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	Km	0,27	PM	PM	PM	4.400.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.079	Pengendalian banjir Sungai	Km	1,4	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.080	Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.081	Pengendalian banjir Sungai Deli yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.082	Pengendalian banjir Sungai Desa Embacang Gedang yang dibangun	Km	0,25	PM	PM	PM	34.900.000,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
5037.RBS.083	Pengendalian banjir Sungai Gelis yang dibangun	Km	4,25	PM	PM	PM	84.230.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.084	Pengendalian banjir Sungai Jajar yang dibangun	Km	4,08	PM	PM	PM	82.810.000,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5037.RBS.085	Pengendalian banjir Sungai Jeneponto yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	13.100.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.086	Pengendalian banjir Sungai Juana yang dibangun	Km	3825	PM	PM	PM	82.687.500,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.087	Pengendalian banjir Sungai Kapuas yang dibangun	Km	0,3	PM	PM	PM	37.600.000,0	Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.088	Pengendalian banjir Sungai Karang Mumus yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.089	Pengendalian banjir Sungai Kec. Ponoosian Timur yang dibangun	Km	0,75	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.090	Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Km	0,45	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.093	Pengendalian banjir Sungai Krueng Singkil yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	30.100.000,0	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.094	Pengendalian banjir Sungai Lamasi yang dibangun	Km	2,1	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.095	Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	Km	0,2	PM	PM	PM	52.000.000,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.096	Pengendalian banjir Sungai Malibaka yang dibangun	Km	3	PM	PM	PM	75.000.000,0	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.097	Pengendalian banjir Sungai Masamba yang dibangun	Km	2,1	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.098	Pengendalian banjir Sungai Musi yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	72.000.000,0	Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.099	Pengendalian banjir Sungai Ongkak Dumoga yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	41.500.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.100	Pengendalian banjir Sungai Opak yang dibangun	Km	1,6	PM	PM	PM	26.000.000,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.101	Pengendalian banjir Sungai Paguyaman yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.102	Pengendalian banjir Sungai Peliang yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	17.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.103	Pengendalian banjir Sungai Percut yang dibangun	Km	0,15	PM	PM	PM	4.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.104	Pengendalian banjir Sungai Putih yang dibangun	Km	0,12	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.105	Pengendalian banjir Sungai Radda yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	20.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.106	Pengendalian banjir Sungai Randangan yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.107	Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Km	1398	PM	PM	PM	105.000.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.108	Pengendalian banjir Sungai Rongkong yang dibangun	Km	1,2	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.109	Pengendalian banjir Sungai Sadar yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.110	Pengendalian banjir Sungai Sario yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	7.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.111	Pengendalian banjir Sungai Sikambing yang dibangun	Km	0,17	PM	PM	PM	6.000.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.112	Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	50.000.000,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.113	Pengendalian banjir Sungai Tamalate yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	17.500.000,0	Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.114	Pengendalian banjir Sungai Tondano yang dibangun	Km	0,34	PM	PM	PM	19.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.115	Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Km	0,18	PM	PM	PM	10.000.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.116	Pengendalian banjir Sungai Tuntang yang dibangun	Km	4,25	PM	PM	PM	103.783.315,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.117	Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	Km	1,5	PM	PM	PM	40.000.000,0	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.118	Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Km	0,4	PM	PM	PM	19.950.000,0	Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.119	Pengendalian banjir SWD 1 dan 2 yang dibangun	Km	4,76	PM	PM	PM	130.232.050,0	Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.120	Pengendalian banjir Tukad Badung yang dibangun	Km	0,04	PM	PM	PM	5.000.000,0	Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.121	Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	Km	10	PM	PM	PM	34.904.368,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.122	Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	Km	2	PM	PM	PM	15.000.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.123	Pengendalian banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,27	PM	PM	PM	5.300.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.124	Pengendalian banjir Sungai Lawe Alas yang dibangun	Km	0,5	PM	PM	PM	30.000.000,0	Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5037.RBS.125	Sudetan Ciliwung KBT yang dibangun	Km	1	PM	PM	PM	150.000.000,0	Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBS.126	Sudetan Floodway Sedayu lawas yang ditingkatkan	Km	0,5	PM	PM	PM	59.561.500,0	Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.127	UFC kotaBimayangdibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.128	UFC Kota Jambiyangdibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5037.RBS.129	UFC Kota Padang yang dibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.130	UFC Kota Pekanbaru yang dibangun	Km	0,0001	PM	PM	PM	3.500.000,0	Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.131	Pengendalian banjir Batang Sumpur yang dibangun	Km	0,85	PM	PM	PM	18.500.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
7.1.1* Rasio elektrifikasi											
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.QEG.002	Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)	Unit	12.586	11.347	-	-	104.772,9	Papua dan Papua Barat	Kemen ESDM
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBI.008	Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Rekomendasi	1	1	1	1	6.182,5	Pusat	Kemen ESDM
		6350.PBI.007	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Rekomendasi	1	1	1	1	20.439,1	Pusat	Kemen ESDM
		6350.PBI.005	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Rekomendasi	1	1	1	1	23.021,2	Pusat	Kemen ESDM
		6350.PBI.006	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Rekomendasi	1	1	1	1	21.150,8	Pusat	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6350.PBI.010	Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik (IPL) pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	IPL/ Rekomendasi Kebijakan	390 (IPL)	1 (Rekomendasi Kebijakan)	1 (Rekomendasi Kebijakan)	1 (Rekomendasi Kebijakan)	25.164,3	Pusat	Kemen ESDM
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.FBA.003	Fasilitasi Pencapaian Target Rencana Umum Energi Daerah RUED-P	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16	7	30	34	3.581,2	Pusat	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.UBB.002	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Desa	74.953	74.961	74.961	74.961	42,3	Pusat	Kemendes PDTT
120.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	4830.ABI.003	Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Keandalan Pasokan Listrik	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	2.520,4	Pusat	Kemenko Marves
INDIKATOR TPB/SDGs:											
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga											
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6349	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	6349.QEG.003	Infrastruktur Jaringan gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	120.776	40.000	-	-	6.872.182,4	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Indramayu, Kota Semarang, Kota Probolinggo, Kab. Gresik, Kab. Wajo, Kab. Lumajang	Kemen ESDM
120.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	4830.ABI.001	Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	2.055,1	Pusat	Kemenko Marves

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs:										
7.2.1* Bauran energi terbarukan										
7.b.1* Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)										
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan										
6353 Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.BEG.001	PLT EBT (Revitalisasi)	Unit	5	11	0	0	304.165,0	Kab. Nias Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tanggamus, Kab. Kotabaru, Kab. Kolaka Timur, Kab. Manokwari, Kab. Lanny Jaya	Kemen ESDM
	6353.BEG.002	PLTS Penunjang Tugas Teknis K/L	Unit	25	0	0	0	120,0	DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua	Kemen ESDM
	6353.QEG.001	PLTS Rooftop	MWp/Unit	35,88	2,3/79 Unit	10/300 Unit	10/300 Unit	1.165.877,8	34 Provinsi	Kemen ESDM
6352 Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PBI.004	Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	5	0	0	0	72.810,0	Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kab. Lebak, Kab. Lombok Timur, Kab. Ngada, Kab. Donggala, Kab. Tana Toraja, Kab. Halmahera Barat	Kemen ESDM
	6352.QIA.003	Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	Persen	35	35	33	35	4.050,0	Pusat	Kemen ESDM
	6352.QIA.002	Monitoring TKDN bidang Aneka EBT	Persen	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	2.583,6	Pusat	Kemen ESDM
	6352.QIA.001	Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	Persen	40	40	40	40	2.140,0	Pusat	Kemen ESDM
	6352.PBI.001	Volume Biofuel untuk Domestik	Juta KL	9,2	9,6	10,4	14,2	15.918,5	Tersebar	Kemen ESDM
	6352.ABI.002	Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi	MW	12,0	30,3	159	252,6	4.553,4	Tersebar	Kemen ESDM
	6352.ABI.001	Pengembangan Biomassa dan Biogas	Pemanfaatan Biogas (Ribu M3/Tahun)	28.342	29.314	33.770	35.390	6.317,8	Tersebar	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6045	Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro	6045.ABI.001	Business Plan Industri IVO/ILO (<i>Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil</i>) sebagai bahan baku Industri <i>Greenfuel/ B100</i>	Industri	1	1	1	1	3.346,9	Pusat	Kemenperin
		6045.ABI.002	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) dan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> yang disusun untuk pembangunan <i>Pilot Plant</i> Industri IVO/ILO (<i>Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil</i>) sebagai bahan baku Industri <i>Greenfuel/ B100</i>	Industri	2	2	2	2	9.204,0	Pusat	Kemenperin
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5398.QAC.001	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha	10	20	20	20	3.744,0	Pusat	Kemen LHK
		5398.BIH.001	Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha	10	20	20	20	46.344,0	Pusat	Kemen LHK
5435	Perencanaan Kawasan Hutan	5435.BAH.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan	100	300	300	300	4.762,0	Pusat	Kemen LHK
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Layanan	-	151	151	151	2.100,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/Kab/Kota)	50	50	50	50	30.300,0	Pusat	Kemen LHK
5454	Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5454.ACD.001	Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Institusi	400	500	500	500	59.508,5	Pusat	Kemen LHK
		5454.BDI.001	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	Industri	4.000	4.000	4.000	4.000	28.449,3	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
5477	Mitigasi Perubahan Iklim	5447.QDB.001	Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	Layanan	1	1	1	1	10.620,6	Pusat	Kemen LHK
5448	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	5448.BMA.001	Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	Layanan	1	1	1	1	15.556,5	Pusat	Kemen LHK
120.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	4830.ABI.002	Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional 2025	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	2.798,5	Pusat	Kemenko Marves
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4763.PBA.002	Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan melalui Kebijakan Fiskal yang Efektif	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	700.000,0	Pusat	Kemenkeu
015. CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko											
6218	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	6218.FAE.628	Rekomendasi Penerapan Skema Baru Fasilitas Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP)	Laporan	3	-	-	-	462,2	Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 7.3.1* Intensitas energi primer											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	Peralatan/ Produk	2	1	-	-	1.927,9	Pusat	Kemen ESDM
		6352.AEF.001	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Orang	300	300	400	400	3.244,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.BIC.001	Manajemen Energi Lembaga	Lembaga	1	1	1	1	PM	Pusat	Kemen ESDM
		6352.PBI.002	Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/Miliar Rupiah	0,9	0,9	0,8	0,8	67.162,0	Pusat	Kemen ESDM
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.BEG.003	Penerangan Jalam Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Unit	22.000	22.000	20.000	20.000	1.808.108,5	Tersebar	Kemen ESDM
		6353.QEG.001	PLTS Atap	MWp/Unit	35,88	2,3/79 Unit	10/300 Unit	10/300 Unit	1.165.877,8	34 Provinsi	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4763.PBA.001	Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik Berdaya Saing	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	850.500,0	Pusat	Kemenkeu
TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita											
8.1.1.(a) PDB per kapita											
035.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	2519.ABK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	5.355,8	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2519.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.530,1	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2519.PBK.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	7.930,8	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2519.PBK.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.994,7	Pusat	Kemenko Perekonomian
2521	Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional	2521.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.278,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2521.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.785,1	Pusat	Kemenko Perekonomian
		2521.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	2.311,1	Pusat	Kemenko Perekonomian
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6056.BDI.001	Pendampingan dan Fasilitasi Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	8.367,3	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6058.BDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Industri	35	35	35	35	41.836,3	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri	20	20	20	20	5.229,5	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	Industri	100	100	100	100	31.377,2	Pusat	Kemenperin
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro	6044.BDI.001	Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	Industri	2	2	2	2	12.550,9	Pusat	Kemenperin
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro	6049.BDI.001	Industri yang diberikan Fasilitas Peningkatan Ekspor	Industri	1	1	1	1	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro	6051.BDI.001	Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4.0	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6051.BDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6068.BDI.001	Industri yang terfasilitasi melalui Export Coaching Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6070.BDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6070.BDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan <i>Center of Excellence</i>	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.011	IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	163	163	163	163	35.665,4	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.013	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	62	62	62	62	15.897,8	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.016	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	205	205	205	205	47.111,0	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.018	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	95	95	95	95	23.675,1	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.022	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	160	160	160	160	61.917,7	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.024	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	54	54	54	54	4.183,6	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6074	Pengembangan Perwilayahan Industri	6074.BDH.001	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	Badan Usaha	5	9	9	9	22.918,1	Pusat	Kemenperin
		6074.BDH.002	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Badan Usaha	8	18	18	18	10.459,1	Pusat	Kemenperin
040.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
5349	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	5349.PDI.001	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Bali	Orang	700	700	700	700	5.577,3	Bali	Kemenparekraf
		5349.PDI.002	Sertifikasi Profesi dan SDM Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Orang	800	800	800	800	9.204,0	Jawa Barat	Kemenparekraf
		5349.PDI.003	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar	Orang	2.850	2.850	2.850	2.850	3.984,9	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
		5349.PDI.004	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Medan	Orang	500	1.200	1.200	1.200	13.055,0	Sumatera Utara	Kemenparekraf
		5349.PDI.005	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Palembang	Orang	289	289	289	289	7.895,3	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
		5349.PDI.006	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Lombok	Orang	500	600	650	700	1.882,6	NTB	Kemenparekraf
		5349.PEC.001	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Bali	Kesepakatan	8	8	8	8	3.364,9	Bali	Kemenparekraf
		5349.PEC.002	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Kesepakatan	20	20	20	20	2.091,8	Jawa Barat	Kemenparekraf
		5349.PEC.003	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Makassar	Kesepakatan	20	20	20	20	2.958,7	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
		5349.PEC.004	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Medan	Kesepakatan	10	10	10	10	9.025,3	Sumatera Utara	Kemenparekraf
		5349.PEC.006	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Lombok	Kesepakatan	19	15	20	25	4.288,6	NTB	Kemenparekraf
		5349.RAA.001	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Bali	Paket	1	1	1	1	161.030,7	Bali	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5349.RAA.002	Sarana Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Priwisata Bandung	Paket	7	19	15	10	36.388,4	Jawa Barat	Kemenparekraf
	5349.RAA.003	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Makassar	Paket	504	504	504	504	12.550,9	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
	5349.RAA.004	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Medan	Paket	50	50	50	50	47.510,1	Sumatera Utara	Kemenparekraf
	5349.RAA.005	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Palembang	Paket	1	1	1	1	117.231,1	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
	5349.RAA.006	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Lombok	Paket	6	4	3	1	30.958,8	NTB	Kemenparekraf
	5349.RJB.001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Bali	Unit	1	1	1	1	20.918,1	Bali	Kemenparekraf
	5349.RJB.003	Prasarana Bidang Pendidikan Poltekpar Makassar	Unit	2	2	2	2	158.977,8	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
	5349.RJB.004	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Medan	Unit	2	2	2	2	255.702,0	Sumatera Utara	Kemenparekraf
	5349.RJB.005	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Palembang	Unit	2	2	2	2	209.181,4	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
	5349.RJB.006	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Lombok	Unit	2	1	1	1	302.681,6	NTB	Kemenparekraf
	5349.SAD.001	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Bali	Orang	2.500	2.500	2.500	2.500	122.309,2	Bali	Kemenparekraf
	5349.SAD.002	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Priwisata Bandung	Orang	2.350	2.500	2.550	2.550	149.939,1	Jawa Barat	Kemenparekraf
	5349.SAD.003	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Makassar	Orang	2.027	2.050	2.100	2.150	113.306,8	Sulawesi Selatan	Kemenparekraf
	5349.SAD.004	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Medan	Orang	1.400	1.400	1.400	1.400	86.605,3	Sumatera Utara	Kemenparekraf
	5349.SAD.005	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Palembang	Orang	1.200	0	0	0	89,1	Sumatera Selatan	Kemenparekraf
	5349.SAD.006	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Lombok	Orang	1.400	1.520	1.640	1.760	56.829,6	NTB	Kemenparekraf
	5349.SDC.001	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Bali	Orang	1.100	100	100	100	19.643,8	Bali	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5349.SDC.002	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Orang	550	5.000	5.000	5.000	14.642,7	Jawa Barat	Kememparekraf
		5349.SDC.003	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Makassar	Orang	310	310	310	310	3.439,4	Sulawesi Selatan	Kememparekraf
		5349.SDC.004	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Medan	Orang	600	48	51	54	3.437,7	Sumatera Utara	Kememparekraf
		5349.SDC.005	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Palembang	Orang	400	400	400	400	3.702,1	Sumatera Selatan	Kememparekraf
		5349.SDC.006	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Lombok	Orang	300	400	500	600	6.275,4	NTB	Kememparekraf
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun											
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4442	Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian	4442.QDF.001	Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi	Koperasi	225	325	425	525	35.000,0	Pusat	Kemen KUKM
		4442.QDF.002	Koperasi yang difasilitasi melakukan kemitraan	Koperasi	150	250	350	450	20.000,0	Pusat	Kemen KUKM
		4442.QDF.003	Koperasi yang dikembangkan Jaringan Usahanya	Koperasi	230	300	400	500	49.230,0	Pusat	Kemen KUKM
5615	Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional	5615.QDD.001	Kelompok Masyarakat untuk Membentuk Koperasi	Kelompok Masyarakat	100	200	300	400	21.010,0	Pusat	Kemen KUKM
		5615.SCF.001	Pengurus atau Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan	Orang	2.300	3.000	4.000	5.000	150.620,0	Pusat	Kemen KUKM
		5615.SCF.002	Pelatihan bagi Pelaku Koperasi di Daerah	Orang	1.250	2.500	3.500	4.500	31.760,0	Pusat	Kemen KUKM
2739	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	2739.QDG.001	Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan klaster/Komoditas	Umi	362	450	550	650	69.460,0	Pusat	Kemen KUKM
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	4445.QDG.001	Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	Umi	3.250	4.000	6.000	8.000	158.840,0	Pusat	Kemen KUKM

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
4450	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM	4450.QDG.001	UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok	UKM	150	200	250	300	24.010,0	Pusat	Kemen KUKM
		4450.QDG.002	UKM/Sentra Yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	UKM	300	350	400	450	81.640,0	Pusat	Kemen KUKM
		4450.QDJ.001	Start-Up yang diperluas rantai pasok	Start-Up	100	250	350	450	50.180,0	Pusat	Kemen KUKM
2751	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM	2751.QDG.001	Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	UKM	180	300	400	500	6.190,0	Pusat	Kemen KUKM
		2751.QDJ.001	Kemitraan Usaha Start-Up yang diperluas dan dibentuk	Start-Up	50	150	250	350	4.810,0	Pusat	Kemen KUKM
2764	Pengembangan SDM UKM	2764.DCF.001	UKM/Start-Up yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	Orang	2.100	3.500	4.500	6.000	95.130,0	Pusat	Kemen KUKM
		2764.DBE.001	UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi	Orang	400	800	1.200	1.600	13.000,0	Pusat	Kemen KUKM
2757	Konsultasi Bisnis dan Pendampingan	2757.QDC.001	Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitas konsultasi bisnis	Orang	7.000	8.000	9.000	10.000	68.790,0	Pusat	Kemen KUKM
		2757.QDC.002	Jumlah Peserta yang didampingi Usahanya	Orang	5.000	6.000	7.000	8.000	183.200,0	Pusat	Kemen KUKM
019.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4957	Pelatihan Vokasi Industri	4957.ADI.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	36.147,7	Pusat	Kemenperin
		4957.DCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	Orang	86.500	86.500	86.500	86.500	2.559.106,6	Pusat	Kemenperin
4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	4958.DAG.001	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Orang	11.405	11.405	11.405	11.405	476.169,1	Pusat	Kemenperin
		4958.DAG.002	Mahasiswa dan Lulusan Program DI dan DII Berbasis Kompetensi	Orang	1.800	1.800	1.800	1.800	92.856,2	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	4959.DAG.001	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	Orang	6.763	6.763	6.763	6.763	205.345,1	Pusat	Kemenperin
032.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	2376.SAC.001	Peserta pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	Orang	8.308	10.633	12.286	13.115	1.155.800,0	19 UPT	KKP
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2375.SCC.001	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Orang	29.000	27.000	28.000	30.000	289.000,0	34 Provinsi	KKP
026.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4060	Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas	4060.SCH.001	PBK UPTP	Orang	20.585	-	-	-	208.029,5	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.002	Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga (PFLK)	Orang	655	-	-	-	3.318,8	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.003	PBK di BLK Komunitas	Orang	43.552	-	-	-	142.197,6	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.004	PBK Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Orang	129	-	-	-	1.401,6	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.006	PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri	Orang	1.649	-	-	-	10.067,8	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.008	PBK Provinsi Jawa Barat	Orang	5.776	-	-	-	32.085,1	Provinsi Jawa Barat	Kemenaker
		4060.SCH.009	PBK Provinsi Jawa Tengah	Orang	7.568	-	-	-	38.927,6	Provinsi Jawa Tengah	Kemenaker
		4060.SCH.010	PBK Provinsi D.I Yogyakarta	Orang	1.824	-	-	-	9.946,5	Provinsi DI Yogyakarta	Kemenaker
		4060.SCH.011	PBK Provinsi Jawa Timur	Orang	8.400	-	-	-	45.040,5	Provinsi Jawa Timur	Kemenaker
		4060.SCH.012	PBK Provinsi Aceh	Orang	1.520	-	-	-	8.079,1	Provinsi Aceh	Kemenaker
		4060.SCH.013	PBK Provinsi Sumatera Utara	Orang	2.480	-	-	-	8.237,8	Provinsi Sumatera Utara	Kemenaker
		4060.SCH.014	PBK Provinsi Sumatera Barat	Orang	2.480	-	-	-	11.939,7	Provinsi Sumatera Barat	Kemenaker
		4060.SCH.015	PBK Provinsi Riau	Orang	752	-	-	-	4.154,2	Provinsi Riau	Kemenaker
		4060.SCH.016	PBK Provinsi Jambi	Orang	1.072	-	-	-	5.791,8	Provinsi Jambi	Kemenaker
		4060.SCH.017	PBK Provinsi Sumatera Selatan	Orang	1.536	-	-	-	6.708,6	Provinsi Sumatera Selatan	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4060.SCH.018	PBK Provinsi Lampung	Orang	672	-	-	-	2.979,0	Provinsi Lampung	Kemenaker
		4060.SCH.019	PBK Provinsi Kalimantan Barat	Orang	800	-	-	-	3.610,1	Provinsi Kalimantan Barat	Kemenaker
		4060.SCH.020	PBK Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	944	-	-	-	5.925,0	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemenaker
		4060.SCH.021	PBK Provinsi Kalimantan Selatan	Orang	1.920	-	-	-	13.011,8	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemenaker
		4060.SCH.022	PBK Provinsi Kalimantan Timur	Orang	688	-	-	-	4.642,9	Provinsi Kalimantan Timur	Kemenaker
		4060.SCH.023	PBK Provinsi Sulawesi Utara	Orang	640	-	-	-	4.681,1	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenaker
		4060.SCH.024	PBK Provinsi Sulawesi Tengah	Orang	848	-	-	-	5.600,7	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemenaker
		4060.SCH.025	PBK Provinsi Sulawesi Selatan	Orang	2.320	-	-	-	14.098,3	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemenaker
		4060.SCH.026	PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang	736	-	-	-	3.946,1	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemenaker
		4060.SCH.027	PBK Provinsi Maluku	Orang	288	-	-	-	1.734,9	Provinsi Maluku	Kemenaker
		4060.SCH.028	PBK Provinsi Bali	Orang	1.520	-	-	-	8.394,8	Pusat	Kemenaker
		4060.SCH.029	PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang	1.904	-	-	-	11.149,9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemenaker
		4060.SCH.030	PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang	726	-	-	-	4.198,8	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenaker
		4060.SCH.031	PBK Provinsi Papua	Orang	1.232	-	-	-	7.440,9	Provinsi Papua	Kemenaker
		4060.SCH.032	PBK Provinsi Bengkulu	Orang	1.744	-	-	-	10.183,6	Provinsi Bengkulu	Kemenaker
		4060.SCH.033	PBK Provinsi Banten	Orang	352	-	-	-	1.644,9	Provinsi Banten	Kemenaker
		4060.SCH.034	PBK Provinsi Bangka Belitung	Orang	432	-	-	-	2.328,8	Kota Pangkal Pinang	Kemenaker
		4060.SCH.035	PBK Provinsi Gorontalo	Orang	608	-	-	-	3.539,9	Kota Gorontalo	Kemenaker
		4060.SCH.036	PBK Provinsi Kepulauan Riau	Orang	256	-	-	-	1.660,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemenaker
		4060.SCH.037	PBK Provinsi Sulawesi Barat	Orang	224	-	-	-	1.612,2	Provinsi Sulawesi Barat	Kemenaker
		4060.SCH.038	PBK Provinsi Kalimantan Utara	Orang	576	-	-	-	3.954,3	Provinsi Kalimantan Utara	Kemenaker
		4060.SCH.039	PBK Provinsi Maluku Utara	Orang	80	-	-	-	604,9	Provinsi Maluku Utara	Kemenaker
		4060.SCH.040	PBK Provinsi Papua Barat	Orang	240	-	-	-	1.536,2	Provinsi Papua Barat	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	4057.SCH.003	PBK UPTP	Orang	-	26.192	26.192	26.192	298.342,0	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.004	PBK di BLK Komunitas	Orang	-	98.064	98.064	98.064	992.898,0	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.005	PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri	Orang	-	4.800	4.800	4.800	78.663,4	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.006	PBK Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Orang	-	3.008	3.008	3.008	54.730,6	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.008	PBK Provinsi Jawa Barat	Orang	-	6.880	6.880	6.880	140.736,9	Provinsi Jawa Barat	Kemenaker
		4057.SCH.009	PBK Provinsi Jawa Tengah	Orang	-	8.352	8.352	8.352	209.949,9	Provinsi Jawa Tengah	Kemenaker
		4057.SCH.010	PBK Provinsi D.I Yogyakarta	Orang	-	2.032	2.032	2.032	32.558,7	Provinsi DI Yogyakarta	Kemenaker
		4057.SCH.011	PBK Provinsi Jawa Timur	Orang	-	9.792	9.792	9.792	157.604,9	Provinsi Jawa Timur	Kemenaker
		4057.SCH.012	PBK Provinsi Aceh	Orang	-	1.520	1.520	1.520	28.061,3	Provinsi Aceh	Kemenaker
		4057.SCH.013	PBK Provinsi Sumatera Utara	Orang	-	1.600	1.600	1.600	30.649,8	Provinsi Sumatera Utara	Kemenaker
		4057.SCH.014	PBK Provinsi Sumatera Barat	Orang	-	2.432	2.432	2.432	41.758,7	Provinsi Sumatera Barat	Kemenaker
		4057.SCH.015	PBK Provinsi Riau	Orang	-	816	816	816	14.307,4	Provinsi Riau	Kemenaker
		4057.SCH.016	PBK Provinsi Jambi	Orang	-	1.072	1.072	1.072	20.581,2	Provinsi Jambi	Kemenaker
		4057.SCH.017	PBK Provinsi Sumatera Selatan	Orang	-	1.712	1.712	1.712	23.302,6	Provinsi Sumatera Selatan	Kemenaker
		4057.SCH.018	PBK Provinsi Lampung	Orang	-	672	672	672	9.177,2	Provinsi Lampung	Kemenaker
		4057.SCH.019	PBK Provinsi Kalimantan Barat	Orang	-	800	800	800	11.304,7	Provinsi Kalimantan Barat	Kemenaker
		4057.SCH.020	PBK Provinsi Kalimantan Tengah	Orang	-	816	816	816	16.347,4	Provinsi Kalimantan Tengah	Kemenaker
		4057.SCH.021	PBK Provinsi Kalimantan Selatan	Orang	-	2.048	2.080	2.080	45.493,6	Provinsi Kalimantan Selatan	Kemenaker
		4057.SCH.022	PBK Provinsi Kalimantan Timur	Orang	-	608	608	608	12.595,7	Provinsi Kalimantan Timur	Kemenaker
		4057.SCH.023	PBK Provinsi Sulawesi Utara	Orang	-	1.024	1.024	1.024	37.935,5	Provinsi Sulawesi Utara	Kemenaker

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4057.SCH.024	PBK Provinsi Sulawesi Tengah	Orang	-	640	640	640	14.210,1	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemenaker
		4057.SCH.025	PBK Provinsi Sulawesi Selatan	Orang	-	2.048	2.048	2.048	38.516,8	Provinsi Sulawesi Selatan	Kemenaker
		4057.SCH.026	PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang	-	816	816	816	13.697,8	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemenaker
		4057.SCH.027	PBK Provinsi Maluku	Orang	-	240	240	240	4.407,8	Provinsi Maluku	Kemenaker
		4057.SCH.028	PBK Provinsi Bali	Orang	-	1.376	1.376	1.376	23.372,1	Pusat	Kemenaker
		4057.SCH.029	PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang	-	1.760	1.760	1.760	31.374,9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemenaker
		4057.SCH.030	PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang	-	768	768	768	12.804,5	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemenaker
		4057.SCH.031	PBK Provinsi Papua	Orang	-	1.232	1.232	1.232	22.814,6	Provinsi Papua	Kemenaker
		4057.SCH.032	PBK Provinsi Bengkulu	Orang	-	1.760	1.760	1.760	32.157,0	Provinsi Bengkulu	Kemenaker
		4057.SCH.033	PBK Provinsi Banten	Orang	-	352	352	352	5.049,9	Provinsi Banten	Kemenaker
		4057.SCH.034	PBK Provinsi Bangka Belitung	Orang	-	336	336	336	8.751,2	Kota Pangkal Pinang	Kemenaker
		4057.SCH.035	PBK Provinsi Gorontalo	Orang	-	480	480	480	8.700,9	Kota Gorontalo	Kemenaker
		4057.SCH.036	PBK Provinsi Kepulauan Riau	Orang	-	240	240	240	4.208,1	Provinsi Kepulauan Riau	Kemenaker
		4057.SCH.037	PBK Provinsi Sulawesi Barat	Orang	-	224	224	224	3.560,0	Provinsi Sulawesi Barat	Kemenaker
		4057.SCH.038	PBK Provinsi Kalimantan Utara	Orang	-	528	528	528	11.095,1	Provinsi Kalimantan Utara	Kemenaker
		4057.SCH.039	PBK Provinsi Maluku Utara	Orang	-	80	80	80	1.651,7	Provinsi Maluku Utara	Kemenaker
		4057.SCH.040	PBK Provinsi Papua Barat	Orang	-	240	240	240	4.793,9	Provinsi Papua Barat	Kemenaker
		4057.SCH.041	Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga (PFLK)	Orang	-	665	665	665	8.597,6	Pusat	Kemenaker
4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas	4059.SCH.002	Pelatihan peningkatan produktivitas	Orang	8.275	12.970	12.970	12.970	145.727,0	34 Provinsi	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran											

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2172	Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	2172.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Orang	61	500	550	600	30.431	Pusat	Kemenaker
2175	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	2175.BEI.010	Lembaga yang mendapat bantuan kegiatan Padat karya	Lembaga	1.125	1.250	1.250	1.250	488.850,8	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.004	Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan padat Karya	Orang	45.000	-	-	-	13.902,9	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.003	Tenaga Kerja yang mendapat Pembinaan Untuk Menjadi Tenaga Kerja mandiri	Orang	101.800	-	-	-	42.178,2	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.020	Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan padat Karya	Orang	-	50.000	52.000	54.000	45.500,0	Pusat	Kemenaker
		2175.BDC.030	Tenaga Kerja yang mendapat Pembinaan Untuk Menjadi Tenaga Kerja mandiri	Orang	-	54.500	55.000	55.500	328.839,4	Pusat	Kemenaker
		2175.QEA.003	TenagaKerjamandiri lanjutan	Orang	1.800	-	-	-	27.000,0	Pusat	Kemenaker
		2175.QEA.010	Tenaga kerja mandiri pemula	Orang	100.000	-	-	-	226.000,0	Pusat	Kemenaker
6616	Perluasan kesempatan kerja Binapenta	6616.QEA.001	Tenaga kerja mandiri pemula	Orang	-	50.000	52.000	54.000	358.000,0	Pusat	Kemenaker
		6616.QEA.002	TenagaKerjamandiri lanjutan	Orang		3.971	4.000	4.100	185.565,0	Pusat	Kemenaker
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.010	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.856,2	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.015	Wirausaha Industri Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.730,7	Pusat dan Daerah	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6071.BDI.021	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.019,4	Pusat dan Daerah	Kemenperin
019.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4957	Pelatihan Vokasi Industri	4957.BDC.001	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	Orang	25	25	25	-	10.367,3	Pusat	Kemenperin
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4451	Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro	4451.BDG.001	Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan izin usaha (Izin Usaha Mikro Kecil/ IUMK)	UMi	5000	7000	9000	10.000	14.000,0	Pusat	Kemen KUKM
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	4445.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMi	360	450	500	700	26.380,0	Pusat	Kemen KUKM
2739	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	2739.QDG.002	UMKM yang didampingi melalui PLUT-UMKM	UMKM	71	100	200	300	19.860,0	Pusat	Kemen KUKM
2738	Pendampingan Konsultasi dan Bantuan Hukum	2738.BBA.001	Layanan Bantuan Hukum Perorangan	Layanan	1	1	1	1	41.524,0	Pusat	Kemen KUKM
2763	Pembiayaan dan Investasi UKM	2763.QDG.002	UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	UKM	300	500	700	10.000	4.980,0	Pusat	Kemen KUKM
4450	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM	4450.QDG.002	UKM/Sentra Yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	UKM	300	500	700	900	81.640,0	Pusat	Kemen KUKM
2751	Kemitraan dan Perluasan Pasar UKM	2751.QDG.002	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	UKM	250	350	450	550	32.100,0	Pusat	Kemen KUKM
		2751.QDG.003	Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat	Kegiatan	6	8	10	12	18.160,0	Pusat	Kemen KUKM
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2795	Pengarutamaan Gender Bidang Ekonomi	2795.QDB.001	K/L bidang ekonomi yang difasilitasi dalam peningkatan indeks PUG	K/L	5	8	10	12	3.400,0	Pusat	Kemen PPPA
		2795.UBA.001	Daerah mitra Asdep PUG Bidang Ekonomiyang difasilitasi dalam Peningkatan IndeksPUG	Daerah	5	8	9	10	5.200,0	Provinsi	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2795.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan	Daerah	5	5	5	5	13.200,0	Daerah	Kemen PPPA
INDIKATOR TPB/SDGs:											
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan											
8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit											
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
2746	Pembiayaan dan Penjaminan Perkoperasian	2746.BDF.002	Koperasi yang mendapatkan akses dan skema pembiayaan	Koperasi	150	200	250	350	15.000,0	Pusat	Kemen KUKM
		2746.QDF.001	Koperasi yang mendapatkan Dukungan Permodalan dan Penjaminan	Koperasi	250	350	400	450	46.420,0	Pusat	Kemen KUKM
4446	Perkuatan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro	4446.QDG.001	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	UMKM	10.000	12.000	14.000	16.000	76.530,0	Pusat	Kemen KUKM
2763	Pembiayaan dan Investasi UKM	2763.QDG.001	UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	UKM	250	300	350	400	16.640,0	Pusat	Kemen KUKM
4455	Pembiayaan Wirausaha	4455.BDC.001	Jumlah Peserta yang difasilitasi Sosialisasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif Bagi Wirausaha Pemula	Orang	240	350	450	550	11.490,0	Pusat	Kemen KUKM
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.032	IKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pendampingan pembiayaan KUR	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	12.959,1	Pusat dan Daerah	Kemenperin
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	2360.QDG.001	UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	UMKM	60	65	70	75	30.700,0	34 Provinsi	KKP
		2360.QDG.002	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	UMKM	200	200	200	200	11.000,0	34 Provinsi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6469	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6469.QDH.004	Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana BUMDesa Bersama Berkembang	Badan Usaha	27	27	27	27	5.400,0	27 Kabupaten	Kemendes PDTT
		6469.QDH.005	Bimbingan Teknis Pengelolaan Unit Usaha BUM Desa Bersama Konsolidasi	Badan Usaha	23	23	23	23	1.200,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.006	Bimbingan Teknis Pengelolaan Unit Usaha BUM Desa Bersama Berkembang	Badan Usaha	12	12	12	12	800,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.007	Workshop Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama	Badan Usaha	1	1	1	1	2.400,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEI.003	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Perencanaan Teknis	Lembaga	500	500	500	500	12.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEH.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan usaha Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes	Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	45.250,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEI.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Perencanaan Teknis	Lembaga	500	500	500	500	245.627,5	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEI.002	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Pengembangan Produk Unggulan	Lembaga	500	500	500	500	8.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEH.002	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan usaha Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes Dit. Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan	Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	2.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEI.004	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa Dit. Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan	Lembaga	500	500	500	500	18.000,0	Pusat	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
Program Peningkatan Kapasitas UMKM											
-	Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan UMKM	-	Jumlah pelatihan		NA	NA	NA	NA	NA	Kantor Perwakilan BI	Bank Indonesia
-	Business Matching Pembiayaan Bank dan Fintech	-	Jumlah pembiayaan yang disalurkan		NA	NA	NA	NA	NA	Kantor Perwakilan BI	Bank Indonesia
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5444	Peningkatan Penyuluhan	5444.QDC.001	KTH Mandiri yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	80	100	100	100	10,5	Pusat	Kemen LHK
		5444.QDD.001	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	20.597,5	Pusat	Kemen LHK
		5444.QDD.002	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	Kelompok Masyarakat	70	70	70	70	11,5	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
6587	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan	6587.QDH.002	Perusahaan yang mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Badan Usaha	500	-	-	-	498,2	Pusat	Kemenaker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6619.QDH.002	Perusahaan yang mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Badan Usaha	-	500	1.000	1.500	10.998,2	Pusat	Kemenaker
035.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan											
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	4550.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	21.391,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
4545	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	4545.ABK.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.139,0	Pusat	Kemenko Perekonomian
		4545.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.278,0	Pusat	Kemenko Perekonomian

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
4263 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	4263.PDI.016	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Orang	15.000	15.000	16.000	16.500	101.724,10	Pusat	Kemendikbud Ristek
	4263.QDB.002	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	Lembaga	120	120	120	120	1.151.954,40	Pusat	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi										
4258 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	4258.QEJ.002	Mahasiswa menjalankan wirausaha	Orang	50.000	3.000	60.000	65.000	267.123,40	Pusat	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)										
026.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
4057 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	4057.SCH.001	Peserta yang magang di perusahaan dalam negeri	Orang	108.300	55.000	64.559	67.453	337.298,0	34 Provinsi	Kemenaker
	4057.SCH.002	Peserta yang magang di perusahaan luar negeri	Orang	1.500	3.000	3.000	3.000	59.533,7	Pusat	Kemenaker
4060 Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas	4060.BDC.001	Pengembangan Talenta	Orang	150	-	-	-	725,6	Pusat	Kemenaker
	4060.BDC.001	Pengembangan Talenta Muda	Orang	-	75	75	75	6.840	Pusat	Kemenaker
029.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										
5441 Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	5441.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000,0	Pusat	Kemen LHK
5442 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	5442.RBI.001	Pembangunan Sekolah	Unit	3	-	-	-	15.302,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5442.SAE.001	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	479	479	479	479	303.490,0	SMK Kadipaten (Jawa Barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar (Sulsel), SMK Samarinda (Kaltim), SMK Manokwari (Papua Barat).	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	2198.BIB.001	Pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Pekerja Anak	500	-	-	-	2.627,7	Pusat	Kemenaker
		2198.BIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan dan anak	Badan Usaha	924	-	-	-	4.903,4	Pusat	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2199.BIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Badan Usaha	3.960	-	-	-	13.809,9	Pusat	Kemenaker
5587	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	5587.QAC.001	Perusahaan yang mendapatkan layanan pengujian K3	Perusahaan	4.500	-	-	-	28.387,8	Pusat	Kemenaker
6588	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	6588.QIH.001	Perusahaan yang diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	Badan Usaha	1.211	9.000	10.000	11.000	18.013,8	Pusat	Kemenaker
6590	Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6590.QDH.002	Perusahaan yang menerapkan SMK3	Badan Usaha		1.300	1.400	1.500	5.063,6	Pusat	Kemenaker
6592	Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6592.QAC.001	Perusahaan yang mendapatkan layanan pengujian K3	Badan Usaha	-	3.000	4.000	5.000	49.190,6	Pusat	Kemenaker
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089.SCI.003	Tenaga kesehatan yang dilatih K3 Fasyankes	Orang	120	120	120	120	2.978,9	Pusat	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs:										
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB										
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara										
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata										
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif										
4308 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	4308.QDC.001	Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan Usaha Sebagai Pemasok Industri Pariwisata	Orang	1.100	1.100	1.100	1.100	38.484,0	Pusat	Kemenparekraf
	4308.QDC.002	SDM Pariwisata yang difasilitasi pelatihan dan pembinaan sadar wisata	Orang	2.300	2.300	2.300	2.300	46.028,0	Pusat	Kemenparekraf
	4308.QDC.003	SDM pariwisata di desa wisata yang difasilitasi melalui pendampingan	Orang	2.450	2.450	2.450	2.450	68.288,0	Pusat	Kemenparekraf
	4308.SCD.001	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja	Orang	12.600	12.600	12.600	12.600	30.992,0	Pusat	Kemenparekraf
4309 Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4309.SCL.003	Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Bimbingan Teknis	Orang	2.300	2.300	2.300	2.300	23.000,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.SCL.004	Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota dan Provinsi yang difasilitasi Bimbingan Teknis	Orang	1.750	1.750	1.750	1.750	17.500,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.SCL.005	SDM Kreatif dan Champion/Unggulan yang difasilitasi Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Orang	6.000	6.000	6.000	6.000	87.600,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.SCL.006	SDM Ekonomi Kreatif difasilitasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	3.000	3.000	3.000	3.000	54.000,0	Pusat	Kemenparekraf
	4309.PDI.001	SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi	Orang	2.500	2.500	2.500	2.500	66.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4323 Komunikasi Pemasaran	4323.PEH.001	Publikasi Media Digital	Promosi	1	1	1	1	677.832,0	Pusat	Kemenparekraf
	4323.PEH.002	Publikasi Media Sosial dan Owned Media	Promosi	1	1	1	1	1.006.508,0	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4323.PEH.003	Publikasi Media Elektronik	Promosi	1	1	1	1	384.192,0	Pusat	Kemenparekraf
		4323.PEH.004	Publikasi Media Cetak dan Media Luar Ruang	Promosi	1	1	1	1	368.068,0	Pusat	Kemenparekraf
4324	Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania)	4324.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	8	8	8	8	93.599,6	Pusat	Kemenparekraf
		4324.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	8	8	8	8	41.200,0	Pusat	Kemenparekraf
		4324.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	1	1	1	1	40.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4324.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4325	Pemasaran Pariwisata Regional II (Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah)	4325.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Promosi	4	4	4	4	38.908,6	Pusat	Kemenparekraf
		4325.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Promosi	8	8	8	8	23.284,1	Pusat	Kemenparekraf
		4325.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah	Promosi	4	4	4	4	19.034,0	Pusat	Kemenparekraf
		4325.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah	Promosi	8	8	8	8	50.614,4	Pusat	Kemenparekraf
4326	Pemasaran Pariwisata Regional III (Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika)	4326.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	112.000,0	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4326.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	19.896,8	Pusat	Kemenparekraf
		4326.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	23.656,5	Pusat	Kemenparekraf
		4326.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	4	4	4	4	10.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4327	Pemasaran Ekonomi Kreatif	4327.PEH.001	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pada Subsektor Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Televisi dan Radio	Promosi	1	2	3	4	42.150,6	Pusat	Kemenparekraf
		4327.PEH.002	Pemasaran terintegrasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Promosi	1	2	3	4	288.386,0	Pusat	Kemenparekraf
		4327.PEH.003	Dukungan Pemasaran bagi Pelaku Kreatif pada Subsektor Aplikasi dan Pengembangan Permainan	Promosi	1	2	3	4	34.886,0	Pusat	Kemenparekraf
		4327.PEH.004	Dukungan Pemasaran bagi Pelaku Kreatif pada Subsektor Seni Pertunjukan, Seni Rupa dan Musik	Promosi	1	2	3	4	42.577,4	Pusat	Kemenparekraf
4329	Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan	4329.PBK.002	Pola Perjalanan Wisata	Rekomendasi Kebijakan	18	18	18	18	64.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4329.PBK.004	Produk Wisata	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	86.000,0	Pusat	Kemenparekraf
4330	Promosi Wisata Minat Khusus	4330.PEH.001	Pengenalan Produk Wisata Minat Khusus	Promosi	20	20	20	20	40.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4330.PEH.002	Partisipasi Pada Pameran Wisata Minat Khusus	Promosi	4	4	4	4	38.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4330.PEH.003	Kerjasama Terpadu Promosi Wisata Minat Khusus	Promosi	5	5	5	5	20.000,0	Pusat	Kemenparekraf
		4330.PEH.004	Media Promosi Wisata Minat Khusus	Promosi	12	12	12	12	100.000,0	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4331	Pengembangan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran	4331.PEG.001	Bidding MICE yang diselenggarakan	Promosi	8	6	6	6	55.120,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.001	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional	Promosi	2	2	2	2	6.900,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.002	Delegate Boosting yang ditingkatkan melalui promosi MICE	Promosi	1	1	1	1	8.320,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.003	MICE yang dipromosikan melalui misi penjualan	Promosi	2	2	2	2	2.500,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.004	Event MICE Dalam Negeri yang didukung	Promosi	6	6	6	6	120.300,0	Pusat	Kemendagri
		4331.PEH.005	Pemasaran MICE yang dipromosikan Lewat Media	Promosi	2	2	2	2	25.100,0	Pusat	Kemendagri
4332	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	4332.PEH.002	Materi Promosi Produk Wisata dan Kegiatan (Events)	Promosi	30	30	30	30	271.756,0	Pusat	Kemendagri
		4332.PEH.003	Promosi dan Publikasi Produk Wisata dan Kegiatan (Events)	Promosi	10	10	10	10	957.800,0	Pusat	Kemendagri
		4332.PEH.004	Evaluasi Promosi Produk Wisata dan Kegiatan (Events)	Promosi	10	10	10	10	10.444,0	Pusat	Kemendagri
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RBN.001	Fasilitas Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (mendukung Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Di Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional)	Unit	1	1	1	1	139,4	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.002	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun	Unit	50	50	50	50	137.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.004	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata	Unit	75	75	75	75	183,0	Pusat	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6468.RBN.005	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata super prioritas	Unit	47	47	47	47	178.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.006	Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (mendukung Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Di Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional)	Unit	2	2	2	2	16.085,4	Pusat	Kemendes PDTT
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa											
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	6141.FBA.013	Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Pengeluaran Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	217	318	426	542	5.826,2	Pusat	Kemendagri
		6141.FBA.015	Daerah yang Menerapkan Transaksi Non Tunai (Cashless)Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) atas Penerimaan Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100	150	200	250	6.483,0	Pusat	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs: 8.b.1 Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional											
092.DB Program Kepemudaan											
3808	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3808.QDC.001	Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000,0	Pusat	Kemempora

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
INDIKATOR TPB/SDGs:										
9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak										
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional										
033.GA Program Infrastruktur Konektivitas										
2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2409.CBC.001	Pembangunan Jalan	Km	213,84	15,74	250,00	250,00	8.939.204,2	Sumatera Utara, Bali, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan	Kemen PUPR
	2409.CBC.004	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Km	56,51	74,60	122,86	123,54	3.918.813,1	Papua, Papua Barat	Kemen PUPR
	2409.CBC.005	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Km	403,07	180,18	430,54	353,16	18.447.692,9	Aceh, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, NTT, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Jawa Tengah	Kemen PUPR
	2409.CBC.006	Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	Km	84,96	42,50	50,20	35,10	4.620.684,7	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	2409.CBC.007	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km	24,40	42,43	18,40	21,50	1.144.882,1	PM	Kemen PUPR
	2409.CBC.008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km	18,11	6,61	50,00	50,00	1.690.917,5	PM	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2409.CBF.001	Pembangunan Jembatan	Meter	18.967,24	10.326,04	137,96	228,55	2.635.783,4	PM	Kemen PUPR
		2409.CBF.002	Pembangunan <i>Flyover</i> / <i>Underpass</i> /Terowongan	Meter	2.321,08	331,50	7.070,20	3.513,50	7.617.318,8	PM	Kemen PUPR
		2409.CBF.003	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Meter	1.368,75	853,40	921,18	1.313,28	2.677.549,2	Papua, Papua Barat	Kemen PUPR
		2409.CBF.004	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	Meter	3.099,64	7.183,05	3.602,98	4.285,74	7.795.412,1	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		2409.CBF.005	Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas (ProPN)	Meter	3.440,35	207,36	376,39	373,13	1.125.172,1	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
		2409.CBF.007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Meter	766,11	818	500	500	792.385,6	Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol											
033.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
2409	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2409.CBC.003	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	km	340,20	262,80	671,60	1.065,30	345.905.961,0	Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Banten	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	4643.RBA.001	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	Km	46,80	-	-	-	2.515.001,7	Sumatera Selatan	Kemenhub
		4643.RBA.002	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	Km	4,00	-	-	-	334.086,4	DKI Jakarta	Kemenhub
		4643.RBA.003	Pembangunan Jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)	Km	6,00	-	-	-	318.279,5	Sulawesi Selatan	Kemenhub
		4643.RBA.004	Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo	Km	11,12	-	-	-	65.598,3	Jawa Barat	Kemenhub
		4643.RBA.005	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	Km	64,00	-	-	-	420.000,0	Sumatera Utara, Aceh	Kemenhub
		4643.RBA.006	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang	Km	3,80	-	-	-	170.000,0	Banten	Kemenhub
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiarascondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	Km	13,09	4,53	-	-	524.595,9	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	Km	26,60	-	-	-	439.769,1	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	Km	33,00	-	-	-	246.157,8	Jawa Timur	Kemenhub
		4641.RBA.013	Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - Siantar	Km	35,00	-	-	-	64.000,0	Sumatera Utara	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	4641.RBA.014	Peningkatan Jalur KA R42 Lintas Lahat - Lubuklinggau Segmen Bungamas - Lubuklinggau	Km	44,73	44,53	-	-	492.464,2	Sumatera Selatan	Kemenhub
	4641.RBA.015	Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak	Km	34,13	-	-	-	160.000,0	Banten	Kemenhub
	4641.RBA.016	Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung - Banjar	Km	52,00	-	-	-	25.834,4	Jawa Barat, Jawa Tengah	Kemenhub
	4641.RBA.017	Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar - Kroya	Km	28,75	-	-	-	24.000,0	Jawa Tengah	Kemenhub
	4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	Km	20,06	16,35	-	-	279.468,6	Sumatera Barat	Kemenhub
	4641.RBA.019	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	Km	40,72	-	-	-	230.550,0	Jawa Barat	Kemenhub
	4641.RBA.020	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Bandung dan Ciroyom	Km	0,74	-	-	-	98.400,0	Jawa Barat	Kemenhub
	4641.RBA.021	Penggantian Sistem Persinyalan Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan	Km	0,65	0,66	-	-	114.876,9	D.I Yogyakarta	Kemenhub
	4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	Km	25,50	25,50	-	-	1.036.600,0	Jabodetabek	Kemenhub
	4641.RBA.023	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	Km	3,50	-	-	-	152.125,0	Jawa Tengah	Kemenhub
	4641.RBA.035	Jabodetabek <i>Railway Capacity Enhancement Phase I</i>	Km	1,00	-	-	-	1.000,0	Jabodetabek	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	4645.RBE.001	Bandar Udara Baru	Unit	10	10	10	10	1.779.246,4	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat	Kemenhub
		4645.RBE.002	Bandara Wamena (Major Project)	Unit	1	-	-	-	70.000,0	Papua	Kemenhub
		4645.RBE.003	Bandara Ilaga (Major Project)	Unit	1	-	-	-	47.944,0	Papua	Kemenhub
		4645.RBE.004	Bandara Tanah Merah (Major Project)	Unit	1	-	-	-	46.320,0	Papua	Kemenhub
		4645.RBE.005	Bandar Udara	Unit	37	37	37	38	5.415.322,8	Tersebar	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	4637.RBP.022	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	Unit	20	30	30	30	2.453.789,5	Bali, Kab. Asmat, Kab. Banyuasin, Kab. Kotawaringin Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat,	Kemenhub
		4637.RBP.024	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional)	Unit	7	10	10	10	606.502,9	Kab. Asmat, Kab. Banyuasin, Kab. Kotawaringin Timur	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4637.RBP.026	Pelabuhan Danau (Prioritas Nasional)	Unit	12	20	20	20	1.126.077,1	Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Bali Sulawesi Tengah	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	4660.RBD.001	Fasilitas Pelabuhan Laut Prioritas Nasional	Unit	20	20	20	20	5.114.864,5	Jawa Barat, Sulawesi barat, Sulawesi Tengah, Papuabarat, Sulawesi utara, Sulawesi Selatan, Maluku, NTT, NTB, Kalimantan Selatan	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita											
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6056.BDI.001	Pendampingan dan Fasilitasi Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6058.BDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Industri	35	35	35	35	41.836,3	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri	2	2	2	2	5.229,5	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	Industri	100	100	100	100	31.377,2	Pusat	Kemenperin
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro	6044.BDI.001	Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	Industri	2	2	2	2	12.550,9	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro	6049.BDI.001	Industri yang diberikan Fasilitas Peningkatan Ekspor	Industri	1	1	1	1	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 Industri Agro	6051.BDI.001	Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4.0	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6051.BDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6068.BDI.001	Industri yang terfasilitasi melalui <i>Export Coaching</i> Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6070.BDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan <i>Center of Excellence</i>	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.011	IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	163	163	163	163	35.665,4	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		6071.BDI.013	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	62	62	62	62	15.897,8	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.016	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	205	205	205	205	47.111,0	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.018	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	95	95	95	95	23.675,1	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.022	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Industri	160	160	160	160	61.917,7	Pusat	Kemenperin
		6071.BDI.024	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Industri	54	54	54	54	4.183,6	Pusat	Kemenperin
6073	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri	6073.BDH.002	Peningkatan kemitraan dalam Global Value Chain	Badan Usaha	5	5	5	5	8.367,3	Pusat	Kemenperin
		6073.ABK.004	Industrial Intelligence dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	29.285,4	Pusat	Kemenperin
6074	Pengembangan Perwilayahan Industri	6074.BDH.001	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	Badan Usaha	5	9	9	9	22.918,1	Pusat	Kemenperin
		6074.BDH.002	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Badan Usaha	8	18	18	18	10.459,1	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
065.ED Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal											
3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	3232.QDI.025	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Proyek	7	7	8	8	3.500,0	Pusat	BKPM
090.EF Program Perdagangan Dalam Negeri											
3732	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	3732.PDC.051	Layanan Pengujian Mutu Barang	Produk	3.600	3.800	4.000	4.200	21.103,2	Pusat	Kemendag
3733	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	3733.ACA.051	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Produk	60	60	60	60	1.312,1	Pusat	Kemendag
		3733.BDB.051	Lembaga yang Didampingi dan atau Dimonitor Penerapan Standar/ Persyaratan Teknis	Lembaga	4	4	4	5	3.813,9	Pusat	Kemendag
		3733.BDB.052	Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Jejaring Lab Acuan Pengujian yang Dibina	Lembaga	40	40	40	40	6.360,0	Pusat	Kemendag
3734	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	3734.PDC.051	Layanan Kalibrasi	Produk	6.900	6.950	7.000	7.050	7.142,5	Pusat	Kemendag
3735	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	3735.PDC.051	Layanan Sertifikasi	Produk	51	49	50	51	3.343,7	Pusat	Kemendag
		3735.PDI.052	Layanan Sertifikasi	Orang	128	120	121	122	9.119,1	Pusat	Kemendag
042.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
5718	Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri	5718.SDA.001	Produk Inovasi Litbangjirap di Industri	Produk	20	15	15	15	243.797,0	Pusat	BRIN
		5718.SDA.002	Penelitian <i>Flagship</i> Riset Nasional (pembelian lisensi tranfer teknologi)	Produk	15	15	15	15	1.862.890,0	Pusat	BRIN
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur											
019.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4957	Pelatihan Vokasi Industri	4957.ADI.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	Orang	10.000	10.000	10.000	10.000	36.147,7	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4957.DCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	Orang	86.500	86.500	86.500	86.500	2.559.106,6	Pusat	Kemenperin
4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	4958.DAG.001	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Orang	11.405	11.405	11.405	11.405	476.169,1	Pusat	Kemenperin
		4958.DAG.002	Mahasiswa dan Lulusan Program DI dan DII Berbasis Kompetensi	Orang	1.800	1.800	1.800	1.800	92.856,2	Pusat	Kemenperin
4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	4959.DAG.001	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	Orang	6.763	6.763	6.763	6.763	205.345,1	Pusat	Kemenperin
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.010	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.856,2	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.015	Wirausaha Industri Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.730,7	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.021	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.019,4	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDD.001	Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitas	Kelompok Masyarakat	14	14	14	14	45.619,5	Pusat dan Daerah	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6071.BDD.002	Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang mendapat Fasilitas	Kelompok Masyarakat	7	7	7	7	27.194,7	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDD.003	Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas	Kelompok Masyarakat	20	20	20	20	34.683,4	Pusat dan Daerah	Kemenperin
044.EB Program Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
2765	Pengembangan Bisnis UKM Produk	2765.QDG.001	UMKM yang difasilitasi penguatan sarana dan prasarana produksi	UMKM	250	250	250	250	18.315,3	Pusat	Kemen KUKM
		2765.QDG.002	Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk UKM yang difasilitasi peningkatan manajemen dan mutu produk UKM	UMKM	450	450	450	450	50.960,0	Pusat	Kemen KUKM
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan											
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	6385.BDG.001	UMKM Kosmetik yang sesuai standar	UMKM	35	39	41	43	12.063,3	33 provinsi	Badan POM
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.BDG.001	UMKM pangan yang sesuai standar	UMKM	52	54	56	58	16.251,8	Jawa Barat dan Jabodetabek	Badan POM
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BB/Balai POM	UMKM	-	842	910	978	9.736,4	33 provinsi	Badan POM
		3165.BDG.002	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM I	UMKM	-	106	146	186	1.225,7	33 provinsi	Badan POM
		3165.BDG.003	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM II	UMKM	-	51	72	93	589,7	33 provinsi	Badan POM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.032	IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pendampingan pembiayaan KUR	Industri	1.000	1.000	1.000	1.000	12.959,1	Pusat dan Daerah	Kemenperin
044.EB Program Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4455	Pembiayaan Wirausaha	4455.QDC.002	Wirausaha Pemula yang mendapatkan Bantuan	UMKM	1.500	1.500	1.500	1.500	120.000,0	Pusat	Kemen KUKM
4448	Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor pertanian dan perkebunan	4448.QDG.001	UKM yang difasilitasi Akses Pembiayaan	UMKM	700	700	700	700	7.600,0	Pusat	Kemen KUKM
4446	Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro	4446.QDG.001	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	UMKM	10.000	10.000	10.000	10.000	35.212,8	Pusat	Kemen KUKM
INDIKATOR TPB/SDGs:											
9.4.1* Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur											
9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri											
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	20,5	34 provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB											
042.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
5716	Penelitian dan Inovasi Perguruan Tinggi, serta Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	5716.QDJ.001	Calon Startup Inovasi dari Perguruan Tinggi	UMKM	300	130	135	150	404.464,0	Pusat	BRIN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
024.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2069	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	2069.SDA.001	Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan <i>Life Sciences</i> Bidang Kesehatan	Hasil Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	4	93.313,8	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Sumatera Barat	Kemenkes
		2069.SDA.002	Produk hasil Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Gizi Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	Hasil Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	1	222.695,7	34 provinsi	Kemenkes
2070	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	2070.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah II	Riset	1	1	7	2	259.222,7	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Maluku	Kemenkes
		2070.SDA.002	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah V	Riset	1	1	6	2	133.714,7	Babel, Kalbar, Kalsel,, Sultra, Gorontalo, Pabar	Kemenkes
		2070.SDA.003	Produk Hasil Riset Evaluasi Intervensi Kesehatan Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Riset	1	1	1	1	66.582,8	34 provinsi	Kemenkes
2071	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2071.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah I	Riset	1	1	7	2	264.734,0	Aceh, Riau, Jakarta, Jateng, DIY, NTT, Sulsel	Kemenkes
		2071.SDA.002	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah IV	Riset	1	1	7	2	124.513,9	Jambi, Kepri, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulteng, Sulbar	Kemenkes
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	2072.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah III	Riset	1	1	7	2	299.695,5	Sumbar, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Malut, dan Papua	Kemenkes
019.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
6080	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri	6080.DDB.001	Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri agro (PRN Industri Agro)	Purwarupa	12	12	12	12	58.685,3	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6080.DDB.002	Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri KFTLMATE (PRN Industri KFTLMATE)	Purwarupa	3	3	3	3	62.754,4	Pusat	Kemenperin
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk 9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)											
042.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
4291	Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek	4291.QEJ.001	SDM Litbang Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri	Orang	550	550	550	550	243.600,0	Pusat	BRIN
3390	Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti	3390.QEJ.008	Peserta Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis	Orang	250	350	500	500	163.500,0	Pusat	LIPI
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah 9.b.1.(a) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6056.BDI.001	Pendampingan dan Fasilitasi Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6058.BDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Industri	35	35	35	35	41.836,3	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri	2	2	2	2	5.229,5	Pusat	Kemenperin
		6058.BDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	Industri	100	100	100	100	31.377,2	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro	6044.BDI.001	Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	Industri	2	2	2	2	12.550,9	Pusat	Kemenperin
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro	6049.BDI.001	Industri yang diberikan Fasilitas Peningkatan Ekspor	Industri	1	1	1	1	8.367,3	Pusat	Kemenperin
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro	6051.BDI.001	Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4.0	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6051.BDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Industri	1	1	1	1	10.459,1	Pusat	Kemenperin
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6068.BDI.001	Industri yang terfasilitasi melalui Export Coaching Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6070.BDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan <i>Center of Excellence</i>	Industri	10	10	10	10	20.918,1	Pusat	Kemenperin
		6070.BDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Industri	10	10	10	10	10.459,1	Pusat	Kemenperin
090.EE Program Perdagangan Luar Negeri											
3714	Penyelenggaraan Atase Perdagangan	3714.ABB.101	Laporan Informasi Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	11.513,1	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3714.ABB.102	Laporan Analisis Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	10.175,5	Pusat	Kemendag
		3714.ABB.103	Laporan Data Statistik Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	8.104,5	Pusat	Kemendag
3717	Pengembangan Produk Ekspor	3717.SDA.001	Pengembangan desain melalui <i>Indonesian Design Development Center</i>	Produk	110	120	125	130	27.221,1	Pusat	Kemendag
		3717.SDA.003	Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor, Jasa dan Ekonomi Kreatif	Produk	30	40	50	60	14.433,5	Pusat	Kemendag
3731	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	3731.PEB.001	Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	Forum	3	3	3	3	797.402,0	Pusat	Kemendag
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	3738.PBB.001	Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	Rekomendasi Kebijakan	70	92	94	88	218.500,0	Pusat	Kemendag
		3738.PBB.003	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	40.800,0	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.001	Fasilitasi FTA <i>Center</i> Jakarta	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.002	Fasilitasi FTA <i>Center</i> Bandung	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.003	Fasilitasi FTA <i>Center</i> Makassar	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
		3738.QDH.005	Fasilitasi FTA <i>Center</i> Semarang	Badan usaha	100	200	200	200	4.586,4	Pusat	Kemendag
3740	Perundingan Perdagangan Jasa	3740.PBB.002	<i>Roadmap</i> Jasa <i>Research</i> dan <i>Development</i>	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
		3740.PBB.003	Analisis Daya Saing Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Komunikasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
3741	Perundingan Perdagangan Multilateral	3741.PBB.004	Perdagangan Multilateral dalam Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	1.549,0	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3741.PBB.005	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam Instrumen Perdagangan (<i>Fisheries Subsidies, Anti-dumping, Safeguard dan Countervailing Measures</i>)	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	2.765,0	Pusat	Kemendag
		3741.PBB.007	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam <i>Investment Facilitation</i>	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	1.975,0	Pusat	Kemendag
		3741.PBB.009	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Bidang Market Akses Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	1.165,3	Pusat	Kemendag
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	3742.PEC.001	ASEAN <i>Trade in Goods Agreement</i> (ATIGA)	Kesepakatan	1	1	1	1	2.368,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.002	ASEAN <i>Comprehensive Investment Agreement</i> (ACIA)	Kesepakatan	1	1	1	1	300,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.006	Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Kesepakatan	1	1	1	1	5.715,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.007	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-China FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	2.030,7	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.008	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Korea FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.147,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.009	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Japan CEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.360,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.011	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.841,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.012	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Hongkong FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.083,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.013	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Canada	Kesepakatan	1	1	1	1	633,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.014	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EU	Kesepakatan	1	1	1	1	1.109,6	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3742.PEC.015	Kerja Sama Perdagangan ASEAN USTR	Kesepakatan	1	1	1	1	400,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.016	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EAEU	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.017	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Russia	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.018	Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.142,2	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.019	Kerja Sama Perdagangan dalam East Asian Summit (EAS)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.020	Kerja Sama Perdagangan dalam ASEAN Plus Three (APT)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.021	Kerja Sama Perdagangan dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Kesepakatan	1	1	1	1	792,7	Pusat	Kemendag
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral	3743.PED.001	Indonesia-EU CEPA	Perjanjian	1	1	1	1	3.009,0	Pusat	Kemendag
		3743.PED.002	Indonesia-Turkey CEPA	Perjanjian	1	1	1	1	2.007,1	Pusat	Kemendag
		3743.PED.003	Indonesia-Morocco CEPA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.872,5	Pusat	Kemendag
		3743.PED.004	Indonesia-Bangladesh CEPA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.610,7	Pusat	Kemendag
		3743.PED.005	Indonesia-Mauritius PTA	Kesepakatan	1	1	1	1	2.283,0	Pusat	Kemendag
		3743.PED.006	Indonesia-India PTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.447,7	Pusat	Kemendag
		3743.PED.007	Indonesia-Iran PTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.592,4	Pusat	Kemendag
		3743.PED.008	Indonesia-Pakistan TIGA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.680,1	Pusat	Kemendag
		3743.PED.009	Indonesia-Malaysia BTA	Perjanjian	1	1	1	1	2.109,7	Pusat	Kemendag
3744	Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	3744.PEC.001	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	7.093,8	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.002	Kerja Sama Fasilitas Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	6.893,9	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.003	Kerja Sama Antar Fora APEC	Kesepakatan	2	2	2	2	1.446,6	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3744.PEC.005	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	Kesepakatan	3	3	3	3	2.394,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.008	Kerja Sama Perdagangan Negara G20	Kesepakatan	3	3	3	3	2.418,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.009	Kerja Sama Perdagangan Negara OKI	Kesepakatan	2	2	2	2	2.765,6	Pusat	Kemendag
3745	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3745.QCB.001	Penanganan Kasus <i>Trade Remedy</i> dan Hambatan Teknis Perdagangan	Perkara	30	30	30	30	5.701,8	Pusat	Kemendag
3751	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	3751.PEH.002	<i>Display</i> Produk Ekspor di Luar Negeri	Promosi	3	4	5	6	14.453,7	Pusat	Kemendag
		3751.QAC.001	<i>InaExport</i> Daerah (Surabaya)	Badan usaha	1	2	3	4	12.475,6	Pusat	Kemendag
3753	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	3753.PBB.001	Analisa dan informasi pasar ekspor di negara tujuan ekspor utama/potensial	Rekomendasi Kebijakan	6	7	8	9	13.387,6	Pusat	Kemendag
		3753.PBB.002	Analisa dan informasi pasar ekspor di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Rekomendasi Kebijakan	4	5	6	7	8.317,0	Pusat	Kemendag
		3753.QAC.001	Layanan <i>Inquiry</i> dan Temu Bisnis	Badan usaha	50	50	50	50	2.810,3	Pusat	Kemendag
		3753.QMA.003	Pengembangan <i>market place</i> berorientasi ekspor	Layanan	1	1	1	1	11.669,0	Pusat	Kemendag
3754	Pengembangan Promosi dan Citra	3754.PEH.001	Pameran ke Negara Mitra Dagang Mitra Utama	Promosi	5	5	7	8	16.083,1	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.002	Pameran Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Promosi	5	6	7	8	34.511,6	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.003	Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	Promosi	1	1	1	1	8.367,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.004	Partisipasi China International Import Expo-Shanghai	Promosi	1	1	1	1	8.367,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.005	Partisipasi Pameran Hannover Messe	Promosi	1	1	1	1	8.367,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.006	Partisipasi Pameran Terintegrasi Lainnya	Promosi	4	5	6	7	11.295,8	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3754.PEH.007	Pameran Trade Expo Indonesia	Promosi	1	1	1	1	21.976,1	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.008	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	Promosi	5	5	6	7	29.285,4	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.009	Partisipasi Expo 2020 Dubai	Promosi	1	1	0	0	346.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.001	Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Badan usaha	60	65	70	75	25.856,1	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.002	Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Badan usaha	35	40	45	50	28.244,9	Pusat	Kemendag
3755	Kerja Sama Pengembangan Ekspor	3755.PEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Kesepakatan	5	6	7	8	9.509,4	Pusat	Kemendag
		3755.QDH.001	Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Badan usaha	100	110	120	130	12.287,3	Pusat	Kemendag
3756	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	3756.QDG.001	Export Coaching Program	Pelaku Usaha	150	175	200	225	16.777,3	Pusat	Kemendag
		3756.SCF.001	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Orang	4	4	4	4	61.434,8	Pusat	Kemendag
3777	Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	3777.AEH.001	Promosi ITPC	Promosi	57	57	57	57	66.004,4	Pusat	Kemendag
		3777.PBB.004	Market Intelligence	Rekomendasi Kebijakan	19	19	19	19	6.260,2	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.002	Buyer Inquiry	Badan usaha	144	240	240	240	10.000,0	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.003	Co Working Space di Pasar Potensial	Badan usaha	6	6	7	0	1.200,0	Pusat	Kemendag
INDIKATOR TPB/SDGs: 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.002	BTS/Last Mile	Lokasi (kumulatif)	4.200	3.704	9.586	9.586	23.557.000,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	Gbps	37	37	37	37	11.715.244,0	Tersebar	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.1.1* Rasio Gini											
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur											
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	6318.QAA.001	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Orang	163.400.000	219.900.000	277.500.000	280.000.000	419.644,0	Pusat	Kemensos
		6318.UAB.001	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Sistem Informasi	1	1	1	1	631.678,5	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemensos
040.EA Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif											
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	4314.PEA.001	Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	Kegiatan	3	8	12	16	35.000,0	Tahun 2021: Manado, Minahasa Utara, Lombok	Kemenparekraf
4315	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I	4315.PEA.002	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang Dikembangkan	Kegiatan	25	29	29	29	28.000,0	DSP Danau Toba dan DSP Borobudur	Kemenparekraf
4316	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II	4316.PEA.004	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	Kegiatan	6	25	25	25	21.500,0	Tahun 2021: 1. Desa Wisata Sade, Lombok Tengah 2. Desa Wisata Bilibante, Lombok Tengah 3. Desa Wisata Liang Dara, NTT 4. Desa Wisata Wae Bobo, Manggarai Barat 5. Desa Wisata Marisao, Minahasa Utara 6. Desa Wisata Pulisan, Minahasa Utara	Kemenparekraf
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.1.1.(b) Jumlah Desa Tertinggal											
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6467	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	6467.QDC.001	Pendampingan Desa	Orang	-	35.168	35.168	35.168	6.875.500,0	Pusat	Kemendes PDPT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6474	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	6474.UBB.001	Desa Digital yang Dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD)	Desa	200	250	250	250	130.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6476	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	6476.UBB.001	Desa Digital yang dikembangkan melalui Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)	Desa	9.028	9.028	9.028	9.028	360.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6477	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	6477.PBP.001	Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui <i>Smart Village</i>	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	40.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.QDD.001	Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	Kelompok Masyarakat	360	360	360	360	21.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.QDD.006	Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial	Kelompok Masyarakat	20	5	5	5	8.200,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.QDC.004	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana	Orang	200	100	100	100	8.791,8	Kabupaten Donggala & Kabupaten Sigi	Kemendes PDTT
		6468.QDC.006	Aparatur Pemerintah Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana	Orang	420	420	420	420	2.750,0	Kab. Bima, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Landak	Kemendes PDTT
		6468.RAI.001	Pasar untuk Mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi yang Dibangun	Unit	100	20	100	100	105.757,0	Pusat	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6468.RAI.002	Sarana Pelayanan Dasar yang Dibangun/ Dikembangkan/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	24.581,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.002	Sarana dan Prasarana Wisata Desa yang Dibangun	Unit	50	50	50	50	137.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6468.RBN.005	Sarana dan Prasarana Wisata Desa yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Wisata Super Prioritas	Unit	47	47	47	47	178.000,0	Pusat	Kemendes PDTT
6469	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	6469.QDD.003	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Kelompok Masyarakat	500	500	750	750	279.028,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.002	Bantuan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama Konsolidasi	Badan Usaha	23	23	23	23	27.600,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.003	Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama Berkembang	Badan Usaha	12	12	12	12	52.761,3	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QDH.004	Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama Maju	Badan Usaha	27	27	27	27	5.400,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEH.001	Bantuan Modal Stimulan untuk Pengembangan Usaha Ekonomi Desa yang Terintegrasi dengan BUMDes	Kelompok Masyarakat	50	50	50	50	45.250,0	Pusat	Kemendes PDTT
		6469.QEI.001	Bantuan Modal Stimulan untuk Pengembangan BUMDes	Lembaga	500	500	500	500	245.627,5	Pusat	Kemendes PDTT
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
1244	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	1244.UBB.013	Desayang Telah Memiliki Batas Wilayah Sesuai Ketentuan	Desa	100	500	500	500	21.974,3	Pusat	Kemendagri
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.PFA.001	Sistem dan Prosedur yang Dikembangkan	NSPK	6	4	4	4	7.924,1	Pusat	Kemendagri
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/ Pengurus Kelembagaan Desa	1248.UAC.004	Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	Orang	2.232	2.350	2.350	2.350	37.608,4	Kab. Lampung Selatan, Kab. Sleman, Kota Malang	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5444	Peningkatan Penyuluhan	5444.QDC.001	KTH Mandiri yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	80	100	100	100	10,5	Pusat	Kemen LHK
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
5484	Pembangunan Sarana Prasarana Desa	5484.RBN.001	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun	Unit	50	50	50	50	134.000,0	33 Provinsi	Kemendes PDTT
		5484.RBN.001	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata super prioritas	Unit	15	15	15	15	93.750,0	DPP Danau Toba, DPP Borobudur, DPP Mandalika, DPP Labuan Bajo, DPP Likupang	Kemendes PDTT
5486	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	5486.QEH.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan usaha Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes	Kelompok Masyarakat	50	30	23	22	40.060,9	33 Provinsi	Kemendes PDTT
		5486.QEI.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDesa	Lembaga	500	391	361	331	135.005,3	33 Provinsi	Kemendes PDTT
5490	Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan	5490.RAI.001	Pasar untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun	Unit	1	1	1	1	5.000,0	62 Kabupaten Kawasan Perdesaan Prioritas	Kemendes PDTT
5489	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	5489.QDH.004	Bantuan Pengembangan Saran Prasarana BUM Desa Bersama Berkembang	Badan Usaha	12	12	12	500	7.200,0	62 Kabupaten Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	Kemendes PDTT
		5489.QDH.005	Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama Maju	Badan Usaha	27	27	27	27	5.400,0	62 Kabupaten Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	Kemendes PDTT
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal											
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal											
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal											
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi											
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RAG.002	Sarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan yang disediakan	Unit	6	-	-	-	2.400,0	Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Mappi, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		6468.RAG.005	Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur yang dibangun di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Unit	2	-	-	-	2.000,0	Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tambrau	Kemendes PDTT
		6648.xxx.xxx (TA 2022)	Embung dan Bangunan Air Lainnya yang dibangun di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Unit	0	6	5	6	71.870,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom, Kab. Supiori, Kab. Sorong Selatan, Tambrau, Teluk Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni	Kemendes PDTT
		6468.QDC.004	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pasca bencana	Orang	200						
		6468.QDC.006	Aparatur Pemerintah Desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam perencanaan penanggulangan bencana	Orang	420	1642	1634	1634	41.991,8	Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi, Kab. Pesisir Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama	Kemendes PDTT
		6468.QDD.006	Pranata Adat Yang Ditingkatkan Perannya Dalam Penanganan Konflik Sosial	Kelompok Masyarakat	70	-	-	-	2.600,0	Kab. Lembata, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Donggala, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Sigi, Kab. Lombok Utara, Kab. Sorong	Kemendes PDTT
		6468.RAM.001	Sarana Seni dan Budaya di Daerah Rawan Konflik di Daerah Tertinggal	Unit	8	-	-	-	700,0	Kab. Lembata, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Donggala, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Sigi, Kab. Lombok Utara, Kab. Sorong	Kemendes PDTT
		6468.QDC.005	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa yang ditingkatkan kapasitasnya di Daerah Rawan Konflik di Daerah tertinggal	Orang	100	471	471	471	12.500,0	Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai, Kab. Donggala, Kab. Sorong	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		6468.QDC.009	Pelaku Wisata di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2155	-	-	-	21.715,6	Kab. Kepulauan Aru, Kab. Lembata, Kab. Aceh Singkil, Kab. Lampung Barat, Kab. Bondowoso, Kab. Alor, Kab. Donggala, Kab. Tojo Una-una, Kab. Pulau Morotai, Kab. Jayawijaya, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Bima, Kab. Sumbawa, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Nagekeo, Kab. Ende, dan kabupaten lainnya yang mendapat pelatihan melalui forum fasilitasi secara online	Kemendes PD TT
		6468.RBN.007	Amenitas Wisata di DT yang Dibangun/Dikembangkan	Unit	15	-	-	-	12.827,6	Kab. Sumba Tengah, Kab. Teluk Wondama, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Jayawijaya, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Tambora, Kab. Nias Selatan, Kab. Lembata, Kab. Lombok Utara, Kab. Manggarai Timur	Kemendes PD TT
6470	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	6470.RBG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang dibangun	Unit/ KK	2 Unit	200 KK	300 KK	246 KK	30.000,0	Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kab. Malaka, Kab. Supiori, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kemendes PD TT
		6470.RBC.002	Jalan Strategis Desa yang Ditingkatkan di Daerah Perbatasan	Km	3	10	6	4	54.000,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Kab. Supiori, Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kemendes PD TT
		6470.RAG.001	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah perbatasan	Unit	3	-	-	-	2.424,3	Kab. Belu, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Keerom	Kemendes PD TT
		6470.RAL.001	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah perbatasan	Unit	1	-	-	-	675,7	Kab. Kepulauan Tanimbar	Kemendes PD TT

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	6470.QDC.009	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pertanian dan Perikanan di Daerah Perbatasan	Orang	195	-	-	-	1.200,0	Kab. Belu, Kab. Kepulauan Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Keerom	Kemendes PDTT
	6470.RBG.003	Prasarana Air Bersih di Pulau Kecil dan Terluar yang dibangun	Unit	1	3	4	3	37.400,0	Kab. Nias Selatan (P. Simuk), Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai), Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P. Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar), Kepulauan Tanimbar, Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondji), Kab. Teluk Wondama	Kemendes PDTT
	6470.QDC.011	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pertanian, dan Perikanan di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Orang	150	-	-	-	1.200,0	Kab. Lembata, Kab. Nabire, Kab. Nias Selatan, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kab. Kepulauan Sula	Kemendes PDTT
	6470.QDC.010	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pariwisata di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Orang	75	-	-	-	750,0	Kab. Sabu Raijua, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tojo Una-una	Kemendes PDTT
	6470.RBN.001	Prasarana Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata di Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang dibangun	Unit	6	-	-	-	2.700,0	Kab. Donggala, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tojo Una-una	Kemendes PDTT
	6470.RAG.002	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah pulau kecil dan terluar	Unit	3	-	-	-	900,0	Kab. Lembata, Kab. Nabire, Kab. Nias Selatan	Kemendes PDTT
	6470.RAL.002	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah pulau kecil dan terluar	Unit	3	-	-	-	900,0	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kab. Kepulauan Sula	Kemendes PDTT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6470.QDC.001	Tenaga Kerja Bidang Pendidikan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	930	750	750	750	30.000,0	Kab. Lombok Utara, Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab. Pesisir Barat, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Malaka, Sumba Barat, Belu, Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi, Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Jayawijaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrau	Kemendes PD TT
		6470.QDC.002	Tenaga Kerja Bidang Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	950						Kemendes PD TT
		6470.QDC.003	Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	240						Kemendes PD TT
		6470.QDC.004	Tenaga Kerja BUMDes yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	160						Kemendes PD TT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6470.RBC.001	Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan di Daerah Tertinggal	Km	2,0	15,4	7,9	9,7	80.000,0	Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan, Kab. Lombok Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Sigi, Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Mamberamo Raya, Nabire, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Kab. Pegunungan Arfak, Sorong	Kemendes PDDT
		6470.RBG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Unit	1	8	9	6	55.100,0	Kab. Kupang, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Lombok Utara, Kepulauan Sula, Sigi, Tojo Una-una, Kepulauan Mentawai, Puncak, Jayawijaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrau, Pegunungan Arfak Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Teluk Wondama, Maybrat, Tambrau, Pegunungan Arfak	Kemendes PDDT

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6469	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6469.RAG.001	Prasarana Prukades di Daerah Tertinggal yang dibangun	Unit/Kab	16 Unit	13 Kab	13 Kab	12 Kab	73.050,0	Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una, Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Lombok Utara, Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Kab. Boven Digoel, Mappi, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Tambrauw	Kemendes PD TT
		6469.QDC.002	Masyarakat di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Nilai Tambah Prukades	Orang	100	-	-	-	1.000,0	Pusat	Kemendes PD TT
027.DQ Program Perlindungan Sosial											
6276	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat	6276.QEB.101	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I	Keluarga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemensos
		6276.QEB.102	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun II	Keluarga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemensos
		6276.QEB.103	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun III	Keluarga	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Orang	40.211	40.211	40.211	40.211	4.880.699,2	Pusat	Kemensos
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	191.493.238,1	Pusat	Kemensos
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Layanan	2	2	2	2	25.203,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	5.513.785	5.513.785	5.513.785	5.513.785	52.596.057,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	5.238.372	5.238.372	5.238.372	5.238.372	49.941.640,4	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	4.847.877	4.847.877	4.847.877	4.847.877	46.271.796,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Keluarga	3.612.185	3.612.185	3.612.185	3.612.185	17.338.488,0	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Keluarga	3.928.384	3.928.384	3.928.384	3.928.384	18.856.243,2	Pusat	Kemensos
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Keluarga	2.459.431	2.459.431	2.459.431	2.459.431	11.805.268,8	Pusat	Kemensos

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
032.HB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2344.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Rote Ndao yang difasilitasi dan dibina	Kelompok Masyarakat	75	75	75	75	2.750,0	Rote Ndao	KKP
		2344.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Rote Ndao yang sudah dibangun	Unit	1	1	1	1	1.000,0	Rote Ndao	KKP
		2344.QEG.003	Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (SBK)	Unit	200.000	250.000	275.000	300.000	32.200,0	Jatim, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Sulsel	KKP
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	2346.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Sumba Timur yang difasilitasi dan dibina	Kelompok Masyarakat	75	75	75	75	2.000,0	Sumba Timur	KKP
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	2360.QDB.002	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak Numfor yang mandiri	Lembaga	1	1	1	1	19.750,0	Biak Numfor	KKP
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Mentawai yang diberikan fasilitasi dan pembinaan	Kelompok Masyarakat	10	10	10	10	4.076,4	Kab. Kepulauan Mentawai	KKP
		2362.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Kepulauan Mentawai	Unit	12	12	12	12	4.992,7	Kab. Kepulauan Mentawai	KKP
2366	Perencanaan Ruang Laut	2366.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Maluku Barat Daya	Unit	12	12	12	12	5.309,2	Kab. Maluku Barat Daya	KKP
		2366.RBQ.001	Prasarana di SKPT Maluku Barat Daya	Unit	1	1	1	1	2.306,6	Kab. Maluku Barat Daya	KKP
033.WA Program Dukungan Manajemen											
5592	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5592.PBP.005	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Daerah Tertinggal Musi Rawas Utara dan Pesisir Barat di 2 Provinsi (Sumsel dan Lampung)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	11.000,0	Pusat	Kemen PUPR
		5592.PBP.024	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Wilayah Adat Laa Pago	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	26.600,0	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5592.PBP.007	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	15.000,0	Pusat	Kemen PUPR
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	5036.RBS.004	Daerah irigasi Bubi yang dibangun - Provinsi Maluku	Km	12	12	12	12	271.173,0	Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5036.RBS.007	Daerah irigasi Gumbasa (EARR dan IRSL) yang direhabilitasi - Provinsi Sulawesi Tengah	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5036.RBS.032	Daerah irigasi Wae Dingin (IPDMIP) yang direhabilitasi - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
5039	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5039.RBG.007	Bendungan Mbay yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5039.RBG.008	Bendungan Welikis yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5039.RBG.045	Bendungan Manikin yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		5039.RBG.047	Bendungan Temef yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	4978.RBB.010	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	-	-	-	-	31.229,00	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	115.230	101.000	108.000	129.601	16.867.991,00	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.002	Pembangunan Rumah khusus	Unit	3.354	2.461	1.310	1.300	2.769.730,00	34 Provinsi	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4840	Penyelenggaraan Sanitasi Yang Layak	4840.RBB.001	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	KK	42.000	52.000	52.000	22.000	10.128.301,0	28 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota								Kemen PUPR
		4840.RBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	KK	26.000	32.000	32.000	32.000	3.719.612,0	PM	Kemen PUPR
		4840.RBB.010	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	KK	19.000	19.000	19.000	19.000	629.000,0	168 Kab/Kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	KK	263.000	323.000	323.000	323.000	1.746.444,0	374 kab/kota	Kemen PUPR
		4840.RBB.011	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	KK	21.800	21.800	21.800	21.800	806.500,0	100 Kab/Kota	Kemen PUPR
4973	Penyelenggaraan Air Minum Yang Layak	4973.RBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	4.600	1.530	1.530	0	16.082.500,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.002	Pembangunan SPAM Regional							7 wilayah pelayanan SPAM Regional Prioritas	Kemen PUPR
		4973.RBB.003	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Liter per detik	375	375	375	0	1.438.800,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.004	Peningkatan SPAM Regional							Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
		4973.RBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	192.000	192.000	192.000	192.000	6.000.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
		4973.RBB.006	Perluasan SPAM Regional							Kabupaten/ Kota terlayani SPAM Regional	Kemen PUPR
		4973.RBB.007	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	400.000	400.000	400.000	400.000	6.000.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
033.GA Program Infrastruktur Konektivitas										
2409	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	2409.RBC.008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JALAN TRANS PULAU BURU(NAMROLE - LEKSULA)	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)- DOBO (BBM)- DERMAGA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PIRU - WAISALA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - ILWAKI - LURANG	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SIWAHAN - ARMA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LARAT - LAMDESAR TIMUR	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PIRU - SP. ETI	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
			2409.RBC.004	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIMI	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)- JALAN MAMBERAMO - ELELIM II		Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SINAK - ILAGA V	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN PERBATASAN OKSIBIL - TOWE HITAM	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ALIH TRASE GUNUNG PASIR	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN WANGGAR-KWATISORE-KAMP. MURI (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN RUAS ENAROTALI - SUGAPA (DANAU ENAROTALI)	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN WAGETE - TIMIKA	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
		Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN UBRUB - TOWE HITAM - OKSIBIL	Km	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR
	2409.RBF.007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI NALBESSY II DAN WAI WAI NALBESSY III - JALAN TRANS PULAU BURU (NAMROLE - LEKSULA)	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2021	2022	2023	2024				
			Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI ANGGUMELA, CS	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR	
			Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI ARKAY, CS	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemen PUPR	
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas												
1960	Pelayanan Transportasi Udara	1960.QAH.006	Jembatan Udara di Papua	Layanan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
4654	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	4654.RBE.002	Pembangunan Bandar Udara Baru Mentawai	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.012	Pengembangan Bandar Udara Wamena	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.013	Pengembangan Bandara Illaga	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.051	Pengembangan Bandara Dekai (Nop Goliat Dekai)	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.052	Pengembangan Bandara Oksibil	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.074	Pengembangan Bandara Sinak	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.070	Pengembangan Bandara Kiwirok	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.082	Pengembangan Bandara Elelim	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.077	Pengembangan Bandara Bilorai	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub	
		4654.RBE.007	Pembangunan Bandara Sobaham	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.017	Pengembangan Bandara Inanwatan	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
4654.RBE.028	Pengembangan Bandara Anggi	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub		

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
		4654.RBE.029	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.049	Pengembangan Bandara Raja Ampat	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.050	Pengembangan Bandara Babo	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.069	Pengembangan Bandara Kambuaya	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.073	Pengembangan Bandara Rendani	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.010	Pembangunan Bandara Nabire Baru	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.035	Pengembangan Bandara Timika	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.053	Pengembangan Bandara Numfor	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.018	Pengembangan Bandara Lapter Towe Hitam	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.014	Pengembangan Bandara Tanah Merah	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.019	Pengembangan Bandara Kimaam	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.030	Pengembangan Bandar Udara Ewer	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.031	Pengembangan Bandar Udara Kepi	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.076	Pengembangan Bandara Mopah	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.078	Pengembangan Bandara Kamur	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4654.RBE.071	Pengembangan Bandara Mindiptana	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	4660.RBD.003	Pengembangan Pelabuhan Seba - Kab. Sabu Raijua	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub
		4660.RBD.008	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arwala - Kab. Maluku Barat Daya	Unit	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
1283	Pembinaan inovasi daerah	1283.UBA.003	Penerapan pilot project inovasi daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3T	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3	PM	PM	PM	102,3	PM	Kemendagri
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun											
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QEK.507	Siswa Penerima Afiriasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	2.895	2.895	2.895	2.895	104.361,2	Pusat	Kemendikbud Ristek
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	4469.QEJ.018	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	orang	7.382	8.417	8.417	8.417	684.577,4	Pusat dan daerah	Kemendikbud Ristek
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.QEG.001	PLTS Atap	MW	35,88 (APBN: 10)	38,53 (APBN: 10)	47,37 (APBN: 10)	51,78 (APBN: 10)	1.203,2	Tersebar	Kemen ESDM
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.010	Wirasaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.856,20	Pusat dan Daerah	Kemenperin
		6071.BDI.015	Wirasaha Industri Kimia, Sandang, Aneka, dan Kerajinan yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.730,70	Pusat dan Daerah	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6071.BDI.021	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Industri	550	550	550	550	117.019,40	Pusat dan Daerah	Kemenperin
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif											
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	4314.PEA.001	Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	Kegiatan	3	8	12	16	35.000,0	Tahun 2021 : Jateng, Bali, Kaltim (Kegiatan ini berbasis proposal)	Kemenparekraf
4315	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I	4315.PEA.002	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang Dikembangkan	Kegiatan	29	29	29	29	31.790,0	Pusat dan Daerah	Kemenparekraf
4316	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II	4316.PEA.004	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	Kegiatan	25	25	25	25	25.000,0	Pusat dan Daerah	Kemenparekraf
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi											
4455	Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha	4455.QDC.001	Wirausaha Pemula yang mendapatkan Bantuan	Orang	1.500	1.500	1.500	1.500	120.000,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
2757	Penumbuhan Wirausaha	2757.SCF.001	Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	68.000,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	4445.QDG.001	Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	UMKM	3.250	3.250	3.250	3.250	83.600,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
4451	Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro	4451.QEE.001	Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana	Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000,0	Pusat (tidak sepenuhnya dialokasikan untuk daerah tertinggal)	Kemen KUKM
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.004	Akses Internet	Lokasi (Kumulatif)	15.532	37.532	77.532	117.532	8.968.840,0	Tersebar	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.BKA.005	Pengamatan situasi terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan HAM	Laporan	4	4	4	4	4.465,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.QKA.006	Pengamatan Situasi atas Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Hak Sipil dan Politik Masyarakat Papua	Laporan	1	1	1	1	2.500,0	Daerah	Komnas HAM
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.007	Rekomendasi umum komnas perempuan terkait penghapusan KtP yang ditindaklanjuti pemerintah, APH dan pengambil kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	5.815,0	Pusat	Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan											
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kadal, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Satker	0	549	549	549	21.300,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Satker	0	549	549	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	KPU
115.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
4358	Fasilitasi Pengawasan	4358.QDC.001	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Lembaga	248	348	448	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)											
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1607.ABD.001	Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	260	260	260	260	4.300,0	Pusat	Kemenum HAM
		1607.ABD.002	Rekomendasi Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat secara Non Yudisial	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	13.330,0	Pusat	Kemenum HAM
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	5255.ABD.002	Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	33	33	33	33	6.120,0	Daerah	Kemenum HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.BCC.001	Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM	Perkara	3.360	3.360	3.360	3.360	6.210,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.BCC.003	Penanganan perkara pelanggaran HAM	Perkara	864	864	864	864	9.255,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.BCC.004	Mediasi perkara pelanggaran HAM	Perkara	100	100	100	100	9.255,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.BCC.007	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat	Perkara	1	1	1	1	1.885,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.PBD.008	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Rekomendasi Kebijakan	450	450	450	450	10.500,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5681	Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.001	Perangkat standar pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	6.250,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.ABD.003	Rekomendasi Mekanisme Penanganan dan Pencegahan Konflik terhadap Perempuan di Aceh dan Maluku (<i>Centre of Peace</i>)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	500,0	Daerah	Komnas Perempuan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5681.ABD.006	Rekomendasi penguatan mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.000,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.PBD.009	Konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.500,0	Pusat	Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.PFA.001	Standar Norma dan Pengaturan HAM	NSPK	4	4	4	4	12.000,0	Pusat	Komnas HAM
5681	Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.PBD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	9.000,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.PBD.005	Kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	12.500,0	Pusat	Komnas Perempuan
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat											
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4766	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4778.FAD.001	Nota Keuangan APBN/P	Dokumen	1	1	1	1	5.311,1	Pusat	Kemenkeu

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.QIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Badan Usaha	5.782	-	-	-	13.409,0	34 provinsi	Kemenaker
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.BDH.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Badan Usaha	66	-	-	-	395,0	34 provinsi	Kemenaker
		5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial	Rekomendasi Kebijakan	3	-	-	-	756,0	Pusat	Kemenaker
6619	Peningkatan Pendidikan Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial	6619.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Rekomendasi Kebijakan	-	3	3	3	5.857,0	Pusat	Kemenaker
		6619.BDC.007	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Orang	-	1.000	1.500	2.000	10.500,0	34 provinsi	Kemenaker
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.5.1* Financial Soundness Indicator											
10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs:											
10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik											
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan											
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan											
2174	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	2174.AEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pelindungan dan Penempatan PMI	Kesepakatan	10	-	-	-	3.782,0	Pusat	Kemenaker
		2174.AEC.001	Nota Kerjasama bilateral penempatan dan pelindungan PMI	Kesepakatan	-	10	11	12	19.700,0	Pusat	Kemenaker
011.AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik											
6028	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Pusat	6028.QAA.001	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Orang	23.862	23.862	23.862	23.862	261.333,1	Pusat	Kemenlu
		6028.BAH.003	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	Layanan	2	2	2	2	860,0	Pusat	Kemenlu
4439	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Perwakilan RI	4439.QAA.001	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Orang	112.090	112.090	112.090	112.090	699.992,2	Perwakilan RI	Kemenlu
011.AM Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional											
6030	Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional	6030.AEC.003	Kesepakatan Hukum dan Perjanjian di Bidang Sosial dan Budaya	Kesepakatan	34	35	36	37	6.117,5	Pusat	Kemenlu
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi											
104.DP Program Penempatan dan Pelindungan PMI											
3894	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	3894.QAA.002	Pelayanan Penempatan PMI oleh pemerintah	Orang	7.500	8.000	9.000	10.000	11.395,8	Pusat, Aceh, Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BP2MI

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3894.QAA.003	Pelayanan Penempatan PMI oleh non pemerintah	Orang	292.500	300.000	341.000	423.629	212.604,2	Pusat, Aceh, Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BP2MI
		3894.QAA.004	Pelayanan Perlindungan terhadap PMI	Orang	17.000	15.000	13.000	10.500	175.000,0	Pusat, Aceh, Bandung, Bajarbaru, Denpasar, Jakarta, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Surabaya, Tanjung Pinang, Yogyakarta	BP2MI
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.3 Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.7.4 Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain)											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	4978.RBB.010	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	0	-	-	-	0,0	Pusat	Kemen PUPR
			Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Unit	-	3.000	4.500	4.500	1.125.000,0	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.001	PSU Rumah Umum	Unit	40.000	-	-	-	288.812,3	Pusat	Kemen PUPR
			Pembangunan PSU Perumahan Bagi MBR	Unit	-	20.500	-	-	169.500,0	34 Provinsi	Kemen PUPR
			Pembangunan PSU Perumahan	Unit	-	-	71.950	71.955	3.905.000,0	34 Provinsi	Kemen PUPR
		4978.RBB.007	Bantuan Perumahan Swadaya Sejahtera	Unit	-	-	PM	PM	PM	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	114.000	-	-	-	2.315.715,0	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.009	Bantuan Perumahan Swadaya Usaha	Unit	900	-	-	-	51.500,0	Pusat	Kemen PUPR
			Bantuan Perumahan Swadaya Usaha (PEN)	Unit	-	0	-	-	0,0	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	Unit	1.134	-	-	-	1.165.002,3	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	Unit	-	1.601	-	-	785.509,3	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.010	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja (PEN)	Unit	-	29	-	-	184.709,5	Kab. Batang	Kemen PUPR
		4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	Unit	2.831	-	-	-	1.371.063,2	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	Unit	-	178	-	-	117.950,0	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4978.RBB.002	Rumah Khusus	Unit	2.423	-	-	-	548.443,9	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Khusus	Unit	-	2.481	-	-	368.840,2	Pusat	Kemen PUPR
		4978.RBB.011	Rumah Khusus (PEN)	Unit	-	0	-	-	0,0	Pusat	Kemen PUPR
		4978.CBB.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	Unit	2.278	-	-	-	861.865,3	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi			0	-	-	0,0	Pusat	Kemen PUPR
		4978.CBB.006	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	2.040				443.744,6	Pusat	Kemen PUPR
			Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan			21	-	-	4.687,0	Kab. Bangka	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs:											
11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik											
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum											
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	4637.QAH.004	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)	Layanan	10	12	15	21	500.000,0 (TA 2021)	Pusat	Kemenhub
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	4639.RAC.053	Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Unit	33	33	33	33	776.400,0 (TA 2021)	Pusat	Kemenhub
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4641.QAH.007	Subsidi Perintis LRT Sumatera Selatan	Layanan	1	-	-	-	114.063,5	Sumatera Selatan	Kemenhub
		4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	Panjang jalur yang dibangun (km)	13,09	4,53	-	-	389.725,0 (TA 2021)	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	Km	26,6	-	-	-	439.769,1	Kabupaten Sukabumi	Kemenhub
		4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	Km	33	-	-	-	246.157,8	Kabupaten Mojokerto	Kemenhub
		4641.RBA.013	Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - Siantar	Km	35	-	-	-	64.000,0	Sumatera Utara	Kemenhub
		4641.RBA.014	Peningkatan Jalur KA R42 Lintas Lahat - Lubuklinggau Segmen Bungamas - Lubuklinggau	Km	44,73	44,53	-	-	246.783,8 (TA 2021)	Lubuk Linggau	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4641.RBA.015	Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak	Km	34,13	-	-	-	160.000,0	Kabupaten Serang	Kemenhub
		4641.RBA.016	Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung - Banjar	Km	52	-	-	-	25.834,4	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.017	Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar - Kroya	Km	28,75	-	-	-	24.000,0	Jawa Tengah	Kemenhub
		4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	Km	20,06	16,35	-	-	153.972,5 (TA 2021)	Kabupaten Padang Pariaman	Kemenhub
		4641.RBA.019	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	Km	40,72	-	-	-	230.550,0	DKI Jakarta	Kemenhub
		4641.RBA.021	Penggantian Sistem Persinyalan Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan	Km	0,65	0,66	-	-	57.000,0 (TA 2021)	DIY	Kemenhub
		4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	Km	25,5	25,5	-	-	518.300,0 (TA 2021)	Pusat	Kemenhub
		4641.RBA.023	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	Km	3,5	-	-	-	152.125,0	Kota Surakarta	Kemenhub
		4641.RBA.035	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	Km	1	-	-	-	1.000,0	DKI Jakarta	Kemenhub
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	4643.RBA.001	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	Km	46,8	-	-	-	2.515.001,7	Kota Palembang	Kemenhub
		4643.RBA.002	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	Km	4	-	-	-	334.086,4	DKI Jakarta	Kemenhub
		4643.RBA.006	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang	Km	3,8	-	-	-	170.000,0	DKI Jakarta	Kemenhub
		4643.PBF.001	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I (PHLN)	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	89.505,2	Pusat	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2021	2022	2023	2024				
		4643.RBA.001	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	Km	46,8	-	-	-	2.515.001,6	Kota Palembang	Kemenhub	
4648	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	4648.RBA.001	Elevated Loopline Provinsi DKI Jakarta	PM	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub	
		4648.RBA.002	Elevated Loopline Provinsi Jawa Barat	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub	
		4648.RBA.003	Elevated Loopline Provinsi Banten	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub	
		4648.RBL.001	Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4648.RBL.002	Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jakarta	Kemenhub
		4648.RBL.003	Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4648.RBL.004	Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4648.RBP.001	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jakarta	Kemenhub
		4648.RBP.002	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4648.RBP.003	Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
4649	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	4649.RAC.001	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan/ Integrated Land Transport System Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub	
		4649.RAC.002	Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek	Unit	1	-	-	-	15.372,0	Banten	Kemenhub	
		4649.RAC.003	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan/ Integrated Land Transport System Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub	

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		4649.RAC.004	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan/ Integrated Land Transport System Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4649.RAC.005	Sistem BRT Feeder Transportasi Umum Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub
		4649.RAC.006	Sistem BRT Feeder Transportasi Umum Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4649.RAC.007	Sistem BRT Feeder Transportasi Umum Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4649.RAC.008	Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (Termasuk ERP) Jabodetabek Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub
		4649.RAC.009	Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (Termasuk ERP) Jabodetabek Provinsi Jawa Barat	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Jawa Barat	Kemenhub
		4649.RAC.010	Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (Termasuk ERP) Jabodetabek Provinsi Banten	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Banten	Kemenhub
		4649.RBP.001	Terminal Tipe A Jatijajar	Jumlah Terminal Type A yang di bangun (terminal)	PM	PM	PM	PM	14.107,0	Jawa barat	Kemenhub
		4649.RBP.002	Terminal Tipe A Pondok Cabe	Jumlah Terminal Type A yang di kembangkan (terminal)	PM	PM	PM	PM	48.120,0	Banten	Kemenhub
4650	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	4650.RAC.001	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi DKI Jakarta	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	DKI Jakarta	Kemenhub
		4650.RAC.002	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Jawa Barat	Unit	6	-	-	-	PM	Jawa Barat	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4650.RAC.003	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Banten	Unit	3	-	-	-	PM	Banten	Kemenhub
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5433.PCD.002	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Hektar	600	600	600	600	261.743,0	Pusat	Kemen LHK
		5433.QAH.001	Penyiapan Lahan Ibu Kotad dari Kawasan Hutan	Layanan	1	1	1	-	6.000,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
		5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	169.698,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (6 Taman Nasional Situs Warisan Dunia)	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	11.964,0	TN Ujung Kulon, TN Gunung Leuser, TN Sembilang, TN Komodo, TN Kerinci Seblat, TN Lorentz	Kemen LHK
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif											
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	4314.RBN.003	Ruang dan Sarana Kreatif untuk Cultural Heritage Regeneration	Unit	1	2	3	4	20.918,1	Semarang (TA 2021)	Kemenparekraf
4324	Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania)	4324.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Promosi	1	1	1	1	111.284,5	Pusat	Kemenparekraf
4325	Pemasaran Pariwisata Regional II (Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah)	4325.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Promosi	1	1	1	1	40.802,5	Pusat	Kemenparekraf
4326	Pemasaran Pariwisata Regional III (Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika)	4326.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Promosi	1	1	1	1	194.538,7	Pusat	Kemenparekraf

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
023.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan											
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	4275.QMA.001	Warisan Budaya yang Ditetapkan	Unit	227	409	409	409	34.640,0	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
		4275.RBN.003	Museum yang Dibangun	Unit	4	0	0	0	55.000,0	Museum PDRI Sumbar, Museum NatunaKep. Riau, Museum Maritim Kep. Babel, Museum Samudera Pasai Aceh	Kemendikbud Ristek
		4275.RDN.002	Warisan Budaya yang Dilindungi	Unit	51	26	51	51	117.005,4	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
5178	Pengelolaan Permuseuman	5178.RDN.001	Koleksi Museum yang Dikelola	Unit	57.351	48.318	57.351	57.351	26.325,9	DKI Jakarta (Museum Munasprok, Museum Basuki Abdullah, Museum Nasional, Museum Kitnas, Museum Sumpah Pemuda), DIYogyakarta (Museum Benteng Vredeburg), Jawa Barat (Museum Kepresidenan RI Balai Kirti)	Kemendikbud Ristek
5179	Pelestarian Nilai Budaya	5179.QMA.003	Karya Budaya yang Dilestarikan	Unit	1.294	770	1.294	1.294	36.484,5	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	5181.RDN.015	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	3.785	3.900	3.785	3.785	509.531,8	34 provinsi	Kemendikbud Ristek
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4971	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	4971.CBN.001	Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana	Unit	3	-	-	-	114.369,6	Pusat	Kemen PUPR
			Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana	Unit	-	0	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
		4971.CBN.003	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	Unit	7	-	-	-	224.228,2	Pusat	Kemen PUPR
			Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	Unit	-	4	-	-	37.473,1	Kab. Rembang, Kota Semarang, Kab. Ngawi, Kab. Barito Kuala	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4285	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat	4285.UAC.001	Pengelola infrastruktur darurat	Personil	100	100	100	100	6.100,0	34 provinsi	BNPB
4287	Layanan pusat pengendalian operasi	4287.UAC.001	Pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan	Personil	105	105	105	105	8.200,0	Pusat	BNPB
3891	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat	3891.QEE.003	Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Kegiatan	10	10	10	10	1.056.400,0	34 provinsi	BNPB
4286	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	4286.UAC.002	Pendamping penanganan korban dan pengungsi	Orang	570	570	570	570	56.000,0	34 provinsi	BNPB
024.WA Program Dukungan Manajemen											
2044	Pengelolaan Krisis Kesehatan	2044.QHC.001	Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan	Operasi	35	35	35	35	19.798,0	Kabupaten/ Kota terdampak bencana dan DTPK	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4288	Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	4288.QEE.001	Pemenuhan kebutuhan logistik PB	Kab/Kota	33	33	33	33	89.341,1	33 Provinsi	BNPB
		4288.QEG.001	Bantuan Peralatan/Sarana	Kab/Kota	103	102	101	101	186.462,8	514 Kab/Kota	BNPB
4289	Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan PB	4289.QEE.001	Distribusi Logistik dan Peralatan PB	Paket	5	5	5	5	52.200,0	33 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs:											
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya											
11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola											
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.RBB.006	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	KK	50.000	40.917	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	Unit	-	-	2	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
		4840.RBB.007	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	KK	1.137.407	-	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
			Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	KK	-	10.005	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
	4840.RBB.008		Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	KK	16.250	-	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	KK	-	1.001	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
	4840.RBB.009		Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan	KK	22.022	-	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan	KK	-	10.001	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
	4840.RBB.013		Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	KK	-	21.200	-	-	PM	Pusat	Kemen PUPR
			Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Unit	-	-	565	565	691.000,0	120 kab/kota	Kemen PUPR
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.BDG.001	Pembinaan dan Fasilitas Bank Sampah	UMKM	150	1.500	1.500	1.500	67.840,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDH.001	Fasilitas penerapan EPR untuk pengurangan sampah	Badan Usaha	15	30	30	30	7.709,6	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.001	Fasilitas dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	35	80	80	80	36.717,2	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.002	Fasilitas dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	35	80	80	80	65.488,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.003	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	310	320	330	350	148.386,7	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	Unit	7	7	7	7	80.000,0	Tersebar (34 Provinsi)	Kemen LHK
		5456.RAG.002	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	Unit	5	20	20	20	180.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5456.RAG.003	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	Unit	4	6	6	6	29.325,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM10											
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6033.QMA.001	Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	Layanan	500	500	500	500	159,9	34 Provinsi	Kemen LHK
		6033.RAG.002	Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Unit	12	27	30	35	249.100,0	Tersebar	Kemen LHK
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	20,5	34 provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	33 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Propinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	90.299	90.299	90.299	6.336.009,7	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	3130.BHB.004	Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	Operasi	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.710.266,8	Pusat dan Daerah	POLRI
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	5076.BKA.002	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Laporan	578.772	578.772	578.772	578.772	4.069.919,2	Pusat dan Daerah	POLRI
		5076.BKA.003	Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Laporan	1.557.317	1.557.317	1.557.317	1.557.317	788.404,7	Pusat dan Daerah	POLRI

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS										
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup										
5436 Pencegahan Dampak Lingkungan	5436.UBA.001	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	15	15	15	15	51.300,0	34 provinsi	Kemen LHK
056.IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
4405 Kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II	4405.PBT.021	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Kalimantan	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	0	0	0	0	1.200,0	Kalimantan	Kemen ATR/BPN
	4405.PBT.022	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Maluku	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	2	2	2	2	2.000,0	Maluku	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.021	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Kalimantan	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	0	0	0	0	1.200,0	Kalimantan	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.022	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Maluku	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	2	2	2	2	2.000,0	Maluku	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.023	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Kepulauan Nusa Tenggara	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	4	4	4	4	4.000,0	Nusa Tenggara	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.024	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Papua	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	1	1	1	1	1.000,0	Papua	Kemen ATR/BPN
	4405.ABT.025	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Sulawesi	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	9	9	9	9	9.000,0	Sulawesi	Kemen ATR/BPN
5541 Kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I	5541.ABT.009	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Sumatera	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	15	15	15	15	15.000,0	Sumatera	Kemen ATR/BPN
	5541.ABT.010	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa Bali	Persub RTRW Prov/Kab/Kota	13	13	13	13	13.000,0	Jawa Bali	Kemen ATR/BPN

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.401	Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)	Cekungan Air Tanah (CAT)	13	13	13	13	221.667,4	Tersebar	Kemen ESDM
6346	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi	6346.ABS.307	Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi	Rekomendasi	9	9	9	9	8.089,7	Pusat	Kemen ESDM
		6346.ABS.308	Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana Geologi	Wilayah	60	60	65	65	2.598,7	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.DDB.310	Teknologi dan Instrumentasi Kebencanaan Geologi	Purwarupa	2	2	2	2	3.978.485,0	Pusat	Kemen ESDM
		6346.PBS.201	Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	Lokasi	17	17	17	17	245.626,4	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.PBS.202	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan	Pos Pengamanan Gunung Api	13	14	14	14	140.292,1	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.PBS.206	Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi	Peta	20	20	20	20	11.556,6	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.ABS.203	Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi (Erupsi Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami dan Gerakan Tanah)	Rekomendasi	148	148	176	176	50.897,9	Pusat	Kemen ESDM
		6346.ABS.204	Sosialisasi dan Informasi Mitigasi Bencana Geologi	Wilayah/ Kabupaten	29	29	39	39	30.121,5	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.ABS.309	Data dan Informasi Hasil Penyelidikan, Penelitian, Pengembangan Metode dan Analisis Laboratorium Kebencanaan Geologi	Layanan Data	22	22	22	22	33.171,5	Pusat	Kemen ESDM
		6346.PBS.412	Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (PATGTL)	Rekomendasi	2	2	2	2	62.159,0	Tersebar	Kemen ESDM
		6346.PBS.413	Rekomendasi Penyelidikan Geologi Terpadu untuk Penataan Ruang	Rekomendasi Kebijakan	2	4	4	4	29.752.675,8	Pusat	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika											
3350	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	3350.QAH.003	Layanan peringatan dini cuaca dengan <i>Scalling Up Weather Capacity II</i>	Layanan	3	24	34	34	346.200,0	34 Provinsi	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.QAH.003	Layanan Informasi Meteorologi Maritim (<i>Strengthening of Marine Meteorology</i>)	layanan	20	20	20	20	1.792.300,0	100 Pelabuhan	BMKG
3349	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG	3349.QAH.002	pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (<i>windshear</i>)	Bandara	3	3	4	4	278.500,0	14 Bandara	BMKG
3345	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	3345.QAH.001	Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas	Layanan	110	50	25	0	1.441.271,0	34 Provinsi	BMKG
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	5406.BDB.001	Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	1	1	21.000	Pusat	Kemen LHK
		5406.QDB.001	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400	34 Provinsi	Kemen LHK
		5406.UAB.001	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	Sistem Informasi	1	1	1	1	71.400	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.020	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Provinsi	10	17	24	34	12.562,5	Tersebar	Kemendagri
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Provinsi	34	34	34	34	2.100,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	Daerah	133	133	133	133	7.247,5	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.005	Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat	Daerah	34	34	34	34	1.000,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1241	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1241.UBA.001	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	Daerah	13	13	13	13	7.200,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBR.001	<i>Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2)</i> yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	33.330,1	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBR.002	<i>Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II</i> yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	19.500,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBR.003	Dokumen desain Pengendalian banjir upper Citarum yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	10.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.004	<i>Engineering service project</i> Batam dan Bintan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBR.005	<i>Engineering service project</i> di Pulau Bangka yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Bangka Belitung	Kemen PUPR
		5037.RBR.006	<i>Engineering service project</i> di Sungai Cipunegara yang dibangun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.007	<i>Engineering service project</i> Sungai Siak yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Riau	Kemen PUPR
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3893	Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
		3893.QMB.002	Budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
3882	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Banjir dan Gunungapi	Lokasi	2	2	2	2	2.400,0	Pusat	BNPB
103.WA Program Dukungan Manajemen											
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB di daerah	Orang	760	760	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	1	1	1	1	1.892,0	Pusat	Kemen LHK
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4971	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	4971.UBA.002	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	509	-	-	-	139.038,7	Pusat	Kemen PUPR
		4971.UBA.002	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	513	-	-	81.408,5	Pusat	Kemen PUPR
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Kab/Kota	-	-	48	48	480.000,0	Kawasan Metropolitan	Kemen PUPR
		4971.CBN.003	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	unit	7	-	-	-	224.228,2	Pusat	Kemen PUPR
		4971.CBN.003	Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional	unit	-	4	-	-	37.473,1	Kab. Rembang, Kota Semarang, Kab. Ngawi, Kab. Barito Kuala	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan											
018.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5885.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Unit	7.034	5.700	5.700	5.700	2.195.984,0	Pusat	Kementan
		5885.RAG.002	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Unit	143	144	143	143	92.610,0	Pusat	Kementan
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5887.RAG.010	Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	75	75	60	60	56.100,0	Pusat	Kementan
		5887.RAG.011	Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	200	200	136	136	80.512,0	Pusat	Kementan
		5887.CAG.012	Sarana Pemasaran Hortikultura	Unit	100	100	100	100	20.000,0	Pusat	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5887.RBK.010	Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	185	185	60	60	234.600,0	Pusat	Kementan
		5887.RBK.011	Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	250	250	102	101	172.500,0	Pusat	Kementan
		5887.CBK.012	Prasarana Pemasaran Hortikultura	Unit	40	40	40	40	12.500,0	Pusat	Kementan
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	200	315	189	189	113.531,0	Pusat, 93 Kab/Kota	Kementan
		5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	735	800	726	726	551.818,0	Pusat, 226 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	194	170	208	208	217.375,0	Pusat, 103 Kab/Kota	Kementan
		5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	680	726	726	726	275.760,0	Pusat, 226 Kab/Kota	Kementan
		5887.RBK.012	Rantai Dingin Holtikultura	Unit	300	300	300	300	532.500,0	Pusat	Kementan
4580	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	4580.SDB.001	Model Pertanian Modern	Purwarupa	1	1	1	1	37.200,0	Pusat	Kementan
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	4584.SDA.513	Teknologi Mekanisasi Pertanian	Produk	13	6	6	6	32.500,0	Pusat	Kementan
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	36.717,2	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.002	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	65.488,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.003	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	310	320	330	350	148.386,7	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDG.001	Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	UMKM	150	1.500	1.500	1.500	67.840,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDH.001	Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah	Badan usaha	15	30	30	30	7.709,6	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	2358.QEG.001	Chest freezer penyimpanan ikan	Unit	300	500	500	500	14.500,0	Pusat	KKP
		2358.RBQ.001	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	Unit	2	2	2	2	40.600,0	Pusat	KKP
2356	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	2356.RBQ.001	Gudang Beku	Unit	1	1	1	1	99.901,0	Pusat	KKP
		2356.QEG.001	Gudang Beku Portable	Unit	15	12	20	20	234.500,0	Pusat	KKP
		2356.QEG.002	Mobil refrigasi (berpendingin)	Unit	9	31	41	51	105.125,0	Pusat	KKP
		2356.QEG.003	Mobil nonrefrigasi (tidak berpendingin)	Unit	6	10	10	10	11.340,0	Pusat	KKP
		2356.RBQ.002	Pabrik Es	Unit	4	4	10	10	140.000,0	Pusat	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs:											
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya											
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri											
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5452	Pengelolaan B3	5452.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK	Unit	2	8	9	5	70.100,0	25 provinsi	Kemen LHK
		5452.ABJ.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	Rekomendasi Kebijakan	4	5	5	5	5.775,0	Pusat	Kemen LHK
		5452.FAB.001	Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	Sistem Informasi	1	1	1	1	3.150,0	Pusat	Kemen LHK
5393	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	5393.PDF.001	Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	Lembaga	2	7	7	8	12.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5393.BJA.001	Penyidikan dan Pengujian Produk pada Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup	Produk	100	100	100	100	2.564,2	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5393.BJB.001	Penyidikan dan Pengujian Peralatan Laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang akurat dan ketertelusuran pengukuran	Unit	200	200	200	200	1.099,0	Pusat	Kemen LHK
020.JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara											
6355	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	6355.ABI.004	Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	83.498,0	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5454	Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5454.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	Unit	4	8	8	7	549.200,0	32 provinsi (diutamakan kota ibukota provinsi)	Kemen LHK
		5454.ACD.001	Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Institusi	400	500	500	500	59.508,5	Pusat	Kemen LHK
		5454.BDI.001	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	Industri	4.000	4.000	4.000	4.000	28.449,3	Pusat	Kemen LHK
5455	Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	5455.QAH.001	Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	Layanan	2	2	2	2	560.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5455.BDI.001	Pembinaan dan Supervisi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi	Industri	8	30	35	35	33.200,0	Pusat	Kemen LHK
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6078	Pengembangan Industri Hijau	6078.ABK.002	Kajian Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.928,5	Pusat	Kemenperin
		6078.ABK.003	Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.400,0	Pusat	Kemenperin
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.PEF.004	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes	Orang	600	1.000	1.500	2.000	70.000,0	34 Prov/ 514 Kab/Kota	Kemenkes

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5834.UBA.004	Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes	Kab/Kota	514	514	514	514	300.000,0	34 Prov/ 514 Kab/Kota	Kemenkes
020.JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara											
6355	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	6355.ABI.004	Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	83.498,00	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang											
5456	Pengelolaan Sampah	5456.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	36.717,2	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.002	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	35	80	80	80	65.488,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.FBA.003	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	310	320	330	350	148.386,7	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDG.001	Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	UMKM	150	1.500	1.500	1.500	67.840,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.BDH.001	Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah	Badan usaha	15	30	30	30	7.709,6	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	Unit	7	7	7	7	80.000,0	Tersebar (34 Provinsi)	Kemen LHK
		5456.RAG.002	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	Unit	5	20	20	20	180.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5456.RAG.003	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	Unit	4	6	6	6	29.325,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya											
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001											
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6078	Pengembangan Industri Hijau	6078.BDI.001	Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau	Industri	5	5	5	5	3.137,7	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6078.BIC.001	Hasil Penilaian dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Lembaga	10	10	10	10	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.BKB.001	Hasil Pengendalian dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau	Produk	1	1	1	1	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.PFA.001	Rancangan Standar Industri Hijau	NSPK	5	6	8	10	11.950,0	Pusat	Kemenperin
		6078.ABK.002	Kajian Peningkatan Penerapan Manajemen Energi, Manajemen Air, dan pemanfaatan EBT sektor industri	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	5.350,0	Pusat	Kemenperin
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	20.450,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDI.002	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Industri	2.625	3.000	3.375	3.750	75.814,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDI.003	Layanan Penilaian Kinerja Industri Pertambangan dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Industri	85	90	110	113	11.350,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDI.004	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Industri	350	400	450	500	6.515,0	Pusat	Kemen LHK
		6034.QDH.001	Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	Badan usaha	25	30	40	50	10.200,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs:											
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi											
12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah											
12.7.1.(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
106.CJ Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Nasional											
6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ	6323.ABK.131	Rekomendasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Usaha dalam PBJP	Rekomendasi Kebijakan	1	2	4	4	2.827,0	Pusat	LKPP
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
029.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	5443.DCE.001	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	Orang	1.530	1.530	1.530	1.530	18.360,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5443.QDB.001	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	Lembaga	365	365	365	365	14.760,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum dan Air Limbah	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	412	412	412	412	11.413,2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri/ Pemerintah Daerah
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.BEG.001	PLT EBT (Revitalisasi)	Unit	5	0	5	5	370.474,4	Kab. Nias Utara, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Tanggamus, Kab. Kotabaru, Kab. Kolaka Timur, Kab. Manokwari, Kab. Lanny Jaya	Kemen ESDM
		6353.BEG.002	PLTS Penunjang Tugas Teknis K/L	Unit	25	0	23	23	200.904,1	DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua	Kemen ESDM
		6353.QEG.001	PLTS Rooftop	MWp/ Unit	35,88	38,53	10/300	10/300	1.165.877,8	34 Provinsi	Kemen ESDM
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PBI.003	Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Wilayah	0	-	4	3	2.957,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.PBI.004	Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	8	0	11	12	72.810,0	Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kab. Lebak, Kab. Lombok Timur, Kab. Ngada, Kab. Donggala, Kab. Tana Toraja, Kab. Halmahera Barat	Kemen ESDM
		6352.QIA.003	Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	Persen	35	35	33,0	35,0	4.050,0	Pusat	Kemen ESDM
		6352.QIA.002	Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT	Persen	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	PLTA (70) PLTS (40) PLTB (40)	2.583,6	Pusat	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6352.QIA.001	Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	Persen	40,0	40,0	40,0	40,0	2.140,0	Pusat	Kemen ESDM
		6352.PBI.001	Volume Biofuel untuk Domestik	Juta KL	9,2	9,6	10,4	14,2	15.918,5	Pusat	Kemen ESDM
		6352.ABI.002	Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi	MW	12,0	30,3	159,0	252,6	4.553,4	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.ABI.001	Pengembangan Biomassa dan Biogas	Pemanfaatan Biogas (Ribu M3/ Tahun)	28.342	29.314	33.770,0	35.390,0	6.317,8	Tersebar	Kemen ESDM
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBI.001	Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Rekomendasi	1	1	1	1	15.067,3	Pusat	Kemen ESDM
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>											
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif											
4313	Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan	4313.PEA.002	Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan	1	1	1	1	18.198,4	Pusat	Kemenparekraf
		4313.PEA.003	Lomba Konsep Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Kegiatan	3	3	3	3	21.231,5	Pusat	Kemenparekraf
4329	Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan	4329.BDC.004	Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Produk Wisata	Orang	2.500	2.500	2.500	2.500	52.713,7	Pusat	Kemenparekraf
		4329.PBK.002	Pola Perjalanan Wisata	Rekomendasi Kebijakan	18	18	18	18	87.856,2	Pusat	Kemenparekraf
		4329.PBK.004	Produk Wisata	Rekomendasi Kebijakan	15	15	15	15	25.101,8	Pusat	Kemenparekraf
4330	Pengembangan Wisata Minat Khusus	4330.QDB.001	Fasilitasi pengembangan produk dan aktivitas wisata minat khusus	(Lembaga/ kelompok masyarakat)	0	1	1	2	6.000,0	PM	Kemenparekraf
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	6264.PBI.400	Koordinasi strategis implementasi Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark yang terintegrasi SDGs	Dokumen	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kementerian PPN/Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.606	Warisan Geologi yang ditetapkan	Lokasi	4	4	4	4	10.200,0	Pusat	Kemen ESDM
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	NSPK	32	-	-	-	6.114,0	Pusat	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6760	Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6760.PFA.051	Standar Instrumen LHK	NSPK	-	4	12	12	12.400,0	Pusat	Kemen LHK
6759	Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	6759.PFA.001	Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup	NSPK	-	1	6	8	13.960,0	Pusat	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
6761	Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6761.PFA.051	Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	NSPK	-	1	4	6	18.508,0	Pusat	Kemen LHK
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	Kelompok UMKM	200	-	-	-	-	Pusat	Kemen LHK
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM kehutanan	UMKM	-	150	100	100	-	Pusat	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
6762	Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6762.PFA.051	Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	NSPK	-	1	5	8	9.810,0	Pusat	Kemen LHK
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1237.PEC.015	Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	Kerja sama	3	3	3	3	4.936,7	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri/ Pemerintah Daerah
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2363.QEG.001	Sarana prasarana Wisata Bahari	Unit	15	14	16	18	51.956,0	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 12.c.1* (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil										
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan										
6352 Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	Peralatan/ Produk	2	1	0	0	1.927,9	Pusat	Kemen ESDM
	6352.QIC.001	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM	Juta Ton	67	91	116	142	5.518,0	Pusat	Kemen ESDM
6350 Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBJ.001	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Rekomendasi	1	1	1	1	9.000,0	Pusat	Kemen ESDM
015.CB Program Pengelolaan Belanja Negara										
4778 Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4778.FAD.007	Nota Keuangan APBN/P	Dokumen	1	1	1	1	5.311,1	Pusat	Kemenkeu
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.1.(a) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang										
Kegiatan Inti										
103.FA Program Ketahanan Bencana										
3893 Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	3893.QEG.001	Jumlah kegiatan prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang ditingkatkan	lokasi	10	10	10	10	58,0	34 Provinsi	BNPB
4288 Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB	4288.QEE.001	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan logistik PB	Paket	33	33	33	33	89.341,1	33 Provinsi	BNPB
	4288.QEG.001	Jumlah unit pemenuhan kebutuhan peralatan PB	Unit	139	36	165	180	186.462,8	514 Kab/Kota	BNPB
4289 Distribusi Logistik dan Peralatan PB	4289.QEE.001	Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB (kegiatan)	kegiatan	5	1	5	5	5.220,0	34 Provinsi	BNPB
3882 Penguatan Desa Tangguh Bencana	3882.UBB.001	Jumlah Penguatan Desa Tangguh Bencana	desa	120	90	120	120	47.100,0	34 provinsi	BNPB
4283 Satuan Pendidikan Aman Bencana	4283.QDC.001	Jumlah masyarakat yang difasilitasi dan dibina	Orang	320	320	320	320	19.500,0	34 provinsi	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
Sarana Pendukung (Means of Implementation)											
103.FA Program Ketahanan Bencana											
4285	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Dukungan Infrastruktur Darurat	4285.UAC.001	Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	100	100	100	6.100,0	34 Provinsi	BNPB
4287	Layanan Pusat Pengendalian Operasi	4287.UAC.001	Jumlah personil yang mendapat pendampingan teknis SKPDB dan keposkoan	Orang	105	105	105	105	8.200,0	Pusat	BNPB
3891	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Dukungan Sumber Daya Darurat	3891.QEE.003	Jumlah kegiatan dalam Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Paket	10	30	10	10	1.056.400,0	34 Provinsi	BNPB
4286	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi	4286.UAC.002	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi	Orang	570	570	570	570	56.000,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.1.(b) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	2345.RAL.001	Sarana Kawasan Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	Unit	120	120	120	120	552.850,0	10 provinsi	KKP
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	Unit	97	75	90	110	180.607,2	34 provinsi	KKP
		2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	Unit	750	1.000	1.250	1.500	111.311,5	7 Lokasi	KKP
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2363.QAH.001	Layanan Perizinan Reklamasi	layanan	5	5	5	5	11.410,1	Daerah	KKP
032.HB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2344.QEG.003	Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (SBK)	Unit	200	250	450	500	51.200,0	Jatim, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Sulsel	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim											
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBR.001	Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2) yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	33.330,1	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBR.002	Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	19.500,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBR.003	Dokumen desain Pengendalian banjir upper Citarum yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	10.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.004	Engineering service project Batam dan Bintan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBR.005	Engineering service project di Pulau Bangka yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Bangka Belitung	Kemen PUPR
		5037.RBR.006	Engineering service project di Sungai Cipunegara yang dibangun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.007	Engineering service project Sungai Siak yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Riau	Kemen PUPR
Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan											
2428	Riset Kelautan	2428.PBR.002	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir (kawasan)	kawasan	10	12	12	13	25,00	34 provinsi	KKP
		2428.PBR.003	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP (paket)	paket	2	3	4	4	10,00	11 WPP	KKP
018.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1810.QDB.001	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Unit	240	240	240	240	29,90	Pusat, 7 Provinsi	Kementan
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1812.QDB.001	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang terfasilitasi	Unit	5.646	5.646	5.646	5.646	69,6	34 Provinsi	Kementan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1812.QDD.002	Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan	Unit	100	100	100	100	61,1	34 Provinsi	Kementan
018.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Ha	1.245	1.245	1.245	1.245	84,7	15 Provinsi	Kementan
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas											
1773	Perlindungan Hortikultura	1773.BDD.010	Penerapan PHT	Kelompok	180	180	180	180	48,2	30 Provinsi	Kementan
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1794.RBK.001	Irigasi Perpipaan	Unit	138	138	138	138	84,3	21 Provinsi	Kementan
		1794.RBK.002	Embung Pertanian	Unit	400	400	400	400	254,8	31 Provinsi	Kementan
		1794.RBK.003	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Unit	200	200	200	200	134,2	Pusat dan 22 provinsi	Kementan
		1794.RDK.001	Jaringan Irigasi Tersier	Ha	269.884	269.884	269.884	269.884	1.536,0	32 Provinsi	Kementan
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1795.PBR.001	Survei Investigasi dan Desain Cetak Sawah	Dokumen	10	10	10	10	31,9	10 Provinsi	Kementan
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	3994.RBK.001	Asuransi Pertanian	Hektar	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	779,80	Pusat dan 24 Provinsi	Kementan
		4580.RAI.001	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Ha	100.000	100.000	100.000	100.000	1.353,8	33 provinsi	Kementan
		4580.RAI.002	Areal Penanganan DPI	Lokasi	5.000	5.000	5.000	5.000	303,9	31 Provinsi	Kementan
		4580.SDB.001	Model Pertanian Modern	Model	1	1	1	1	82,9	Jawa Barat	Kementan
018.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
1801	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1801.DDA.502	Diseminasi Teknologi Pertanian	Teknologi	3	3	3	3	23,2	1 Provinsi	Kementan
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	4584.DDA.505	Peta Sumberdaya Lahan Pertanian	Peta	50	50	50	50	31,7	1 Provinsi	Kementan
		4584.SDA.513	Teknologi Mekanisasi Pertanian	Teknologi	8	8	8	8	36,0	1 Provinsi	Kementan
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	4639.RAC.061	Kapal Patroli/Multipurpose (Prioritas Nasional)	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Pusat	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4639.RAC.064	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar Prioritas Nasional	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Pusat	Kemenhub
4658	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	4658.CAE.001	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Unit	24	24	24	24	1.086.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.CAE.002	Telekomunikasi Pelayaran	Unit	19	19	19	19	482.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.CCE.001	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Unit	62	62	62	62	728.500,0	Pusat	Kemenhub
		4658.CCE.002	Telekomunikasi Pelayaran	Unit	20	20	20	20	670.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.RAE.001	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Prioritas Nasional	Unit	1	1	1	1	25.000,0	Pusat	Kemenhub
		4658.RAE.003	Telekomunikasi Pelayaran Prioritas Nasional	Unit	PM	PM	PM	PM	PM	Pusat	Kemenhub
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB/Wabah	Orang	532	200	200	200	3.016,4	Pusat	Kemenkes
		2058.QAH.008	Tindakan pengendalian pada KLB/wabah	Layanan	1	1	1	1	5.312,2	Pusat	Kemenkes
024.WA Program Dukungan Manajemen											
2044	Pengelolaan Krisis Kesehatan	2044.QHC.001	Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan	Operasi	35	35	35	35	19.798,0	Kabupaten/ Kota terdampak bencana dan DTPK	Kemenkes
029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
5446	Adaptasi Perubahan Iklim	5446.BDD.001	Kampung Iklim	Kelompok Masyarakat	195	200	250	325	15.525,8	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5408	Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	5408.RAG.001	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	Unit	188	-	-	-	2.931,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5408.RBK.001	Danau dan Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	Unit	15	-	-	-	3.351,1	13 Provinsi	Kemen LHK
		5408.RBK.002	Mata Air yang Dipulihkan	Unit	75	-	-	-	2.452,8	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6738	Rehabilitasi Perairan Darat	6738.RAG.001	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	Unit	-	170	665	665	10.905,9	34 Provinsi	Kemen LHK
		6738.RBK.001	Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	Unit	-	15	15	15	5.878,5	13 Provinsi	Kemen LHK
		6738.RBK.002	Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	Unit	-	15	15	15	1.722,2	13 Provinsi	Kemen LHK
		6738.RBK.003	Mata Air yang Dipulihkan	Unit	-	50	142	142	7.314,0	34 Provinsi	Kemen LHK
6035	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	6035.REA.001	Lahan Gambut yang direstorasi pada 7 Provinsi	Hektar	300.000	-	-	-	413.638,6	7 provinsi	Kemen LHK
		6035.REA.002	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	Hektar	1.040	1.500	2.000	3.000	279.172,6	12 provinsi	Kemen LHK
		6035.REA.003	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	Hektar	30	90	148	148	59.252,7	34 provinsi	Kemen LHK
6765	Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	6765.REA.001	Lahan Gambut yang Direstorasi	Hektar	-	300.000	389.000	389.000	621.970,6	7 provinsi	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.QDB.001	Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	29	34	34	34	7.894.285,0	34 provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	230.000	230.000	230.000	3.467.711.742,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	1.917	5.000	5.000	5.000	172.851.911,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	109.622.989,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	41.444.378,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.005	Forest Program II	Unit	2	2	2	2	149.411.840,0	Tersebar	Kemen LHK
		5404.RAG.006	Forest Program III	Unit	1	1	1	1	39.148.176,0	Tersebar	Kemen LHK
5405	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	5405.RAG.001	Forest Programme IV Sulawesi Barat	Unit	3	3	3	3	63.849.936,0	Tersebar	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	39.019.950	77.500.000	77.500.000	77.500.000	591.769.414,0	Tersebar	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	36.250.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	29.481.767,0	Tersebar	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.002	Areaterbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	Rekomendasi Kebijakan	194.139	194.139	194.139	194.139	64.647.883,0	Tersebar	Kemen LHK
		5421.RAG.001	Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	Unit	1	1	1	1	8.108.820,0	Tersebar	Kemen LHK
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2428	Riset Kelautan	2428.RAL.002	Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	Unit	350	350	500	500	60.027,5	BROL-Perancak	KKP
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.QDD.002	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Kelompok Masyarakat	-	2	2	2	3,0	Daerah	KKP
		4346.RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	Unit	2	2	2	2	67,4	Daerah	KKP
		4346.REA.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Ha	400	200	400	400	127,4	60 Lokasi	KKP
		4346.REA.002	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	Ha	10	10	10	10	10.270,0	tersebar	KKP
032.HB Program Pengelolaan Ruang Laut											
2366	Perencanaan Ruang Laut	2366.PBR.001	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	4	5	5	5	19.538,9	10 Perairan Laut	KKP
		2366.PBR.002	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	5	3	4	5	22.880,5	75 Kawasan	KKP
		2366.PBR.003	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Rekomendasi Kebijakan	13	14	16	17	26.906,2	75 Kawasan	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
033.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
4202	Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	4202.SAB.002	Pendidikan Teknologi Konstruksi Bangunan Air	orang	174	225	275	350	9.380,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
2408	Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2408.RBS.001	Tanggul penahan lumpur yang ditingkatkan/ direhabilitasi	Km	1,9	2	2	2	47.992,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	5036.CBG.001	Daerah irigasi Baing yang dibangun	unit	3	3	3	3	32.250,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5036.CBG.012	Daerah irigasi Tilong yang direhabilitasi	unit	1	1	1	1	35.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5036.CBG.020	Bendung irigasi Air Nipis Seginim yang direhabilitasi	unit	1	1	1	1	20.014,4	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
		5036.CBG.021	Bendung irigasi Air Alas yang direhabilitasi	unit	1	1	1	1	2.525,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
		5036.CBS.005	Daerah irigasi Aimas yang direhabilitasi	Km	9,02	9,02	9,02	9,02	26.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5036.CBS.006	Daerah irigasi Amandit yang dibangun	Km	5	5	5	5	28.000,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.008	Daerah irigasi Batang Alai yang dibangun	Km	8,4	8,4	8,4	8,4	48.066,8	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.010	Daerah irigasi Bulucenrana yang direhabilitasi	Km	2,5	2,5	2,5	2,5	12.305,8	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5036.CBS.011	Daerah irigasi Dakaino yang dibangun	Km	6,3	6,3	6,3	6,3	22.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
		5036.CBS.012	Daerah irigasi DAS Tukad Oos yang ditingkatkan	Km	2,1	2,1	2,1	2,1	6.214,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
5036.CBS.015	Daerah irigasi DAS Tukad Sungai yang ditingkatkan	Km	2,1	2,1	2,1	2,1	5.820,3	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR		

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5036.CBS.022	Daerah irigasi Meko yang dibangun	Km	3	3	3	3	10.000,0	72-Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.023	Daerah irigasi Oransbari yang dibangun	Km	1,5	1,5	1,5	1,5	13.850,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.024	Daerah irigasi Paguyaman yang direhabilitasi	Km	3,5	3,5	3,5	3,5	11.930,6	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5036.CBS.025	Daerah irigasi Pitap yang dibangun	Km	3	3	3	3	29.699,4	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.CBS.027	Daerah irigasi rawa Kurik yang ditingkatkan	Km	17	17	17	17	45.000,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5036.CBS.028	Daerah irigasi rawa Petung yang ditingkatkan	Km	5	5	5	5	3.500,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.029	Daerah irigasi rawa Tanah Miring yang dibangun	Km	31,5	31,5	31,5	31,5	11.200,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5036.CBS.031	Daerah irigasi rawa Wapeko yang dibangun	Km	31,5	31,5	31,5	31,5	11.500,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5036.CBS.033	Daerah irigasi Salugan yang dibangun	Km	6,2	6,2	6,2	6,2	86.432,8	72-Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.042	Daerah irigasi Tutiling yang direhabilitasi	Km	6,34	6,34	6,34	6,34	16.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5036.CBS.044	Tunggakan Daerah irigasi Batang Alai	Km	1	1	1	1	11.724,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.CBS.046	Tunggakan Daerah irigasi Raknamo	Km	1	1	1	1	185.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.047	Tunggakan Daerah irigasi Tanju Kanan	Km	1	1	1	1	651.125,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.049	Jaringan irigasi SS Kedunggedel yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	20.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.CBS.051	DI Leuwigoong yang dibangun	Km	7,58	7,58	7,58	7,58	10.805,5	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.055	Daerah irigasi Leuwigoong yang ditingkatkan	Km	1	1	1	1	1.553,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.057	Daerah irigasi Cacaban yang direhabilitasi	Km	6,48	6,48	6,48	6,48	26.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.058	Daerah irigasi Tingal yang dibangun	Km	1,1	1,1	1,1	1,1	10.997,4	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.059	Daerah Irigasikarangtalun yang ditingkatkan	Km	9,8	9,8	9,8	9,8	20.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.060	Daerah irigasi Sukodono yang dibangun	Km	10	10	10	10	11.705,6	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.062	Daerah irigasi Gondang yang direhabilitasi	Km	20	20	20	20	20.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.CBS.063	Daerah irigasi Sungkur yang direhabilitasi	Km	8,49	8,49	8,49	8,49	20.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.064	Daerah irigasi Bendo yang ditingkatkan	Km	12,639	12,639	12,639	12,639	20.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.CBS.066	Daerah irigasi PanteLhong yang direhabilitasi	Km	4,154	4,154	4,154	4,154	7.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.CBS.069	Daerah irigasi Sei Padang yang ditingkatkan	Km	2,46	2,46	2,46	2,46	17.904,2	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5036.CBS.071	Daerah irigasi rawa Kota Baru Siberida yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	10.837,1	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5036.CBS.072	Daerah irigasi Osaka yang dibangun	Km	1	1	1	1	30.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5036.CBS.073	Daerah irigasi rawa Siak yang ditingkatkan	Km	2	2	2	2	45.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.CBS.074	Daerah irigasi Kerandin yang dibangun	Km	2,5	2,5	2,5	2,5	30.950,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5036.CBS.075	Daerah irigasi Batang Pangian yang dibangun	Km	2,1	2,1	2,1	2,1	16.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.076	Daerah irigasi Batang Bayang yang dibangun	Km	1	1	1	1	15.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.CBS.077	Daerah irigasi Limun Singkut yang direhabilitasi	Km	4,917	4,917	4,917	4,917	11.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.CBS.078	Daerah irigasi rawa Sei Cemara yang direhabilitasi	Km	25	25	25	25	13.570,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.CBS.079	Daerah irigasi rawa Dendang yang direhabilitasi	Km	20	20	20	20	10.450,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.CBS.082	Daerah irigasi Air Alas yang direhabilitasi	Km	4,5	4,5	4,5	4,5	15.000,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.CBS.091	Jaringan irigasi yang dibangun	Km	1	1	1	1	58.106,4	00-Pusat	Kemen PUPR
	5036.CBS.092	Jaringan irigasi yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	71.362,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5036.RBG.006	Bendung irigasi Serdang yang dibangun	unit	1	1	1	1	141.437,5	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5036.RBR.001	Dokumen desain Food estate yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	13.050,0	62-Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.001	Daerah irigasi Baliase yang dibangun	Km	86,93	86,93	86,93	86,93	154.150,4	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.004	Daerah irigasi Bubi yang dibangun	Km	12,4	12,4	12,4	12,4	58.429,9	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5036.RBS.005	Daerah irigasi Dataran Kotamobagu yang direhabilitasi	Km	29,5	29,5	29,5	29,5	10.050,3	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5036.RBS.006	Daerah irigasi DI Tingo (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	5,5	5,5	5,5	5,5	2.600,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.009	Daerah irigasi Kalukku yang dibangun	Km	5	5	5	5	58.831,5	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.012	Daerah irigasi Lembor (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	0,75	0,75	0,75	0,75	6.011,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5036.RBS.013	Daerah irigasi Maloso yang ditingkatkan	Km	10,235	10,235	10,235	10,235	62.156,6	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.015	Daerah irigasi Palaka (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	15,5	15,5	15,5	15,5	2.600,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.020	Daerah irigasi rawa Belanti I	Km	40	40	40	40	4.608,5	63-Provinsi	Kemen PUPR
	5036.RBS.021	Daerah irigasi rawa	Km	60	60	60	60	3.582,3	63-Provinsi	Kemen PUPR
	5036.RBS.028	Daerah irigasi Tapin (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	20,24	20,24	20,24	20,24	2.750,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.029	Daerah irigasi Tapin yang dibangun	Km	8	8	8	8	85.443,3	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.030	Daerah irigasi Tommo yang ditingkatkan	Km	7	7	7	7	35.998,4	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.031	Daerah irigasi Toraut yang direhabilitasi	Km	37,66	37,66	37,66	37,66	6.773,2	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5036.RBS.033	Daerah irigasi Wawotobi-Ameroro yang direhabilitasi	Km	2	2	2	2	33.775,3	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5036.RBS.036	Daerah irigasi Ciujung yang direhabilitasi	Km	46,0079	46,0079	46,0079	46,0079	140.702,1	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5036.RBS.037	Daerah irigasi Cibaliung yang direhabilitasi	Km	2,9	2,9	2,9	2,9	42.144,3	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5036.RBS.041	Jaringan irigasi SS Macan (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	14.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.RBS.046	Daerah irigasi DI Cikeusik (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	29.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.047	Daerah irigasi Rentang yang dimodernisasi	Km	115,1539	115,1539	115,1539	115,1539	809.981,3	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.048	Daerah irigasi Cikunten yang direhabilitasi	Km	21,71	21,71	21,71	21,71	43.657,8	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.049	Daerah irigasi Manganti yang direhabilitasi	Km	36,26	36,26	36,26	36,26	152.103,1	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.050	Daerah irigasi Manganti (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	48,34	48,34	48,34	48,34	13.400,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.060	Daerah irigasi Jragung yang direhabilitasi	Km	15,804	15,804	15,804	15,804	22.094,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.063	Daerah irigasi Serayu yang ditingkatkan	Km	41,6	41,6	41,6	41,6	210.094,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.064	Daerah irigasi Slinga yang dibangun	Km	5,6	5,6	5,6	5,6	162.200,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.065	Daerah irigasi Wadaslintang (IPDMIP) yang ditingkatkan	Km	2,2	2,2	2,2	2,2	10.549,4	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.066	Daerah irigasi Kedungputri (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	14	14	14	14	29.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.067	Daerah irigasi Banjarcahaya yang direhabilitasi	Km	5	5	5	5	600,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5036.RBS.068	Daerah irigasi SIM (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	13.677,1	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.RBS.069	Daerah irigasi Waduk Bening yang direhabilitasi	Km	3,2	3,2	3,2	3,2	37.730,6	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5036.RBS.070	Daerah irigasi Pekalen yang direhabilitasi	Km	12	12	12	12	24.976,5	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5036.RBS.075	Daerah irigasi Jambo Aye yang dibangun	Km	3,5	3,5	3,5	3,5	27.250,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.RBS.076	Daerah irigasi Lhokguci yang dibangun	Km	2,686	2,686	2,686	2,686	45.468,3	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.RBS.077	Daerah irigasi Baro Raya yang direhabilitasi	Km	5,28	5,28	5,28	5,28	49.800,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
	5036.RBS.083	Daerah irigasi Sei Ular (SIMURP) yang direhabilitasi	Km	1	1	1	1	9.500,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5036.RBS.084	Daerah irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan yang dibangun	Km	4,9	4,9	4,9	4,9	89.515,8	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.085	Daerah irigasi Batanghari yang ditingkatkan	Km	11	11	11	11	55.313,9	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5036.RBS.086	Daerah irigasi Batang Asai yang dibangun	Km	36,74	36,74	36,74	36,74	239.710,6	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5036.RBS.088	Daerah irigasi Air Ketahun yang direhabilitasi	Km	7,5	7,5	7,5	7,5	10.534,8	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.089	Daerah irigasi Air Seluma yang direhabilitasi	Km	7,5	7,5	7,5	7,5	15.434,8	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5036.RBS.090	Daerah irigasi Lematang yang dibangun	Km	1,5	1,5	1,5	1,5	50.679,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.092	Daerah irigasi Komering yang dibangun	Km	54,5	54,5	54,5	54,5	30.307,6	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.093	Daerah irigasi rawa Karang Agung hilir yang direhabilitasi	Km	97	97	97	97	18.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5036.RBS.094	Daerah irigasi Sekampung Batanghari yang ditingkatkan	Km	5,16	5,16	5,16	5,16	31.946,5	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5036.RBS.095	Daerah irigasi Way Rarem yang ditingkatkan	Km	8,1	8,1	8,1	8,1	48.466,9	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
	5036.RBS.096	Daerah irigasi Way Seputih yang ditingkatkan	Km	55	55	55	55	37.597,4	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.097	Daerah irigasi Way Tulung Mas yang ditingkatkan	Km	4,2	4,2	4,2	4,2	27.157,1	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.098	Daerah irigasi Way Umpu yang ditingkatkan	Km	22,2	22,2	22,2	22,2	144.017,5	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.099	Daerah irigasi Raman Utara yang ditingkatkan	Km	5,35	5,35	5,35	5,35	34.629,2	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR	
	5036.RBS.102	Daerah irigasi Panti Rao (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	6,1	6,1	6,1	6,1	7.416,6	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR	
	5036.RBS.103	Daerah irigasi Batang Tongar (IPDMIP) yang direhabilitasi	Km	4,3	4,3	4,3	4,3	5.952,8	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR	
	5036.RBS.106	Daerah irigasi tambak Kersik putih yang ditingkatkan	Km	10	10	10	10	3.750,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR	
	5036.RBS.108	Daerah irigasi tambak Marangkayu yang dibangun	Km	5	5	5	5	3.910,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR	
	5036.RBS.109	Daerah irigasi tambak Sepunggur yang ditingkatkan	Km	22,7	22,7	22,7	22,7	7.300,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR	
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.CBH.001	Check dam hulu Bendungan Leuwikeris yang dibangun	unit	2	0	0	0	14.900,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.CBH.002	Check dam Sungai Cijolang yang dibangun	unit	3	0	0	0	25.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.CBS.008	Pengamanan Pantai Karapyak yang dibangun	Km	2	0	0	0	55.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.009	Pengamanan Pantai Amal Baru yang dibangun	Km	0,52	0	0	0	34.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.010	Pengamanan Pantai baru yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.CBS.011	Pengamanan Pantai Bone yang dibangun	Km	0,17	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.012	Pengamanan Pantai Buhobuho yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.013	Pengamanan Pantai Cilallang yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.014	Pengamanan Pantai Desa Sole Pulau Seram yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.015	Pengamanan Pantai di Raja Ampat yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.016	Pengamanan Pantai di sepanjang Jalan Kab. Ketapang Kec. Kendawangan yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	20.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.017	Pengamanan Pantai Galesong yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.018	Pengamanan Pantai Hili yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	8.750,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.019	Pengamanan Pantai Kab. Bengkayang yang dibangun	Km	0,14	0	0	0	7.900,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.020	Pengamanan Pantai Kab. Kep. Selayar yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.021	Pengamanan Pantai Kab. Sambas yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	18.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.022	Pengamanan Pantai karya Bersama yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.023	Pengamanan Pantai kec. Helumo yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.CBS.024	Pengamanan Pantai Kec. Ponolosian yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	12.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.025	Pengamanan Pantai Kec. Posigodan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.026	Pengamanan Pantai Kec. Pulau-Pulau Lease yang dibangun	Km	0,46	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.027	Pengamanan Pantai KI Batang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	93.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.028	Pengamanan Pantai Kota Meulaboh yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.029	Pengamanan Pantai Kota Raha yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	16.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.030	Pengamanan Pantai Mampie yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.031	Pengamanan Pantai Modong yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	20.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.032	Pengamanan Pantai Moro yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	12.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.033	Pengamanan Pantai Muara Sebampan Lama yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.034	Pengamanan Pantai Nangaroro yang dibangun	Km	0,13	0	0	0	4.600,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.035	Pengamanan Pantai Ndalir yang dibangun	Km	0,07	0	0	0	10.300,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.036	Pengamanan Pantai Oesapa yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	7.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.037	Pengamanan Pantai Pagatan Kusan Hilir yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	16.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.038	Pengamanan Pantai panjang yang dibangun	Km	0,58	0	0	0	28.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.039	Pengamanan Pantai Penyak-Terentang yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	33.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.040	Pengamanan Pantai Pesaren yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	8.900,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.041	Pengamanan Pantai Pesisir Barat Desa Kerbang Dalam yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.042	Pengamanan Pantai Poigar, Tiberias, dan Nonapan yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	9.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.043	Pengamanan Pantai Pulau Miangas yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	35.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.044	Pengamanan Pantai Pulau Parit yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	7.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.045	Pengamanan Pantai Pulau Sedanau yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	11.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.046	Pengamanan Pantai Randomayang yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.047	Pengamanan Pantai Samak-Pegantungan yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	16.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.048	Pengamanan Pantai Sonit yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	7.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.049	Pengamanan Pantai Tanjung Aru yang dibangun	Km	0,74	0	0	0	27.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.050	Pengamanan Pantai terluar panipahan yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	21.250,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.051	Pengamanan Pantai Ujung Pandaran yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	26.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.052	Pengendalian banjir Sungai Kec. Rumbio Jaya yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.053	Pengendalian banjir di Candi Muaro Jambi yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5037.CBS.054	Pengendalian Banjir di Kabupaten Jayapura (Sungai Kemiri dan Yahim, Bello, Flavou, Abhealle) yang dibangun	Km	2	0	0	0	72.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.055	Pengendalian banjir Kali Konda yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.056	Pengendalian banjir Kali Senowo yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	29.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.057	Pengendalian banjir kali Yetni yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	8.450,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.058	Pengendalian banjir KEK Mandalika yang dibangun	Km	2	0	0	0	40.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.059	Pengendalian banjir Kota Sintang yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	20.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.060	Pengendalian banjir Sungai Akelaka yang dibangun	Km	6	0	0	0	45.650,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.061	Pengendalian banjir Sungai Asemgandok dan Grindulu yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.062	Pengendalian banjir Sungai Awo yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.063	Pengendalian banjir Sungai Barabai yang dibangun	Km	37	0	0	0	100.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.064	Pengendalian banjir Sungai Batang Bungo yang dibangun	Km	10	0	0	0	22.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bendung yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	10.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.066	Pengendalian banjir Sungai Bottoe yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.067	Pengendalian banjir Sungai Brang Rea yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cakung yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	7.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.069	Pengendalian banjir Sungai Cisabuk yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cibeureum yang dibangun	Km	5,2	0	0	0	23.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cijangkelok yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.072	Pengendalian banjir Sungai Cilamaya yang dibangun	Km	3	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cipakancilan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	9.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.074	Pengendalian banjir Sungai Citanduy yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	11.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.075	Pengendalian Banjir Sungai di Kab. Asmat yang dibangun	Km	0,37	0	0	0	14.600,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.076	Pengendalian banjir Sungai di Kec. Batang Peranap yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.077	Pengendalian Banjir Sungai Digoel yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	12.350,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.078	Pengendalian banjir Sungai Kedukan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	5.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.079	Pengendalian banjir Sungai Kelekar yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	5.400,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.080	Pengendalian banjir Sungai Lariang yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.CBS.081	Pengendalian banjir Sungai Maloso yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.082	Pengendalian banjir Sungai mapili yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.083	Pengendalian banjir Sungai Martapura yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	15.750,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.084	Pengendalian banjir Sungai Motaain yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.010,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.085	Pengendalian banjir Sungai Saddang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.086	Pengendalian banjir Sungai Seberang yang dibangun	Km	2	0	0	0	26.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.087	Pengendalian banjir Sungai Siwa yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.088	Pengendalian banjir Sungai Tabalong yang dibangun	Km	0,08	0	0	0	15.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.089	Pengendalian banjir Sungai Tammerodo yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	10.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.090	Pengendalian banjir Sungai Tolabit yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	10.800,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.091	Pengendalian banjir Tukad Ayung yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	4.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.092	Pengendalian banjir Way Terusan Kiri yang dibangun	Km	5	0	0	0	7.900,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.CBS.093	Tanggul Bendung Tami yang dibangun	Km	0,08	0	0	0	5.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5037.RBH.001	Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	unit	2	0	0	0	100.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBH.003	Check dam Citarum Hulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.004	Check dam Hulu Sungai Wanggu yang dibangun	unit	6	0	0	0	45.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBH.005	Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	unit	1	0	0	0	138.660,1	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.006	Pengendalian sedimen Batang Kuranji yang dibangun	unit	1	0	0	0	45.606,1	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBH.008	Pengendalian sedimen DAS Bone Gorontalo yang dibangun	unit	5	0	0	0	59.500,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.009	Pengendalian sedimen DAS Milangodaa yang dibangun	unit	1	0	0	0	97.960,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBH.010	Pintu air Demangan yang dibangun	unit	1	0	0	0	63.378,9	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBH.014	Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun	unit	1	0	0	0	23.500,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.001	Drainase KI Batang yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	60.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.002	Drainase KI Subang yang dibangun	Km	10	0	0	0	100.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.004	Pengamanan Pantai Dadap yang dibangun	Km	1	0	0	0	75.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.005	Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun	Km	0,32	0	0	0	229.935,2	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.006	Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun	Km	1	0	0	0	30.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.007	Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun	Km	3,47	0	0	0	154.660,0	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5037.RBS.008	Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	100.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.009	Pengamanan Pantai Limbangan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	35.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.010	Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	25.860,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.011	Pengamanan Pantai pulau terluar di Provinsi Riau yang dibangun	Km	3,15	0	0	0	109.500,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.012	Pengamanan Pantai Ruas Gerokgak - Kalisadaya yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	45.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.013	Pengamanan Pantai Ruas Lembeng - Purnama yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	50.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.014	Pengamanan Pantai Sekotong yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	35.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.015	Pengamanan Pantai Shopialousia/Sepatang yang dibangun	Km	0,65	0	0	0	30.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.016	Pengamanan Pantai Taludaa yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	7.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.017	Pengamanan Pantai Waha yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	30.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBS.018	Pengamanan Pantai Weda yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	20.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.019	Pengendalian banjir Tukad Unda yang dibangun	Km	1	0	0	0	147.612,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5037.RBS.020	Pengendalian banjir Air Selagan yang dibangun	Km	1,68	0	0	0	44.500,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
	5037.RBS.021	Pengendalian banjir Avfour Buntung yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	9.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.022	FMSRB Sungai Ciujung yang dibangun	Km	8	0	0	0	84.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5037.RBS.023	Pengendalian banjir avfour Watudakon yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	52.700,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.024	Pengendalian banjir Batang agam yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.025	Pengendalian banjir Batang Lembang yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.500,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.026	Pengendalian banjir Batang Siat yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.027	Pengendalian banjir Batang Suliti yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	25.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.028	Pengendalian banjir Batang Tambuo yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.029	Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	145.042,3	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.030	Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	Km	1,19	0	0	0	81.004,2	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.031	Pengendalian banjir DAS Bolango Hulu yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.032	Pengendalian banjir DAS Konawe yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5037.RBS.033	Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	134.251,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.034	Pengendalian banjir DAS Taludaa yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	8.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.035	Pengendalian banjir di Tandun yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	10.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
	5037.RBS.036	Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	Km	3	0	0	0	332.048,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.037	Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	Km	1	0	0	0	70.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.038	Pengendalian banjir Kali Bogel yang dibangun	Km	3,63	0	0	0	48.835,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.039	Pengendalian banjir Kali Gunting yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	8.950,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.040	Pengendalian banjir Kali Jeroan yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	84.500,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.041	Pengendalian banjir Kali Kemuning yang dibangun	Km	3	0	0	0	100.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.042	Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	Km	1	0	0	0	100.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.043	Pengendalian banjir Kali Welang yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	34.339,7	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.044	Pengendalian banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang yang dibangun	Km	2,2	0	0	0	59.018,2	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.045	Pengendalian banjir Kota Makassar yang direvitalisasi	Km	0,6	0	0	0	15.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.046	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Km	1,7	0	0	0	18.850,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.047	Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	332.863,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.048	Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	17.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.049	Pengendalian banjir pertemuan Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5037.RBS.050	Pengendalian banjir Pertemuan tiga Sungai di kab. Ponorogo yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	40.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.051	Pengendalian banjir Ring Ngotok Kanal yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.052	Pengendalian banjir rob Semarang-Demak yang dibangun	Km	5,3	0	0	0	600.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.053	Pengendalian banjir segmen Griya Mukti yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.054	Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	50.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.055	Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	Km	0,55	0	0	0	15.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.056	Pengendalian banjir Sungai Ampal yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	40.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.057	Pengendalian banjir Sungai Andegile yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	20.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.058	Pengendalian banjir Sungai Babakan yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.059	Pengendalian banjir Sungai Babura yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.060	Pengendalian banjir Sungai Batanghari Hilir yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.061	Pengendalian banjir Sungai Belawan yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.062	Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungai lainnya yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	159.326,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.063	Pengendalian banjir Sungai Bolango Hilir yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	45.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.064	Pengendalian banjir Sungai bolango yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	41.692,8	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bone yang dibangun	Km	0,72	0	0	0	83.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.066	Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	18.450,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.067	Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	Km	3,84	0	0	0	114.400,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cibeet yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.069	Pengendalian banjir Sungai Ciberang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun	Km	2	0	0	0	73.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cilemah Abang yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	25.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.072	Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cimanuk yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	15.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.074	Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	Km	1	0	0	0	10.500,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.075	Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.076	Pengendalian banjir Sungai Cisanggarung yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	7.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.077	Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	13.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.078	Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	4.400,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.079	Pengendalian banjir Sungai Cisunggalah yang direhabilitasi	Km	1,4	0	0	0	10.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.080	Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.081	Pengendalian banjir Sungai Deli yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.082	Pengendalian banjir Sungai Desa Embacang Gedang yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	34.900,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5037.RBS.083	Pengendalian banjir Sungai Gelis yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	84.230,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.084	Pengendalian banjir Sungai Jajar yang dibangun	Km	4,08	0	0	0	82.810,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.085	Pengendalian banjir Sungai Jeneponto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	13.100,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.086	Pengendalian banjir Sungai Juana yang dibangun	Km	3,83	0	0	0	82.687,5	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.087	Pengendalian banjir Sungai Kapuas yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	37.600,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.088	Pengendalian banjir Sungai Karang Mumus yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.089	Pengendalian banjir Sungai Kec. Ponołosian Timur yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	30.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.090	Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	15.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.093	Pengendalian banjir Sungai Krueng Singkil yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	30.100,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.094	Pengendalian banjir Sungai Lamasi yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	30.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.095	Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	52.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.096	Pengendalian banjir Sungai Malibaka yang dibangun	Km	3	0	0	0	75.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.097	Pengendalian banjir Sungai Masamba yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	40.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.098	Pengendalian banjir Sungai Musi yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	72.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.099	Pengendalian banjir Sungai Ongkak Dumoga yang dibangun	Km	1	0	0	0	41.500,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.100	Pengendalian banjir Sungai Opak yang dibangun	Km	1,6	0	0	0	26.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.101	Pengendalian banjir Sungai Paguyaman yang dibangun	Km	1	0	0	0	20.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.102	Pengendalian banjir Sungai Peliang yang dibangun	Km	1	0	0	0	17.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.103	Pengendalian banjir Sungai Percut yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	4.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.104	Pengendalian banjir Sungai Putih yang dibangun	Km	0,12	0	0	0	5.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.105	Pengendalian banjir Sungai Radda yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	20.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.106	Pengendalian banjir Sungai Randangan yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.107	Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	105.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.108	Pengendalian banjir Sungai Rongkong yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	30.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.109	Pengendalian banjir Sungai Sadar yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.110	Pengendalian banjir Sungai Sario yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	7.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.111	Pengendalian banjir Sungai Sikambing yang dibangun	Km	0,17	0	0	0	6.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.112	Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.113	Pengendalian banjir Sungai Tamalate yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	17.500,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.114	Pengendalian banjir Sungai Tondano yang dibangun	Km	0,34	0	0	0	19.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.115	Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	10.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.116	Pengendalian banjir Sungai Tuntang yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	103.783,3	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.117	Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	40.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.118	Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	19.950,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.119	Pengendalian banjir SWD 1 dan 2 yang dibangun	Km	4,76	0	0	0	130.232,1	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBS.120	Pengendalian banjir Tukad Badung yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.121	Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	Km	10	0	0	0	34.904,4	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.122	Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	Km	2	0	0	0	15.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.123	Pengendalian banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	5.300,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.124	Pengendalian banjir Sungai Lawe Alas yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	30.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.131	Pengendalian banjir Batang Sumpur yang dibangun	Km	0,85	0	0	0	18.500,0	00-Pusat	Kemen PUPR
		5037.RBS.133	Pengendalian banjir KEK Mandalika yang dibangun	Km	2	0	0	0	40.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
5039	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5039.CBG.008	Embung Siulak Hosa yang ditingkatkan	unit	1	0	0	0	0,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5039.CBG.009	Embung Sungsang yang dibangun	unit	1	0	0	0	10.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5039.CBG.010	Embung Babusan yang dibangun	unit	1	0	0	0	13.700,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5039.CBG.011	Embung Talago Mumbuang yang dibangun	unit	1	0	0	0	6.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5039.CBG.012	Embung Lasuang Batu yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5039.CBG.013	Embung Bandara Bungo yang dibangun	unit	1	0	0	0	29.878,5	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5039.CBG.014	Embung Universitas Sriwijaya yang dibangun	unit	1	0	0	0	12.400,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5039.CBG.015	Embung Konservasi Kolong Yamin yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.000,0	19-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kemen PUPR
	5039.CBG.016	Embung Konservasi Kolong Kelubi yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5039.CBG.017	Embung Desa Nibung yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000,0	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5039.CBG.018	Embung Bakar yang dibangun	unit	1	0	0	0	19.200,0	63-Provinsi Kalimantan Selatan	Kemen PUPR
	5039.CBG.019	Embung Danau Asam yang dibangun	unit	1	0	0	0	72.000,0	62-Provinsi Kalimantan Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.020	Embung Serbaguna Sei Fatimah yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.000,0	65-Provinsi Kalimantan Utara	Kemen PUPR
	5039.CBG.021	Embung Pondok Pesantren Tanara yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5039.CBG.022	Embung Wanakaya yang dibangun	unit	1	0	0	0	15.150,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.023	Embung Serbaguna Hanum yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.024	Embung Pangkalan yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5039.CBG.025	Embung Cijoho yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.026	Embung Politeknik PUPR yang dibangun	unit	1	0	0	0	35.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.027	Embung Bandungrejo yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.028	Embung Muallimin yang dibangun	unit	1	0	0	0	7.700,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5039.CBG.029	Embung Imogiri 2 yang dibangun	unit	1	0	0	0	18.600,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.030	Embung Desa Sendangtirta yang dibangun	unit	1	0	0	0	9.700,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.031	Embung Dukun yang dibangun	unit	1	0	0	0	10.600,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.032	Embung Tlogoguwo yang dibangun	unit	1	0	0	0	14.500,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5039.CBG.033	Embung Banteran yang dibangun	unit	1	0	0	0	13.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.034	Bendung Gerak Karangnongko yang dibangun	unit	1	0	0	0	74.916,2	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.035	Embung Sidomulyo yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.036	Embung Peniwen yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.037	Embung Montorna yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.038	Embung Sanur yang dibangun	unit	1	0	0	0	22.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.CBG.039	Embung Getakan II yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.CBG.040	Embung Samada yang dibangun	unit	1	0	0	0	3.500,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.041	Embung Kab. Sumba Timur yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.042	Embung Serbaguna di Kab. Timor Tengah Utara yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5039.CBG.043	Embung Serbaguna di Kab. Sumba Tengah yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.044	Embung Serbaguna Wae Robang yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.825,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.045	Embung Serbaguna Wae Nio yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.825,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.046	Embung Konservasi Lepangan yang dibangun	unit	1	0	0	0	8.500,0	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.047	Embung Watulawu yang dibangun	unit	1	0	0	0	6.500,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5039.CBG.048	Embung Serbaguna Kab. Takalar yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.CBG.049	Embung Serbaguna Bonea Timur yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.CBG.050	Embung Liku Rombe yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	00-Pusat	Kemen PUPR
	5039.CBG.051	Embung di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5039.CBG.052	Embung Ohoi Wab yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5039.CBG.053	Embung Konservasi Nakamura Pulau Morotai (Desa Sabala) yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.CBG.054	Embung di Distrik Botawa yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5039.CBG.056	Embung Karangemiri yang dibangun	unit	1	0	0	0	10.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.057	Embung Sumingkir yang dibangun	unit	1	0	0	0	16.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	5039.CBG.058	Embung Wanagama yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.CBG.059	Embung Binade yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.CBG.060	Embung Wrikapal (Kalimati) yang dibangun	unit	1	0	0	0	29.650,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.061	Embung Konservasi Tembeling yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	26.303,2	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5039.CBG.062	Embung Rumah Sakit Muhammad Hosein yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	0,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
	5039.CBG.063	Embung Bayur Raya yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	0,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.069	Embung Jangkar yang ditingkatkan	unit	1	0	0	0	5.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.CBG.070	Embung Giwu yang dibangun	unit	1	0	0	0	15.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.001	Bendungan Sei Busung yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.500,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
	5039.RBG.002	Bendungan Riam Kiwa yang dibangun	unit	1	0	0	0	500,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.003	Bendungan Batu Lepek yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.004	Bendungan Cibeet yang dibangun	unit	1	0	0	0	2.682,7	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.005	Bendungan Cijurey yang dibangun	unit	1	0	0	0	2.682,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.006	Bendungan Kedunglanggar yang dibangun	unit	1	0	0	0	190.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.007	Bendungan Mbay yang dibangun	unit	1	0	0	0	75.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.008	Bendungan Welikis yang dibangun	unit	1	0	0	0	12.500,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.009	Bendungan Jenelata yang dibangun	unit	1	0	0	0	3.500,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.RBG.010	Bendungan Wairoro yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.011	Bendungan Keureuto yang dibangun	unit	1	0	0	0	188.874,3	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.012	Bendungan Rukoh yang dibangun	unit	1	0	0	0	263.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.013	Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh yang dibangun	unit	1	0	0	0	21.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.014	Bendungan Lau Simeme yang dibangun	unit	1	0	0	0	529.625,4	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.015	Bendungan Tiga Dihaji yang dibangun	unit	1	0	0	0	458.732,1	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.016	Bendungan Margatiga yang dibangun	unit	1	0	0	0	441.117,2	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5039.RBG.017	Bendungan Way Sekampung yang dibangun	unit	1	0	0	0	644.659,2	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
	5039.RBG.018	Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun	unit	1	0	0	0	158.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.019	Bendungan Lambakan yang dibangun	unit	1	0	0	0	0,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.020	Bendungan Karian yang dibangun	unit	1	0	0	0	331.696,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.021	Bendungan Ciawi yang dibangun	unit	1	0	0	0	495.968,5	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.022	Bendungan Sukamahi yang dibangun	unit	1	0	0	0	158.369,1	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.023	Bendungan Sadawarna yang dibangun	unit	1	0	0	0	591.214,4	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.024	Bendungan Cipanas yang dibangun	unit	1	0	0	0	669.028,7	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.025	Bendungan Kuningan yang dibangun	unit	1	0	0	0	37.400,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.026	Bendungan Leuwikeris yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.017.216,3	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.027	Bendungan Randugunting yang dibangun	unit	1	0	0	0	179.645,7	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.028	Bendungan Jragung yang dibangun	unit	1	0	0	0	210.919,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.029	Bendungan Bener yang dibangun	unit	1	0	0	0	292.989,2	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.030	Bendungan Jlantah yang dibangun	unit	1	0	0	0	190.513,4	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.031	Bendungan Bendo yang dibangun	unit	1	0	0	0	237.457,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.032	Bendungan Gongseng yang dibangun	unit	1	0	0	0	119.084,4	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.033	Bendungan Pidekso yang dibangun	unit	1	0	0	0	354.449,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.034	Bendungan Tukul yang dibangun	unit	1	0	0	0	206.613,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.035	Bendungan Bagong yang dibangun	unit	1	0	0	0	181.262,9	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.036	Bendungan Semantok yang dibangun	unit	1	0	0	0	1.223.466,7	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.037	Bendungan Tugu yang dibangun	unit	1	0	0	0	805.035,5	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.038	Bendungan Sidan yang dibangun	unit	1	0	0	0	644.154,7	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.RBG.039	Bendungan Tamblang yang dibangun	unit	1	0	0	0	220.649,9	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
	5039.RBG.040	Bendungan Beringin Sila yang dibangun	unit	1	0	0	0	451.986,1	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.041	Bendungan Meninting yang dibangun	unit	1	0	0	0	317.444,5	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.042	Bendungan Tiu Suntuk yang dibangun	unit	1	0	0	0	170.796,9	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.043	Bendungan Bintang Bano yang dibangun	unit	1	0	0	0	331.868,5	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.044	Pelengkap Bendungan Tanju dan Bendungan Mila yang dibangun	unit	1	0	0	0	5.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.045	Bendungan Manikin yang dibangun	unit	1	0	0	0	539.799,3	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.046	Bendungan Napun Gete yang dibangun	unit	1	0	0	0	255.914,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.047	Bendungan Temef yang dibangun	unit	1	0	0	0	266.177,5	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
	5039.RBG.048	Bendungan Kuwil Kawangoan yang dibangun	unit	1	0	0	0	487.717,4	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5039.RBG.049	Bendungan Lolak yang dibangun	unit	1	0	0	0	858.726,3	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
	5039.RBG.050	Bendungan Bulango Ulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	154.050,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5039.RBG.051	Bendungan Budong-Budong yang dibangun	unit	1	0	0	0	148.894,5	76-Provinsi Sulawesi Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.052	Bendungan Ameroro yang dibangun	unit	1	0	0	0	322.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5039.RBG.053	Bendungan Ladongi yang dibangun	unit	1	0	0	0	325.742,2	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
	5039.RBG.054	Bendungan Pamukkulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	311.901,5	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.RBG.055	Bendungan Karalloe yang dibangun	unit	1	0	0	0	202.701,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5039.RBG.056	Bendungan Way Apu yang dibangun	unit	1	0	0	0	324.780,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
	5039.RBG.057	Bendungan Wonogiri yang direhabilitasi (Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir Slice II)	unit	1	0	0	0	48.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.058	Danau Sipin yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	10.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
	5039.RBG.059	Danau Sebedang yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	5.000,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
	5039.RBG.060	Danau Rawa Pening yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	35.929,9	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5039.RBG.061	Danau Tondano (Lanjutan) Segmen Tolour-Tounsaruyang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	75.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5039.RBG.062	Danau Limboto yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	30.450,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5039.RBG.063	Danau Tempe yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	0,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5039.RBG.064	Danau Sentani yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	8.500,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
		5039.RBG.065	Danau Ayamaru yang direvitalisasi	unit	1	0	0	0	30.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5039.RBG.066	Revitalisasi Rowojombor Kabupaten Klaten	unit	1	0	0	0	100.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	5040.CBG.097	Waduk Panepat yang ditingkatkan	unit	1	1	1	1	31.500,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
		5040.CBS.042	Bangunan Penyediaan Air Baku likupang yang dibangun	Km	1	0	0	0	54.995,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5040.RBS.015	Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	Km	31,5	0	0	0	125.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5040.RBS.041	Peyediaan Air Baku Bendungan PenggauntukKEK Mandalikadi Kab. Lombok Tengah yang dibangun	Km	5	0	0	0	35.250,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika											
3346	Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG	3346.QDC.001	Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI)	orang	2.200	2.400	2.400	2.400	49.100,0	Wilayah sentra produksi pertanian	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.BAH.001	Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang Berkualitas	layanan	1	1	1	1	155.879,7	34 provinsi	BMKG
		5201.BAH.002	Layanan Informasi Meteorologi Maritim di Daerah	layanan	1	1	1	1	27.819,8	34 provinsi	BMKG

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5201.QAH.001	Layanan Informasi meteorologi maritim (Strengthening of Marine Meteorology)	layanan	20	20	20	20	1.792.300,0	34 provinsi	BMKG
		5201.QDC.001	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN)	orang	3.800	4.000	4.000	4.000	29.700,0	34 provinsi	BMKG
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3882	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup Pencegahan Melalui Kesiapsiagaan	3882.ABS.001	Jumlah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Rekomendasi Kebijakan	2	2	3	3	2.475,0	Pusat	BNPB
3882	Penguatan Desa Tangguh Bencana	3882.UBB.001	Jumlah Penguatan Desa Tangguh Bencana	desa	120	90	120	120	47,10	34 provinsi	BNPB
4280	Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	4280.PBS.001	Jumlah Risiko Bencana	Jumlah peta risiko bencana yang disusun	5	1	5	5	26.300,0	Pusat	BNPB
4281	Pengembangan Strategi PB	4281.PBS.001	Jumlah Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	9	5	9	9	17.867,9	Pusat	BNPB
4282	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana	4282.UAB.001	Jumlah Sistem Informasi Bidang Kebencanaan yang dibangun	Sistem Informasi	5	2	5	5	23.000,0	Pusat	BNPB
4283	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup Pencegahan Melalui Mitigasi Bencana	4283.RBH.001	Jumlah Rambu, Papan Evakuasi dan Informasi Bencana yang terpasang	Unit	-	8.600	1.540	0	32.800,0	25 Provinsi (237 Kab/Kota)	BNPB
4284	Peringatan Dini	4284.QAH.001	Jumlah Layanan Sistem Peringatan Dini	Layanan	8	5	10	11	32.600,0	34 Provinsi	BNPB
		4284.ABS.001	Jumlah Rancang Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana yang dibangun	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	5.000,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4284.TAJ.001	Jumlah Platform MHEWS dan Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan yang dibangun	Unit	-	-	1	-	19.865,0	Pusat	BNPB
		4284.TAJ.001	Jumlah Sistem Penyebaran Informasi Peringatan Multi-Bahaya yang dikembangkan	Unit	-	-	-	1	9.965,5	Pusat	BNPB
Kegiatan Pendukung											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.020	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Provinsi	10	20	24	34	10,719.0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBH.001	Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	unit	2	0	0	0	100.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.002	Bendung gerak Kanal Banjir Barat Kota Semarang yang dibangun	unit	0	0	0	0	14.900.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.003	Check dam Citarum Hulu yang dibangun	unit	1	0	0	0	20.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.004	Check dam Hulu Sungai Wanggu yang dibangun	unit	6	0	0	0	45.000.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
		5037.RBH.005	Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	unit	1	0	0	0	138.660.103,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.006	Pengendalian sedimen Batang Kuranji yang dibangun	unit	1	0	0	0	45.606.098,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBH.008	Pengendalian sedimen DAS Bone Gorontalo yang dibangun	unit	5	0	0	0	59.500.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBH.009	Pengendalian sedimen DAS Milangodaa yang dibangun	unit	1	0	0	0	97.960.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBH.010	Pintu air Demangan yang dibangun	unit	1	0	0	0	63.378.900,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.011	Pompa Ancol Sentiong yang dibangun	unit	1	0	0	0	201.635.361,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBH.012	FMSRB Sungai Way Batu Merah yang dibangun	unit	4	0	0	0	33.648.799,0	81-Provinsi Maluku	Kemen PUPR
		5037.RBH.013	Infrastructure Reconstruction Sector Loan Central Sulawesi yang dilaksanakan	unit	0	0	0	0	39.493.718,0	Provinsi Sulawesi Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBH.014	Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun	unit	1	0	0	0	23.500.000,0	21-Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.001	Drainase KI Batang yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	60.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.002	Drainase KI Subang yang dibangun	Km	10	0	0	0	100.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.003	Oxbow DAS Citarum yang ditangani	Km	1	0	0	0	20.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.004	Pengamanan Pantai Dadap yang dibangun	Km	1	0	0	0	75.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.005	Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun	Km	0,32	0	0	0	229.935.193,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.006	Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun	Km	1	0	0	0	30.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.007	Pengamanan Pantai Kalianda yang dibangun	Km	3,47	0	0	0	154.660.000,0	18-Provinsi Lampung	Kemen PUPR
		5037.RBS.008	Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	100.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5037.RBS.009	Pengamanan Pantai Limbangan yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	35.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.010	Pengamanan Pantai Loh Buaya di Pulau Rinca yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	25.860.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.011	Pengamanan Pantai pulau terluar di Provinsi Riau yang dibangun	Km	3,15	0	0	0	109.500.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.012	Pengamanan Pantai Ruas Gerokgak - Kalisada yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	45.000.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.013	Pengamanan Pantai Ruas Lembeng - Purnama yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	50.000.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.014	Pengamanan Pantai Sekotong yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	35.000.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.015	Pengamanan Pantai Shopialousia/Sepatang yang dibangun	Km	0,65	0	0	0	30.000.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.016	Pengamanan Pantai Taludaa yang dibangun	Km	0,1	0	0	0	7.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.017	Pengamanan Pantai Waha yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	30.000.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
		5037.RBS.018	Pengamanan Pantai Weda yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	20.000.000,0	82-Provinsi Maluku Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.019	Pengendalian banjir Tukad Unda yang dibangun	Km	1	0	0	0	147.611.961,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.020	Pengendalian banjir Air Selagan yang dibangun	Km	1,68	0	0	0	44.500.000,0	17-Provinsi Bengkulu	Kemen PUPR
		5037.RBS.021	Pengendalian banjir Avfour Buntung yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	9.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.022	FMSRB Sungai Ciujung yang dibangun	Km	8	0	0	0	84.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5037.RBS.023	Pengendalian banjir avfour Watudakon yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	52.700.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.024	Pengendalian banjir Batang agam yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.025	Pengendalian banjir Batang Lembang yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.500.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.026	Pengendalian banjir Batang Siat yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.027	Pengendalian banjir Batang Suliti yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	25.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.028	Pengendalian banjir Batang Tambuo yang dibangun	Km	0,6	0	0	0	19.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.029	Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	145.042.293,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.030	Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	Km	1,19	0	0	0	81.004.185,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.031	Pengendalian banjir DAS Bolango Hulu yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.032	Pengendalian banjir DAS Konawe yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000.000,0	74-Provinsi Sulawesi Tenggara	Kemen PUPR
		5037.RBS.033	Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	Km	3,5	0	0	0	134.251.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.034	Pengendalian banjir DAS Taludaa yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	8.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
		5037.RBS.035	Pengendalian banjir di Tandun yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	10.000.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.036	Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	Km	3	0	0	0	332.048.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.037	Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	Km	1	0	0	0	70.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.038	Pengendalian banjir Kali Bogel yang dibangun	Km	3,63	0	0	0	48.834.988,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.039	Pengendalian banjir Kali Gunting yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	8.950.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.040	Pengendalian banjir Kali Jeroan yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	84.500.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.041	Pengendalian banjir Kali Kemuning yang dibangun	Km	3	0	0	0	100.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.042	Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	Km	1	0	0	0	100.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.043	Pengendalian banjir Kali Welang yang dibangun	Km	0,9	0	0	0	34.339.662,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.044	Pengendalian banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang yang dibangun	Km	2,2	0	0	0	59.018.187,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.045	Pengendalian banjir Kota Makassar yang direvitalisasi	Km	0,6	0	0	0	15.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
	5037.RBS.046	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Km	1,7	0	0	0	18.850.000,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.047	Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	332.863.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.048	Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	17.500.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.049	Pengendalian banjir pertemuan Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.050	Pengendalian banjir Pertemuan tiga Sungai di kab. Ponorogo yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	40.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.051	Pengendalian banjir Ring Ngotok Kanal yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	50.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.052	Pengendalian banjir rob Semarang -Demak yang dibangun	Km	5,3	0	0	0	600.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.053	Pengendalian banjir segmen Griya Mukti yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024				
	5037.RBS.054	Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	50.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.055	Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	Km	0,55	0	0	0	15.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.056	Pengendalian banjir Sungai Ampal yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	40.000.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
	5037.RBS.057	Pengendalian banjir Sungai Andegile yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	20.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.058	Pengendalian banjir Sungai Babakan yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	7.500.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.059	Pengendalian banjir Sungai Babura yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.060	Pengendalian banjir Sungai Batanghari Hilir yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	10.000.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.061	Pengendalian banjir Sungai Belawan yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
	5037.RBS.062	Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungai lainnya yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	159.326.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.063	Pengendalian banjir Sungai Bolango Hilir yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	45.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.064	Pengendalian banjir Sungai bolango yang dibangun	Km	2,5	0	0	0	41.692.820,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bone yang dibangun	Km	0,72	0	0	0	83.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
	5037.RBS.066	Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	18.450.000,0	94-Provinsi Papua	Kemen PUPR
	5037.RBS.067	Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	Km	3,84	0	0	0	114.400.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
	5037.RBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cibeet yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.069	Pengendalian banjir Sungai Ciberang yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
	5037.RBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun	Km	2	0	0	0	73.500.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cilemah Abang yang dibangun	Km	0,8	0	0	0	25.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
	5037.RBS.072	Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	50.000.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
	5037.RBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cimanuk yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	15.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		5037.RBS.074	Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	Km	1	0	0	0	10.500.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.075	Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000.000,0	36-Provinsi Banten	Kemen PUPR
		5037.RBS.076	Pengendalian banjir Sungai Cisanggarung yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	7.000.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.077	Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	Km	0,35	0	0	0	13.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.078	Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	4.400.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.079	Pengendalian banjir Sungai Cisunggalah yang direhabilitasi	Km	1,4	0	0	0	10.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.080	Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	15.000.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.081	Pengendalian banjir Sungai Deli yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.082	Pengendalian banjir Sungai Desa Embacang Gedang yang dibangun	Km	0,25	0	0	0	34.900.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5037.RBS.083	Pengendalian banjir Sungai Gelis yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	84.230.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.084	Pengendalian banjir Sungai Jajar yang dibangun	Km	4,08	0	0	0	82.810.000,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.085	Pengendalian banjir Sungai Jeneponto yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	13.100.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.086	Pengendalian banjir Sungai Juana yang dibangun	Km	3,83	0	0	0	82.687.500,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.087	Pengendalian banjir Sungai Kapuas yang dibangun	Km	0,3	0	0	0	37.600.000,0	61-Provinsi Kalimantan Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.088	Pengendalian banjir Sungai Karang Mumus yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	40.000.000,0	64-Provinsi Kalimantan Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.089	Pengendalian banjir Sungai Kec. Ponoosian Timur yang dibangun	Km	0,75	0	0	0	30.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.090	Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Km	0,45	0	0	0	15.000.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.093	Pengendalian banjir Sungai Krueng Singkil yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	30.100.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.094	Pengendalian banjir Sungai Lamasi yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	30.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
		5037.RBS.095	Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	52.000.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024			
5037.RBS.096	Pengendalian banjir Sungai Malibaka yang dibangun	Km	3	0	0	0	75.000.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
5037.RBS.097	Pengendalian banjir Sungai Masamba yang dibangun	Km	2,1	0	0	0	40.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
5037.RBS.098	Pengendalian banjir Sungai Musi yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	72.000.000,0	16-Provinsi Sumatera Selatan	Kemen PUPR
5037.RBS.099	Pengendalian banjir Sungai Ongkak Dumoga yang dibangun	Km	1	0	0	0	41.500.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.100	Pengendalian banjir Sungai Opak yang dibangun	Km	1,6	0	0	0	26.000.000,0	34-Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
5037.RBS.101	Pengendalian banjir Sungai Paguyaman yang dibangun	Km	1	0	0	0	20.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
5037.RBS.102	Pengendalian banjir Sungai Peliang yang dibangun	Km	1	0	0	0	17.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.103	Pengendalian banjir Sungai Percut yang dibangun	Km	0,15	0	0	0	4.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.104	Pengendalian banjir Sungai Putih yang dibangun	Km	0,12	0	0	0	5.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.105	Pengendalian banjir Sungai Radda yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	20.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
5037.RBS.106	Pengendalian banjir Sungai Randangan yang dibangun	Km	1	0	0	0	15.000.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
5037.RBS.107	Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Km	1,4	0	0	0	105.000.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.108	Pengendalian banjir Sungai Rongkong yang dibangun	Km	1,2	0	0	0	30.000.000,0	73-Provinsi Sulawesi Selatan	Kemen PUPR
5037.RBS.109	Pengendalian banjir Sungai Sadar yang dibangun	Km	1	0	0	0	50.000.000,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
5037.RBS.110	Pengendalian banjir Sungai Sario yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	7.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.111	Pengendalian banjir Sungai Sikambang yang dibangun	Km	0,17	0	0	0	6.000.000,0	12-Provinsi Sumatera Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.112	Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	50.000.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
5037.RBS.113	Pengendalian banjir Sungai Tamalate yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	17.500.000,0	75-Provinsi Gorontalo	Kemen PUPR
5037.RBS.114	Pengendalian banjir Sungai Tondano yang dibangun	Km	0,34	0	0	0	19.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
5037.RBS.115	Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Km	0,18	0	0	0	10.000.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
5037.RBS.116	Pengendalian banjir Sungai Tuntang yang dibangun	Km	4,25	0	0	0	103.783.315,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5037.RBS.117	Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	Km	1,5	0	0	0	40.000.000,0	53-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.118	Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Km	0,4	0	0	0	19.950.000,0	91-Provinsi Papua Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.119	Pengendalian banjir SWD 1 dan 2 yang dibangun	Km	4,76	0	0	0	130.232.050,0	33-Provinsi Jawa Tengah	Kemen PUPR
		5037.RBS.120	Pengendalian banjir Tukad Badung yang dibangun	Km	0,2	0	0	0	5.000.000,0	51-Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBS.121	Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	Km	10	0	0	0	34.904.368,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.122	Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	Km	2	0	0	0	15.000.000,0	71-Provinsi Sulawesi Utara	Kemen PUPR
		5037.RBS.123	Pengendalian banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	Km	0,27	0	0	0	5.300.000,0	32-Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.124	Pengendalian banjir Sungai Lawe Alas yang dibangun	Km	0,5	0	0	0	30.000.000,0	11-Provinsi Aceh	Kemen PUPR
		5037.RBS.125	Sudetan Ciliwung KBT yang dibangun	Km	1	0	0	0	150.000.000,0	31-Provinsi DKI Jakarta	Kemen PUPR
		5037.RBS.126	Sudetan Floodway Sedayu lawas yang ditingkatkan	Km	0,5	0	0	0	59.561.500,0	35-Provinsi Jawa Timur	Kemen PUPR
		5037.RBS.127	UFCKotaBimayangdibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	52-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.128	UFCKotaJambiyangdibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	15-Provinsi Jambi	Kemen PUPR
		5037.RBS.129	UFC Kota Padang yang dibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	13-Provinsi Sumatera Barat	Kemen PUPR
		5037.RBS.130	UFC Kota Pekanbaru yang dibangun	Km	0	0	0	0	3.500.000,0	14-Provinsi Riau	Kemen PUPR
		5037.RBS.131	Pengendalian banjir Batang Sumpur yang dibangun	Km	0,85	0	0	0	18.500.000,0	00-Pusat	Kemen PUPR
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3893	Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Jumlah prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang ditingkatkan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
		3893.QMB.001	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB
3882	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Lokasi	2	2	2	2	2.400,0	Pusat	BNPB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
103.WA Program Dukungan Manajemen											
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Jumlah sumber daya manusia pelaksanaan diklat teknis dan simulasi di daerah	Orang	760	760	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030											
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi											
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.401	Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)	Cekungan Air Tanah (CAT)	13	13	13	13	221.667,4	Tersebar	Kemen ESDM
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika											
3350	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	3350.QAH.003	Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scalling Up Weather Capacity II	Layanan	3	24	34	34	346.200,0	34 Provinsi	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.QAH.003	Informasi Meteorologi Maritim (Strengthening of Marine Meteorology)	Layanan	20	20	20	20	1.792.300,0	100 Pelabuhan	BMKG
3349	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG	3349.QAH.002	Informasi peringatan dini windshear	Bandara	3	3	4	4	278.500,0	14 Bandara	BMKG
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	5406.BDB.001	Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	1	1	21.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5406.QDB.001	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5406.UAB.001	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	Sistem Informasi	1	1	1	1	71.400,0	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana											
010.CM Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.020	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Provinsi	10	20	24	34	10.719,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Provinsi	34	34	34	34	2.100,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	Daerah	133	133	133	133	7.247,5	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Provinsi	34	34	34	34	2.100,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6136.UBA.005	Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat	Daerah	34	34	34	34	1.000,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1241.UBA.001	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	Daerah	-	13	13	13	7.200,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air											
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBR.001	Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2) yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	33.330,1	Provinsi Bali	Kemen PUPR
		5037.RBR.002	Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	19.500,0	Provinsi DI Yogyakarta	Kemen PUPR
		5037.RBR.003	Dokumen desain Pengendalian banjir upper Citarum yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	10.000,0	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.004	Engineering service project Batam dan Bintan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Kepulauan Riau	Kemen PUPR
		5037.RBR.005	Engineering service project di Pulau Bangka yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Bangka Belitung	Kemen PUPR
		5037.RBR.006	Engineering service project di Sungai Cipunegara yang dibangun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Jawa Barat	Kemen PUPR
		5037.RBR.007	Engineering service project Sungai Siak yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	4.307,7	Provinsi Riau	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
103.FA Program Ketahanan Bencana										
3893 Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Jumlah prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang ditingkatkan	Unit	10	10	10	10	58.000,0	Pusat	BNPB
	3893.QMB.001	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana	Layanan	81	81	81	81	12.200,0	Pusat	BNPB
3882 Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Jumlah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dalam Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	3	3.375,0	Pusat	BNPB
103.WA Program Dukungan Manajemen										
3878 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Jumlah sumberdaya manusia pelaksanaan diklat teknis dan simulasi di daerah	Orang	570	570	760	760	54.900,0	34 Provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National										
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim										
5447 Mitigasi Perubahan Iklim	5447.QDB.001	Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	Layanan	1	1	1	1	10.620,6	Pusat	Kemen LHK
5448 Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	5448.BMA.001	Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	Layanan	1	1	1	1	15.556,5	Pusat	Kemen LHK
Kegiatan Pendukung										
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa										
6139 Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	17	22	28	34	30.693,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
	6139.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	7.035,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
	6139.UBA.13	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	6.126,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6139.UBA.14	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	6.438,8	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6139.UBA.17	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	17	22	28	34	14.596,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
		6139.UBA.19	Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10	17	24	34	10.756,0	Pusat (Alokasi Kementerian)	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs:											
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) pertahun											
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)											
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBJ.001	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Rekomendasi	1	1	1	1	9.000,0	Pusat	Kemen ESDM
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PBI.003	Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Wilayah	0	N/A	4	3	2.957,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.PBI.004	Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	8	0	11	12	72.810,0	Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kab. Lebak, Kab. Lombok Timur, Kab. Ngada, Kab. Donggala, Kab. Tana Toraja, Kab. Halmahera Barat	Kemen ESDM
		6352.QIA.003	Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	Persen	35,0	35,0	33,0	35,0	4.050,0	Pusat	Kemen ESDM
		6352.QIA.002	Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT	Persen	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	PLTA (70) PLTS(40) PLTB(40)	2.583,6	Pusat	Kemen ESDM
		6352.QIA.001	Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	Persen	40,0	40,0	40,0	40,0	2.140,0	Pusat	Kemen ESDM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan											
6532	Efisiensi dan Konservasi Energi	6532.PBI.002	Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/Miliar Rupiah	0.90	0.90	0.80	0.80	38.694,4	Pusat	Kemen ESDM
6352	Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	Peralatan/ Produk	2	1	N/A	N/A	1.927,9	Pusat	Kemen ESDM
		6352.AEF.001	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Orang	300	400	400	400	3.244,8	Tersebar	Kemen ESDM
		6352.BIC.001	Manajemen Energi Lembaga	Lembaga	1	1	1	1	PM	Pusat	Kemen ESDM
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4649	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	4649.RAC.002	Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek	Unit	1	41	N/A	N/A	41.253,2	Jabodetabek	Kemenhub
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.CBB.006	Sistem pengelolaan persampahan skala regional	unit	46	46	46	47	2.539.100,0	224 kab/kota	Kemen PUPR
		4840.CBB.006	Sistem pengelolaan persampahan skala kota	unit	46	46	46	47	25.391.000,0	224 kab/kota	Kemen PUPR
		4840.CBB.006	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	unit	6270	6270	6270	6270	18.682.000,0	28 kab/kota	Kemen PUPR
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.RAI.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Ha	400	400	400	400	187.400,0	60 Lokasi	KKP
		4346.RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	Unit	2	2	2	2	67.365,3	Daerah	KKP
032.HB Program Pengelolaan Ruang Laut											
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.REA.003	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan (Kumulatif)	Ha	N/A	N/A	19.000.000	20.000.000	86.703,6	34 Provinsi	KKP
		2362.RAI.001	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Baru yang Ditetapkan	Ha	800	900	900	900	27.501,5	9 Provinsi	KKP
		2362.RAI.002	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional	Ha	N/A	N/A	19.000.000	20.000.000	196.833,6	46 Lokasi	KKP
		2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati	Kesepakatan	2	2	5	5	8.742,0	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2362.PEE.001	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keaneekaragaman Hayati Laut	Kerjasama	3	5	5	5	11.484,0	Pusat	KKP
		2362.REB.001	Keaneekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Jenis	10	14	18	20	22.505,7	Pusat	KKP
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas											
4641	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	km	13,09	4,53	N/A	N/A	704.336,2	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	km	26,6	26,8	N/A	N/A	846.630,5	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	km	33	N/A	N/A	N/A	246.157,8	Jawa Timur	Kemenhub
		4641.RBA.013	Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - Siantar	km	35	N/A	N/A	N/A	64.000,0	Sumatera Utara	Kemenhub
		4641.RBA.014	Peningkatan Jalur KA R42 Lintas Lahat - Lubuklinggau Segmen Bungamas - Lubuklinggau	km	44,73	N/A	N/A	N/A	246.783,8 (2021)	Sumatera Selatan	Kemenhub
		4641.RBA.015	Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak	km	34,13	N/A	N/A	N/A	160.000,0	Banten	Kemenhub
		4641.RBA.016	Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung - Banjar	km	52	N/A	N/A	N/A	25.834,4	Jawa Barat, Jawa Tengah	Kemenhub
		4641.RBA.017	Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar - Kroya	km	28,75	N/A	N/A	N/A	24.000,0	Jawa Tengah	Kemenhub
		4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	km	20,06	16,35	N/A	N/A	362.780,8	Sumatera Barat	Kemenhub
		4641.RBA.019	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	km	40,72	N/A	N/A	N/A	230.550,0	Jawa Barat	Kemenhub
		4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	km	25,5	25,5	N/A	N/A	922.504,1	Jabodetabek	Kemenhub
		4641.RBA.023	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	km	3,5	3,5	N/A	N/A	261.954,5	Jawa Tengah	Kemenhub

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4650	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	4650.RAC.001	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi DKI Jakarta	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DKI Jakarta	Kemenhub
		4650.RAC.002	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Jawa Barat	Unit	6	16	N/A	N/A	35.983,2	Jawa Barat	Kemenhub
		4650.RAC.003	Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Provinsi Banten	Unit	3	4	N/A	N/A	13.049,7	Banten	Kemenhub
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4840	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.UBA.001	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	kab/kota	509	509	234	224	735.000,0	Seluruh provinsi	Kemen PUPR
010.CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa											
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.UBA.012	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi	Provinsi	17	22	28	34	15.400,0	Pusat	Kemendagri
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2365.RBK.001	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya	Pulau	4	7	7	7	186.100,0	8 Provinsi	KKP
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.RAI.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Ha	400	400	400	400	187.400,0	60 Lokasi	KKP
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri											
6078	Pengembangan Industri Hijau	6078.AFA.001	Rancangan Standar Industri Hijau	NSPK	4	4	4	4	5.010,2	Pusat	Kemenperin
		6078.BDI.001	Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau	Industri	5	5	5	5	3.137,7	Pusat	Kemenperin
		6078.AEB.001	Forum Campaign Penerapan Standar Industri Hijau	Forum	1	1	1	1	1.045,9	Pusat	Kemenperin
		6078.AEB.002	Forum Penghargaan Industri Hijau	Forum	1	1	1	1	4.183,6	Pusat	Kemenperin
		6078.AEB.003	Forum Penguatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Forum	1	1	1	1	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.ABK.001	Kajian Pemberlakuan Wajib Standar Industri Hijau	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1.673,5	Pusat	Kemenperin

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6078.ABK.003	Kajian Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.346,9	Pusat	Kemenperin
		6078.BIC.001	Hasil Penilaian dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Lembaga	10	10	10	10	2.091,8	Pusat	Kemenperin
		6078.BKB.001	Hasil Pengendalian dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau	Produk	1	1	1	1	2.091,8	Pusat	Kemenperin
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
029.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	5443.DCE.001	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	Orang	1.530	1.530	1.530	1.530	18.360,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5443.QDB.001	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	Lembaga	365	365	365	365	14.760,0	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim											
5446	Adaptasi Perubahan Iklim	5446.BDD.001	Kampung Iklim	Kelompok Masyarakat	195	200	250	325	15.525,8	34 Provinsi	Kemen LHK
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika											
3346	Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG	3346.QDC.001	Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI)	orang	2.200	2.400	2.400	2.400	49.100,0	Wilayah sentra produksi pertanian	BMKG
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.QDC.001	Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN)	orang	3.800	4.000	4.000	4.000	29.700,0	34 provinsi	BMKG
103.FA Program Ketahanan Bencana											
3882	Penguatan Desa Tangguh Bencana	3882.UBB.001	Jumlah Penguatan Desa Tangguh Bencana	Desa	120	90	120	120	47,10	34 provinsi	BNPB
INDIKATOR TPB/SDGs: 13.a.1.(a) Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim											
029.WA Program Dukungan Manajemen											
5369	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	5369.EAB.001	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	106.300,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.1.1.(a) Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut											
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2365.RQB.001	Prasarana/Infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar	Pulau	4	5	7	7	101.150,2	19 lokasi	KKP
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.RBQ.002	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Kawasan Pesisir Pulau	2	5	5	5	20.863,3	17 Lokasi	KKP
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6033.QMA.003	Data dan Informasi Kualitas Air Laut	Layanan	34	34	34	34	32.400,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		6033.QMA.004	Data dan Informasi Sampah Laut	Layanan	23	23	44	44	25.174,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		6033.QDH.001	Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	Badan usaha	8	30	35	35	10.200,0	34 Provinsi	Kemen LHK
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.UBA.002	Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2	2	12	12	17.367,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		6034.RAG.003	Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	Unit	4	6	10	10	37.900,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2366	Perencanaan Ruang Laut	2366.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan.	Rekomendasi Kebijakan	2	5	2	-	11.085,7	10 RZ KAW, 9 tindaklanjut RZ KAW dan 3 peninjauan kembali RZ KAW	KKP
		2366.PBR.007	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut Nasional yang akan diintegrasikan ke dalam RTRWN	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	4.850,0	1 Materi Teknis dan Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Laut Nasional kedalam RTRWN	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2366.PBR.002	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan ke dalam RTR KSN	Rekomendasi Kebijakan	2	3	3	1	16.138,6	11 Materi Teknis dan 17 Integrasi dengan RTR KSN	KKP
		2366.PBR.003	Rekomendasi Kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	Rekomendasi Kebijakan	8	12	16	16	17.610,4	58 KSNT (PPKT) dan 8 Integrasi RTR KSN	KKP
		2366.QAH.001	Pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan di laut	Lokasi	5	56	14	14	23.171,3	34 Provinsi, 8 UPT dan Pusat	KKP
		2366.UBA.001	Penyelenggaraan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi	8	-	-	-	2.768,6	12 Dok RZWP3K, 28 Integrasi RZWP3K dengan RTRW dan 27 Bantek	KKP
		2366.UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	Provinsi	4	8	8	8	13.991,0	8 Dok RZWP3K, 26 Integrasi RZWP3K dengan RTRW dan 27 Bantek	KKP
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.QDB.001	Kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	34	34	34	34	20.400,0	33 Provinsi	Kemen LHK
		5404.REA.003	Rehabilitasi hutan mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap											
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2341.PBR.002	Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan	Rekomendasi Kebijakan	3	3	11	11	2.050,0	11 WPP	KKP
		2341.QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Lembaga	11	11	11	11	7.271,0	11 WPP	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman											
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2341.PBR.001	Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	6.175,0	UPT Pusat dan UPT Daerah	KKP
		2341.ABR.003	Rekomendasi alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi	Rekomendasi kebijakan	11	11	11	11	4.350,0	UPT Pusat dan UPT Daerah	KKP
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	2339.PCA.001	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	Unit	9.600	10.000	10.700	10.750	9.860,0	34 Provinsi	KKP
		2339.UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Provinsi	34	34	34	34	31.188,0	34 Provinsi	KKP
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	Unit	97	75	90	110	180.607,2	34 Provinsi	KKP
		2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	Unit	750	1.000	1.250	1.500	111.311,5	34 Provinsi	KKP
032.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2427	Riset Perikanan	2427.PBR.002	Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI)	Rekomendasi Kebijakan	11	11	11	11	94.562,6	11 WPP	KKP; mulaitahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
		2427.PBR.003	Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) di Perairan Darat	Rekomendasi Kebijakan	5	4	14	14	21.795,8	14 PUD	KKP; mulaitahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2428	Riset Kelautan	2428.PBW.002	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	Rekomendasi Kebijakan	10	12	12	13	21.439,5	34 provinsi	KKP; mulaitahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
		2428.PBW.003	Data dan/atau Informasi Pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP	Rekomendasi Kebijakan	2	2	4	4	9.198,9	11 WPP	KKP; mulai tahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
		2428.RAL.002	Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	Unit	109	-	-	-	7.580,0	BROL-Perancak	KKP
032.WA Program Dukungan Manajemen											
2329	Pengelolaan Data dan Informasi	2329.RAN.002	Sarana Data Citra Satelit Radar	Unit	-	1	1	1	16.680,09	BROL-Perancak	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut											
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.REA.003	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	Ha	12.500.000	13.800.000	19.000.000	20.000.000	93.503,6	79 Kawasan (10 KKPN, 69KKPD)	KKP
		2362.REA.001	Kawasan KonservasiPerairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Baru yang Ditetapkan	Ha	1.600.000	-	-	-	10.801,5	9 Provinsi	KKP
		2362.REA.002	Kawasan KonservasiPerairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	Ha	12.500.000	13.800.000	19.000.000	20.000.000	196.833,6	79 Kawasan (10 KKPN, 69KKPD)	KKP
		2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati	Kerjasama	2	2	5	5	10.615,7	Pusat	KKP
		2362.PEE.001	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	Kerjasama	3	3	5	5	25.357,7	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Spesies	7	14	18	20	22.505,7	Pusat	KKP
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya (8 Taman Nasional Laut/Perairan)	Rekomendasi Kebijakan	8	8	8	8	11.964,0	TN Komodo, TN Bunaken, TN Karimun Jawa, TN Kepulauan Seribu, TN Taka Bonerate, TN Teluk Cendrawasih, TN Wakatobi, TN Kep. Togean	Kemen LHK
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5423.QDD.001	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	Kelompok Masyarakat	8	8	8	8	1.724,0	TN Komodo, TN Bunaken, TN Karimun Jawa, TN Kepulauan Seribu, TN Taka Bonerate, TN Teluk Cendrawasih, TN Wakatobi, TN Kep. Togean	Kemen LHK
		5423.RAG.003	Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	Unit	4	4	4	4	4.850,0	TN Komodo, TN Bunaken, TN Karimun Jawa, TN Kepulauan Seribu, TN Taka Bonerate, TN Teluk Cendrawasih, TN Wakatobi, TN Kep. Togean	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha											
032.HB Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2352.QIC.001	Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	40	45	50	55	18.100,0	Daerah	KKP
		2352.QIC.002	Unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	Lembaga	360	410	510	585	8.091,1	34 provinsi	KKP
		2352.BIC.001	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	35	40	45	50	3.902,4	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2352.BIC.002	Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	75	75	105	115	4.349,4	Pusat	KKP
		2352.BIC.003	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	80	100	130	140	5.381,3	Pusat	KKP
		2352.BIC.004	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	Lembaga	115	130	145	155	3.535,7	Pusat dan Daerah	KKP
		2352.BIC.005	Unit Usaha pemanfaatan ruang laut yang diaudit	Lembaga	-	10	10	10	3.000,0	Pusat	KKP
		2353.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Orang	750	775	800	825	7.219,3	Pusat	KKP
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2353.QIC.001	Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	20.588	21.750	22.000	22.350	37.318,3	Pusat dan Daerah	KKP
		2353.QIC.003	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	665	700	563	613	14.026,2	Pusat dan Daerah	KKP
		2353.BIC.001	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	600	660	680	705	6.933,3	Pusat dan Daerah	KKP
		2353.BIC.002	Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Lembaga	490	490	412	437	7.977,0	Pusat dan Daerah	KKP
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	Hari Operasi	122	100	180	180	1.909.728,9	Pusat	KKP
		2350.RAL.001	Kapal Pengawas	Unit	4	2	3	3	904.414,8	Pusat	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2350.RCG.002	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	Unit	1	1	1	1	48.828,4	Pusat	KKP
		2350.RAL.002	Speedboat pengawas	Unit	2	-	10	10	77.788,6	Pusat	KKP
		2350.BAB.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Lembaga	-	5.000	5.000	5.000	8.250,0	Pusat	KKP
		2350.QDD.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Kelompok Masyarakat	1050	1100	1150	1200	25.425,8	Pusat	KKP
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang kelautan dan Perikanan	2351.BDC.001	Nelayan yang difasilitasi pemulangannya	Orang	100	50	100	100	3.517,3	Pusat dan Daerah	KKP
		2351.BDC.002	Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin	Orang	300	300	300	300	3.467,3	Pusat dan Daerah	KKP
3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	3990.PDD.003	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten	Unit	150	150	150	150	87.400,0	34 Provinsi	KKP
		3990.BIC.001	Unit kerja dan pelaku Usaha KIPM yang diperiksa tingkat kepatuhannya berdasarkan regulasi pemasukan dan pengeluaran	Unit Kerja	46	46	46	46	21.673,0	34 Provinsi	KKP
3988	Karantina Ikan	3988.QCE.001	Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan	Kasus	80	80	80	80	14.489,0	34 Provinsi	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs:											
14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil											
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan											
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi											
032.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2375.SCC.001	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	Orang	12.120	15.000	50.000	58.000	133.600,0	34 Provinsi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2375.QDD.001	Kelompok Pelaku Utama/usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Kelompok	44.827	41.000	49.000	55.000	472.506,0	34 Provinsi	KKP
032.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2426	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2426.SDC.001	Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Model	3	3	-	-	7.621,5	Pusat	KKP; mulai tahun 2022 Kegiatan terkait Riset dialihkan ke BRIN
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	2339.QKA.001	Nelayan penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang diidentifikasi	Laporan	0	120.000	120.000	120.000	7.402,5	34 Provinsi	KKP
		2339.QEA.002	Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang tersalurkan	Orang	-	120.000	120.000	120.000	86.583,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Orang	2.000	2.000	6.000	7.000	26.000,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDD.002	Kelompok Usaha Bersamayang meningkatkan kapasitas kelembagaannya	Kelompok masyarakat	2.400	2.500	2.750	3.000	6.403,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDC.001	Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan	Bidang	-	-	-	-	1.295,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDD.001	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	Orang	7.500	7.500	15.000	15.000	7.250,0	34 Provinsi	KKP
		2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Orang	-	1.500	-	-	2.915,0	34 Provinsi	KKP
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2344.BAB.001	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	Lembaga	250	500	500	500	5.800,0	34 Provinsi	KKP
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	2346.BAB.001	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	Lembaga	2.250	3.000	3.500	4.000	30.063,0	34 Provinsi	KKP
		2346.QEA.001	Bantuan premi asuransi pembudidaya ikan skala kecil yang disalurkan	Orang	5.000	7.500	9.000	10.000	25.550,0	34 Provinsi	KKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	2360.QDG.001	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	UMKM	1.620	65	1.840	1.950	30.700,0	34 Provinsi	KKP
		2360.QDG.003	UMKMMP yang difasilitasi kasus pembiayaan kredit	UMKM	2.200	-	-	-	-	-	KKP
		2360.QDG.002	Wirusaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	UMKM	200	300	200	200	11.000,0	34 Provinsi	KKP
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2363.RAI.001	Lahan garam yang difasilitasi	Ha	120	200	750	750	265.352,60	12 Provinsi	KKP
		2363.QEG.003	Sarananiagagaram rakyat yang dibangun	Unit	30	25	100	100	169.925,55	12 Provinsi	KKP
		2363.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	Rekomendasi Kebijakan	2	5	5	5	11.798,67	Daerah	KKP
		2363.QEG.004	Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun	Unit	2	2	2	2	14.320,41	10 Provinsi	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)											
032.WA Program Dukungan Manajemen											
2322	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	2322.PEC.001	Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan	1	1	2	2	39.501,0	Pusat	KKP
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5433.BAH.001	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	30	30	30	30	62.670,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.BMA.001	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Layanan	1	1	1	1	1.920,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.PCD.001	SK Penetapan Kawasan Hutan	Institusi	12	12	12	12	9.240,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.BAH.002	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Layanan	6	6	6	6	6.956,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyektif TORA dalam kawasan hutan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	169.698,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	261.403,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	5434.BMA.001	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutandan Kawasan Hutan	Layanan	12	12	12	12	11.280,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	220.000	220.000	220.000	14.653.035,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	2.500	3.000	3.000	3.000	312.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	54.900,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	33 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5397	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	5397.BAH.002	Layanan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi	Unit	1	1	1	1	3.843,0	33 Provinsi	Kemen LHK
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5398.BIC.001	Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	Lembaga	20	20	20	20	60.670,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5398.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Lembaga	20	20	20	20	65.200,0	28 Provinsi di luar pulau Jawa	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Rekomendasi Kebijakan	56	56	56	56	56.973,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5420.QMA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Layanan	74	74	74	74	226.600,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5420.QMA.003	Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Layanan	2	2	2	2	36.300,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5424	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	5424.PBJ.001	Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	6.720,0	Pusat	Kemen LHK
		5424.PBJ.002	Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	13.360,0	Pusat	Kemen LHK
		5424.PBJ.003	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Rekomendasi Kebijakan	35	35	35	35	17.247,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5424.QMA.001	Kawasan dengan Nilai Keaneekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Layanan	4.266.362	4.266.362	4.266.362	4.266.362	50.109,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5397	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	5397.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPMP Menuju Kategori Maju	Lembaga	12	12	12	12	231.172,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5405	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	5405.QDB.001	KPHL Maju	Lembaga	10	10	10	10	11.018,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Rekomendasi Kebijakan	376	376	376	376	465.295,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5444	Peningkatan Penyuluhan	5444.QDD.001	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	Orang	1.700	1.700	1.700	1.700	24.717,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5444.QDC.001	KTH Mandiri yang terbentuk	Kelompok Masyarakat	80	80	80	80	12.600,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		5444.QDD.002	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	Kelompok Masyarakat	70	70	70	70	13.800,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.BDB.001	Layanan Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Lembaga	1	1	1	1	27.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Unit	56.000	220.000	220.000	220.000	14.653.035,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Unit	2.500	3.000	3.000	3.000	312.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Unit	1.250	1.250	1.250	1.250	162.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Unit	1.500	1.500	1.500	1.500	54.900,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Unit	100	100	100	100	4.500,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Unit	42.500.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	900.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	39.000,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.002	Area terbuka (<i>Opened Area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani	Rekomendasi kebijakan	41.251	41.251	41.251	41.251	716.675,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5421.RAG.001	Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	Unit	1	1	1	1	51.600,0	Kalimantan Timur	Kemen LHK
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
6035	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	6035.RAG.004	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	Hektar	30	100	100	100	381.134,1	34 Provinsi	Kemen LHK
		6035.RAG.001	Lahan Gambut yang direstorasi pada 7 Provinsi	Hektar	300.000	300.000	300.000	300.000	1.858.700,0	7 Provinsi	Kemen LHK
		6035.RAG.005	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	Hektar	1.500	25.000	25.000	30.000	1.135.100,0	12 provinsi	Kemen LHK
		6035.UBB.001	Fasilitasi Desa mandiri peduli gambut di 7 Provinsi	Desa	75	75	75	75	120.000,0	Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	Rekomendasi Kebijakan	5	5	5	5	30.900,0	Pusat	Kemen LHK
		5420.PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Rekomendasi Kebijakan	56	56	56	56	56.973,1	34 Provinsi	Kemen LHK
		5420.QMA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Layanan	74	74	74	74	226.600,3	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	5434.BMA.001	Data dan Peta Kondisi Sumber DayaHutandanKawasanHutan	Layanan	12	12	12	12	11.280,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	Rekomendasi Kebijakan	5	5	5	5	30.900,0	Pusat	Kemen LHK
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.002	Area terbuka (<i>Opened Area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani	Rekomendasi kebijakan	41.251	41.251	41.251	41.251	716.675,4	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.5.1* Indeks Daftar Merah (<i>Red-list index</i>)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Rekomendasi Kebijakan	140	140	140	140	377.161,3	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	Pusat	Kemen LHK
		5422.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Lembaga	52	52	52	52	56.215,0	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.RAG.001	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Unit	3	3	3	3	852.884,4	Provinsi Sulawesi Tenggara, Banten, Maluku	Kemen LHK
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.RAG.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Spesies	10	14	18	20	308.000,0	Pusat	KKP
		2362.RAG.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	Spesies	7	16	18	20		Pusat	KKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.6.1* Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.AED.001	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Perjanjian	2.000	2.000	2.000	2.000	226.296,0	Pusat	Kemen LHK
		5421.BDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Lembaga	1.833	1.833	1.833	1.833	441.657,9	34 Provinsi	Kemen LHK
		5421.PBV.003	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	12.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5421.PBV.004	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	12.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5421.PBV.005	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	24.000,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	Pusat	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	5429.QCE.001	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Perkara	25	144	155	175	330.648,4	Pusat	Kemen LHK
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Perkara	170	367	403	453	583.644,8	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	5428.QHB.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	90	130	130	130	185.430,0	34 Provinsi	Kemen LHK
		5428.QHB.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	73	110	110	110	207.300,0	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.QMA.002	Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Layanan	1	1	1	1	4.560,0	Pusat	Kemen LHK
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Rekomendasi Kebijakan	140	140	140	140	377.161,3	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	34 Provinsi	Kemen LHK
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi target 2 dari Rencana Strategis											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	Rekomendasi kebijakan	5	5	5	5	30.900,0	34 Provinsi	Kemen LHK
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Rekomendasi Kebijakan	140	140	140	140	377.161,3	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	57.780,5	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Lembaga	52	52	52	52	56.215,0	34 Provinsi	Kemen LHK
6031	Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan	6031.PBV.001	Rekomendasi penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	Rekomendasi Kebijakan	5	5	5	5	98.760,0	Pusat	Kemen LHK
		6031.PBV.002	Izin perhutanan sosial yang dievaluasi	Rekomendasi Kebijakan	100	100	100	100	13.200,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6031.PCC.001	Izin akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	Kelompok Masyarakat	5	5	5	5	22.500,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
6032	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6032.QDD.001	Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	Kelompok Masyarakat	310	310	310	310	21.618,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6032.QDG.001	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	UMKM	75	75	75	75	90.000,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6032.QEH.001	Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Kelompok Masyarakat	1520	1520	1520	1520	584.229,0	33 Provinsi (Selain DKI Jakarta)	Kemen LHK
		6032.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024					
055.CK Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	6264.ABJ.501	Kebijakan Perencanaan Lingkup Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan	1	1	1	1	7.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.ABJ.508	Kebijakan Percepatan Lingkup Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan	3	1	1	1	56.500,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.AEA.503	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Lingkungan Hidup	Kegiatan	2	1	1	1	13.500,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.FAE.505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	1	1	24.500,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.RAG.001	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Unit	3	3	3	3	852.884,4	34 Provinsi	Kemen LHK
055.CK Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	6264.ABV.201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	1	1	1	1	6.700,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.ABV.208	Kebijakan Percepatan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	3	1	1	1	98.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.AEA.203	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kegiatan	2	1	1	1	5.900,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6264.FAE.205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Laporan	2	1	1	1	5.400,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.b.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan											
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	3.000,0	Pusat	Kemen LHK
		5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Lembaga	413	413	413	413	27.352,4	34 Provinsi	Kemen LHK
		5422.RAG.001	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Unit	3	3	3	3	852.884,4	34 Provinsi	Kemen LHK
055.CK Perencanaan Pembangunan Nasional											
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	6264.ABV.201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	1	1	1	1	6.700,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.ABV.208	Kebijakan Percepatan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Rekomendasi	3	1	1	1	98.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.AEA.203	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kegiatan	2	1	1	1	5.900,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
		6264.FAE.205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Laporan	2	1	1	1	5.400,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.c.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL											
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup											
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	5429.QCE.001	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Perkara	25	144	155	175	330.648,4	Pusat	Kemen LHK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Perkara	170	367	403	453	583.644,8	34 Provinsi	Kemen LHK
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	5428.QHB.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	90	130	130	130	185.430,0	34 Propinsi	Kemen LHK
		5428.QHB.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	73	110	110	110	207.300,0	34 Propinsi	Kemen LHK
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5398.QAC.001	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha	10	20	20	20	3.744,0	Pusat	KLHK
		5398.BIH.001	Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha	10	20	20	20	46.344,0	Pusat	KLHK
5435	Perencanaan Kawasan Hutan	5435.BAH.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan	100	300	300	300	4.762,0	Pusat	KLHK
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5423.QAH.001	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	Layanan	-	151	151	151	2.100,0	Pusat	KLHK
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh											
INDIKATOR TPB/SDGs:											
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir											
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	90.299	90.299	90.299	6.336.009,7	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	3130.BHB.004	Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	Operasi	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.710.266,8	Pusat dan Daerah	POLRI
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	5076.BKA.002	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Laporan	578.772	578.772	578.772	578.772	4.069.919,2	Pusat dan Daerah	POLRI
		5076.BKA.003	Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Laporan	1.557.317	1.557.317	1.557.317	1.557.317	788.404,7	Pusat dan Daerah	POLRI
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.AEF.004	Festival HAM Nasional dan Internasional	Orang	400	440	484	532	2.320,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk											
060.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana POLRI											
3084	Pengembangan Peralatan POLRI	3084.CAF.001	Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus)	Unit	53.486	53.486	53.486	53.486	610.833.351,1	Pusat dan Daerah	POLRI
		3084.CAF.003	Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN)	Unit	1	1	1	1	6.009.504,1	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
5087	Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	5087.BHB.002	Kesiapan kemampuan personel dalam penanggulangan gangguan kamdagri berintensitas tinggi	Operasi	101.744	101.744	101.744	101.744	135.215,7	Pusat dan Daerah	POLRI
		5087.BHB.003	Pengamanan gangguan kamdagri berintensitas tinggi	Operasi	1.991	1.991	1.991	1.991	327.709,4	Pusat dan Daerah	POLRI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya											
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana											
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Perkara	90.299	90.299	90.299	90.299	6.336.009,7	Pusat dan Daerah	POLRI
3143	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	3143.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Terorisme	Perkara	42	42	42	42	3.989.460,2	Pusat dan Daerah	POLRI
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	3144.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Narkoba	Perkara	20.987	20.987	20.987	20.987	3.061.169,1	Pusat dan Daerah	POLRI
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	3151.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Siber	Perkara	3.237	3.237	3.237	3.237	303.100,5	Pusat dan Daerah	POLRI
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	3130.BHB.004	Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli	Operasi	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.300.863	1.710.266,8	Pusat dan Daerah	POLRI
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	5076.BKA.002	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Laporan	578.772	578.772	578.772	578.772	4.069.919,2	Pusat dan Daerah	POLRI
		5076.BKA.003	Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Laporan	1.557.317	1.557.317	1.557.317	1.557.317	788.404,7	Pusat dan Daerah	POLRI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	2809.UBA.002	Daerah yang Difasilitasi dalam Pengasuhan Berbasis Hak Anak	Daerah	9	9	9	9	3.575,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		2809.UBA.004	Daerah yang Difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Daerah	20	20	20	20	3.700,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
		2809.UBA.005	Daerah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Daycare Ramah Anak	Daerah	10	10	10	10	2.423,1	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	6373.PBN.001	Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan KLA	Rekomendasi Kebijakan	34	34	34	34	6.600,0	Provinsi	Kemen PPPA
6374	Peningkatan Partisipasi Keluarga	6374.FBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas keluarga	Daerah	2	2	2	2	2.000,0	Provinsi	Kemen PPPA
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.DCI.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtP/Adan TPPO	Orang	40	40	40	40	17.500,0	Pusat dan provinsi	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	6377.QMA.001	Data Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)	Layanan	1	-	-	1	40.000,0	Pusat	Kemen PPPA
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan	Daerah	8	8	8	8	9.496,4	Provinsi	Kemen PPPA
		2810.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam bimbingan teknis tentang perlindungan khusus anak dari kekerasan	Daerah	8	8	8	8	9.636,2	Provinsi	Kemen PPPA
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus	2805.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Daerah	3	3	3	3	11.950,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA
		2805.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan	Daerah	8	8	9	9	800,0	Provinsi	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6378.QAA.001	AMPK yang Mendapatkan Penanganan yang Komprehensif	Orang	420	450	500	550	27.895,0	Pusat	Kemen PPPA
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1607.ABD.001	Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran hak anak	Rekomendasi Kebijakan	260	280	300	320	46.597,4	Pusat dan Daerah	Kemenkum HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	2800.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan kebijakan PHP Pekerja dan TPPO	Kegiatan	3	3	3	3	4.200,0	Pusat	Kemen PPPA
		2800.AEA.002	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PUG dan Perlindungan Perempuan Pekerja dan TPPO	Kegiatan	1	1	1	1	6.000,0	Pusat	Kemen PPPA
		2800.BDB.001	K/L yang mendapatkan advokasi dan KIE kebijakan PHP Pekerja dan TPPO	Lembaga	29	29	29	29	9.346,7	Pusat	Kemen PPPA
		2800.FAE.001	Informasi hasil pelaksanaan kebijakan PHP pekerja dan TPPO	Laporan	1	1	1	1	6.800,0	Pusat	Kemen PPPA
		2800.UBA.001	SDM Unit Layanan yang sudah mendapat Bimtek Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	Daerah	17	17	17	17	5.600,0	Provinsi	Kemen PPPA
024.DD Program Kesehatan Masyarakat											
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.DCI.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtP/Adan TPPO	Orang	40	40	40	40	17.500,0	Pusat dan provinsi	Kemenkes
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun											
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.PEA.002	Kegiatan penanganan kekerasan dan eksploitasi pada anak di daerah	Kegiatan	12	14	14	16	3.700,0	Provinsi/ Kab/Kota	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi											
060. BP Program Modernisasi Almatsum dan Sarana Prasarana POLRI											
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi POLRI	5062.RBM.005	Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Unit	3	3	3	3	45.000,0	Pusat dan Daerah	POLRI
		5062.RBM.010	Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang terintegrasi secara online	Unit	1	1	1	1	6.000,0	Pusat dan Daerah	POLRI
		5062.RBM.011	Pembangunan SPKT tingkat Polsek sesuai SPM	Unit	2	2	2	2	12.000,0	Pusat dan Daerah	POLRI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi											
013.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	4841.QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Orang	5.699	5.699	5.699	5.699	227.960,0	Daerah	Kemenkum HAM
		4841.QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Kelompok Masyarakat	758	758	758	758	40.439,5	Daerah	Kemenkum HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara											
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.QBA.001	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	Orang	2	2	2	2	11.040,0	Daerah	MA
		1049.QBA.002	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Banten	Orang	5	5	5	5	18.400,0	Daerah	MA
		1049.QBA.003	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bangka Belitung	Orang	1	1	1	1	3.680,0	Daerah	MA
		1049.QBA.004	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo	Orang	0	0	0	0	-	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	1049.QBA.005	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta	Orang	25	25	25	25	92.000,0	Daerah	MA
	1049.QBA.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Barat	Orang	8	8	8	8	26.788,0	Daerah	MA
	1049.QBA.007	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Tengah	Orang	8	8	8	8	18.400,0	Daerah	MA
	1049.QBA.008	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	Orang	3	3	3	3	11.040,0	Daerah	MA
	1049.QBA.009	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur	Orang	8	8	8	8	29.440,0	Daerah	MA
	1049.QBA.010	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banda Aceh	Orang	10	10	10	10	36.800,0	Daerah	MA
	1049.QBA.011	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	Orang	9	5	5	5	11.040,0	Daerah	MA
	1049.QBA.012	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.013	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	Orang	9	5	5	5	33.120,0	Daerah	MA
	1049.QBA.014	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024			
	1049.QBA.015	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Palembang	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.016	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.017	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.018	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.019	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan	Orang	4	4	4	4	12.160,0	Daerah	MA
	1049.QBA.020	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur	Orang	5	5	5	5	16.000,0	Daerah	MA
	1049.QBA.021	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara	Orang	2	2	2	2	6.080,0	Daerah	MA
	1049.QBA.022	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
	1049.QBA.023	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	Orang	3	3	3	3	12.600,0	Daerah	MA
	1049.QBA.024	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tenggara	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2021	2022	2023	2024				
		1049.QBA.025	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku	Orang	6	6	6	6	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.026	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Denpasar	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.027	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.028	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Timur	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.029	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Papua	Orang	0	0	0	0	0,0	Daerah	MA
		1049.QBA.030	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	Orang	7	7	7	7	14.720,0	Daerah	MA
		1049.QBA.031	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Orang	3.983	3.983	3.983	3.983	30.552,6	Daerah	MA
		1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	Orang	40.000	40.000	40.000	40.000	55.705,7	Daerah	MA
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1059.QBA.001	Pengguna Layanan yang dilayani bantuan hukum di Lingkungan Peradilan TUN	Orang	2.880	2.880	2.880	2.880	4.914,0	Daerah	MA
		1059.QBA.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Orang	66	66	66	66	205,0	Daerah	MA
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Orang	17.766	17.766	17.766	17.766	35.079,2	Daerah	MA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		1053.QBA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Orang	28.906	28.906	28.906	28.906	150.520,1	Daerah	MA
		1053.QBA.003	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Orang	177.442	177.442	177.442	177.442	80.359,3	Daerah	MA
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan											
006.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
1109	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	1109.PEF.001	Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	Orang	66	66	66	66	9.378,0	Pusat	Kejaksaan RI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.3.3.(a) Indeks Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice Index)											
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
1606	Kerja Sama HAM	1606.PBD.003	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RAN HAM	Rekomendasi Kebijakan	1.250	1.300	1.350	1.400	4.424,8	Pusat	Kemenkum HAM
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	4841.PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	Lembaga	524	524	524	524	9.999,6	Daerah	Kemenkum HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.UAB.002	Integrasi Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM	Sistem Informasi	1	-	-	-	750.000,0	Pusat	Komnas HAM
006.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	1103.QAA.004	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Orang	164.850	164.850	164.850	164.850	7.142,4	Daerah	Kejaksaan RI
077.BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi											
4246	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi	4246.QDC.003	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi	Orang	300	300	300	300	6.000,0	Pusat	MK

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)											
006.WA Program Dukungan Manajemen											
1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitas Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	1083.TAK.001	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	Laporan	33	33	33	33	9.025,0	Daerah	Kejaksaan RI
013.WA Program Dukungan Manajemen											
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	1563.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	Laporan	1	1	1	1	4.402,1	Pusat	Kemenkum HAM
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	1564.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	Laporan	1	1	1	1	6.487,2	Pusat	Kemenkum HAM
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	1565.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	Laporan	1	1	1	1	8.769,3	Pusat	Kemenkum HAM
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	1566.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	Laporan	1	1	1	1	7.533,0	Pusat	Kemenkum HAM
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	1567.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	Laporan	1	1	1	1	6.595,8	Pusat	Kemenkum HAM
1568	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	1568.TAK.001	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	Laporan	1	1	1	1	11.884,7	Pusat	Kemenkum HAM
093.BC Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi											
3848	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan KPK, serta pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah	3848.QKC.003	Pelaksanaan Survey Penelitian Integritas	Laporan	1	1	1	1	126.060,0	Pusat	KPK

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5208	Koordinasi dan Supervisi Pencegahan	5208.QDB.001	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Lembaga	35	35	35	35	64.133,4	Pusat	KPK
007.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI											
4245	Penyelenggaraan pengawasan intern	4245.EAK.002	Pembangunan zona integritas	Laporan	3	3	2	1	2.500,0	Pusat	MK
005.WA Program Dukungan Manajemen											
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	1077.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Laporan	43	43	43	43	7.282,1	Daerah	MA
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	1078.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Laporan	40	40	40	40	7.318,1	Daerah	MA
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5258.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Laporan	51	51	51	51	9.890,8	Daerah	MA
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5259.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Laporan	27	27	27	27	6.191,5	Daerah	MA
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	6191.UAI.001	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah I	Unit Kerja	350	350	350	350	4.400,0	Pusat	Kemen PAN RB
		6191.UAI.002	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah II	Unit Kerja	350	350	350	350	4.400,0	Pusat	Kemen PAN RB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6191.UAI.003	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah III	Unit Kerja	300	300	300	300	4.500,0	Pusat	Kemen PAN RB
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui											
015.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko											
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6212.BMB.003	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	Orang	87	87	87	87	10.062,0	Pusat	Kemenkeu
		6212.FAL.001	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Orang	273	273	273	273	35.553,0	Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)											
015. CD Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko											
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6212.BMB.002	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Orang	620	620	620	620	15.542,2	Pusat	Kemenkeu
		6212.FAH.003	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	Orang	138	138	138	138	12.192,3	Pusat	Kemenkeu
089.CH Program Pengawasan Pembangunan											
4207	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi dan Keuangan	4207.FAG.511	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang ekonomi dan keuangan	Laporan	15	15	15	15	1.634.350,0	Pusat	BPKP
4208	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam	4208.FAG.511	rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang pangan, pengelolaan energi dan sumber daya alam	Laporan	10	10	10	10	698.400,0	Pusat	BPKP
4209	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan	4209.FAG.511	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang infrastruktur, tata ruang dan perhubungan	Laporan	4	4	4	4	355.515,0	Pusat	BPKP
4210	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	4210.FAG.511	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang ekonomi kreatif, perdagangan dan ketenagakerjaan	Laporan	10	10	10	10	250.000,0	Pusat	BPKP

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4213	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Penegakan Hukum	4213.FAG.521	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang politik dan penegakan hukum	Laporan	2	2	2	2	54.000,0	Pusat	BPKP
4214	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	4214.FAG.521	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang sosial dan penanganan bencana	Laporan	8	8	8	8	903.625,0	Pusat	BPKP
4216	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi Birokrasi	4216.FAG.521	Rekomendasi hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan reformasi birokrasi	Laporan	2	2	2	2	80.600,0	Pusat	BPKP
4217	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	4217.FAG.131	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan	Laporan	5	5	5	5	856.220,0	Pusat	BPKP
4219	Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa	4219.FAG.232	Rekomendasi hasil pengawasan atas pengendalian intern	Laporan	3	3	3	3	383.625,0	Pusat	BPKP
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B											
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	6191.UAI.004	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	95	95	95	95	3.200,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.007	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	83	83	83	83	13.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.005	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	97	97	97	97	3.200,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6191.UAI.008	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	217	217	217	217	13.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.006	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	189	189	189	189	3.700,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.UAI.009	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Instansi	219	219	219	219	14.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B											
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	6191.FAI.001	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah I	Instansi	212	212	212	212	3.500,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.002	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah II	Instansi	143	143	143	143	4.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.003	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah III	Instansi	123	123	123	123	4.500,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.004	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah I	Instansi	212	212	212	212	3.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.FAI.005	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah II	Instansi	189	189	189	189	3.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6191.FAI.006	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah III	Instansi	182	182	182	182	4.500,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		6191.PBL.001	Jumlah rekomendasi Tim RB nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	Rekomendasi	9	9	9	9	49.000,0	Pusat	Kemen PAN RB
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik											
048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN											
4350	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	4350.PBM.001	Jumlah sektor layanan strategis yang di-review / dipetakan	Sektor Layanan	2 sektor layanan strategis	-	-	-	1.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
		4350.UAB.002	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk kedalam SIPP	Sektor Layanan	2 sektor pelayanan (dasar dan perizinan)	-	-	-	2.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
6189	Perumusan Kebijakan PANRB	6189.AAG.009	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang distandarisasi proses bisnisnya	Sektor Layanan	1 PermenPAN RB tentang Standar Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	1 sektor pelayanan	1 sektor pelayanan	-	3.000,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
6190	Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	6190.UAE.001	Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	Laporan	130.000	130.000	130.000	130.000	8.300,0	Pusat dan Daerah	Kemen PAN RB
6195	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	6195.PEC.001	Kesepakatan replikasi inovasi pelayanan publik	Kesepakatan	50	50	50	50	5.000,0	Pusat	Kemen PAN RB
110.CG Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik											
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	5618.QAA.001	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan	Orang	630	660	680	700	29.892,8	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI
		5618.QAA.002	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	Orang	5.670	5.940	6.120	6.300	60.643,7	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
5619	Pencegahan Maladministrasi	5619.QIC.001	Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat	Lembaga	39	39	39	39	19.021,7	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI
		5619.QIE.001	Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan	Pemerintah Daerah	548	548	548	548	57.064,3	Pusat dan Daerah	Ombudsman RI
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)											
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364	Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.EAE.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Unit	6.158	38.511	42.362	46.598	106.400,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Satker	0	549	549	549	21.300,0	Pusat dan Daerah	KPU
		3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Satker	0	549	549	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	KPU
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.ABN.002	Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Pengambilan Keputusan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	750,0	Pusat	Kemen PPPA
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	2790.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum	Daerah	8	7	7	7	9.240,0	Provinsi	Kemen PPPA

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)										
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak										
2790 Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	2790.QDB.001	K/L Bidang Politik dan Hukum yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	K/L	5	7	7	10	4.005,0	Pusat	Kemen PPPA
	2790.UBA.001	Daerah Mitra AsdepKGBidang Politik dan Hukum yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	Daerah	4	4	5	7	6.467,0	Provinsi	Kemen PPPA
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi										
010.CR Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum										
6145 Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	6145.QDC.002	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Orang	50	500	700	800	11.500,0	Pusat dan Daerah	Kemendagri
	6145.QEI.001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Lembaga	9	9	9	9	7.679,9	Pusat	Kemendagri
	6145.UBA.001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	34	34	34	17,5	Daerah	Kemendagri
	6145.PBC.001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Rekomendasi Kebijakan	2	2	N/A	N/A	6,0	Pusat	Kemendagri
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi										
3364 Fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.BMA.005	Publikasi Informasi	Layanan	1081	1.849	2034	2238	71.000,0	Pusat dan Daerah	KPU
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan 16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan										

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana			
		2021	2022	2023	2024						
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
3364 Fasilitas pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.EAE.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Unit	6.158	38.511	42.362	46.598	106.400,0	Pusat dan Daerah	KPU	
	3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Satker	0	549	549	549	21.300,0	Pusat dan Daerah	KPU	
	3364.xxx.xxx (TA 2022)	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Satker	0	549	549	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	KPU	
	3364.BAA.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Orang	1.158	549	549	549	85.100,0	Pusat dan Daerah	KPU	
	3364.BMA.005	Publikasi Informasi	Layanan	1.081	1.849	2.034	2.238	71.000,0	Pusat dan Daerah	KPU	
115.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi											
4358	Fasilitas Pengawasan	4358.QDC.001	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Orang	248	348	448	549	63.800,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	5245.QDC.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Orang	34	34	34	34	42.600,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu
4359	Fasilitas Penanganan Pelanggaran	4359.QAH.001	Pengawasan Netralitas ASN	Layanan	0	1	1	1	85.200,0	Pusat dan Daerah	Bawaslu
010.CR Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum											
6145	Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	6145.QDC.001	Pendidikan Politik masyarakat di Daerah	Orang	1.000	6.000	8.000	10.000	11.200,0	Pusat dan Daerah	Kemendagri
		6145.QDD.002	Kapasitas Pengurus Ormas	Kelompok Masyarakat	200	3.000	3.300	4.200	63.500,0	Pusat dan Daerah	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.8.1.(a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional										
011.AK Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri										
6021 Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral	6021.AEB.051	Partisipasi Aktif Indonesia dalam SMU PBB	Forum	12	12	12	12	7.507,9	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.053	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional	Forum	1	16	16	16	2.767,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.054	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Senjata Pemusnah Massal dan Konvensional	Forum	3	4	4	4	2.964,1	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.055	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara	Forum	7	8	8	8	2.784,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.056	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Terorisme	Forum	3	5	5	5	1.539,3	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.057	Kerjasama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM	Forum	20	21	49	49	14.048,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.058	Kerjasama Multilateral dalam Rangka Penanganan Isu Kemanusiaan	Forum	2	4	20	20	4.309,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.059	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Forum	34	22	30	30	25.089,4	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.060	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Lingkungan Hidup	Forum	6	3	10	10	3.956,6	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.061	Kerjasama Multilateral terkait isu Perdagangan	Forum	18	16	16	16	7.105,2	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.062	Kerjasama Multilateral terkait isu Komoditas	Forum	14	6	6	6	4.375,9	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.063	Kerjasama Multilateral terkait isu Kekayaan Intelektual	Forum	4	6	6	6	2.035,0	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.064	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Sosial Budaya	Forum	18	18	18	18	14.447,8	Pusat	Kemenlu
	6021.AEB.065	Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Organisasi Internasional Negara Berkembang	Forum	8	8	8	8	5.332,8	Pusat	Kemenlu

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6021.PEB.067	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB	Forum	30	30	0	0	5.300,0	Pusat	Kemenlu
6020	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN	6020.AEB.001	Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	Forum	25	20	30	20	46.621,2	Pusat	Kemenlu
011.AA Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional											
6024	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	6024.AEB.001	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Aspasaf	Forum	20	20	21	21	10.555,7	Pusat	Kemenlu
6025	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Amerika dan Eropa	6025.AEB.001	Prakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	Forum	13	12	17	19	12.436,7	Pusat	Kemenlu
074.WA Program Dukungan Manajemen											
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama	3335.EAI.003	Layanan Kerja Sama 052-Layanan Kerja Sama Internasional	Laporan	5	5	5	5	2.564,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs:											
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur											
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah											
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun											
010.CP Program Tata Kelola Kependudukan											
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	1269.QAA.001	Akta Kematian Yang Diterbitkan	Orang	110.000	110.000	110.000	110.000	PM	34 Provinsi	Kemendagri
		1269.QAA.002	Akta Perkawinan yang Diterbitkan	Orang	30.000	30.000	30.000	30.000	PM	34 Provinsi	Kemendagri
		1269.QAA.003	Akta Perceraian yang Diterbitkan	Orang	4.000	4.000	4.000	4.000	PM	34 Provinsi	Kemendagri
		1269.QAA.004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Orang	220.000	220.000	220.000	220.000	22.950,0	34 Provinsi	Kemendagri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1271.UBA.001	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	Daerah	10	10	10	10	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kemendagri
		1271.UBA.002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Daerah	5	5	5	5	PM	Provinsi/Kab/Kota	Kemendagri
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak											
2811	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	2811.AEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Kegiatan	1	1	1	1	4.600,0	Pusat	Kemen PPPA
		2811.BDB.001	K/L yang Difasilitasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Lembaga	8	8	8	8	1.550,0	Pusat	Kemen PPPA
		2811.UBA.001	Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Sipil dan Informasi Layak Anak	Daerah	17	17	17	17	8.000,0	Prov/Kab/Kota	Kemen PPPA
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4523	Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis	4523.QAH.001	Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers	Layanan	1	1	1	1	3.500,0	Pusat	Kemenkominfo
		4523.PBD.001	Survei Indeks Kemerdekaan Pers	Rekomendasi Kebijakan	34	34	34	34	28.400,0	34 provinsi	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.BCC.001	Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM	Perkara	1.993	3.360	3.600	3.600	7.871,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.BCC.003	Penanganan perkara pelanggaran HAM	Perkara	470	864	720	720	11.752,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.BCC.004	Mediasi perkara pelanggaran HAM	Perkara	61	100	150	150	11.448,0	Pusat	Komnas HAM

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5680.BCC.007	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat	Perkara	1	1	1	1	2.473,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.PBD.008	Penanganan pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Rekomendasi Kebijakan	250	750	750	750	11.233,0	Pusat	Komnas HAM
		5680.QKA.006	Pengamatan situasi atas pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dan hak sipil dan politik masyarakat Papua	Laporan	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Komnas HAM
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.AEF.003	Penyebarluasan wawasan HAM	Orang	16.390	22.924	25.216	27.738	5.122,0	Pusat	Komnas HAM
		5679.AEF.004	Festival HAM Nasional dan Internasional	Orang	400	440	484	532	2.320,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5681	Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.001	Perangkat standar pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	18.012,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.ABD.003	Rekomendasi Mekanisme Penanganan dan Pencegahan Konflik terhadap Perempuan di Aceh dan Maluku (<i>Centre of Peace</i>)	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.500,0	Daerah	Komnas Perempuan
		5681.ABD.006	Rekomendasi penguatan mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban pelanggaran HAM	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	7.800,0	Pusat	Komnas Perempuan
		5681.PBD.009	Konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM	Rekomendasi	1	1	1	1	6.900,0	Pusat	Komnas Perempuan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5681.PBD.002	Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	9.300,0	Daerah	Komnas Perempuan
013.BB Program Pembentukan Regulasi											
1601	Rancangan Peraturan perundang-undangan	1601.AAA.001	Rancangan Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	RPUU	1	1	1	1	30.000,0	Nasional	KemenkumHAM
5851	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra	5851.ABD.004	Rancangan Peraturan perundang-undangan hasil harmonisasi perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban pada tahun 2024 berdasarkan permohonan pengharmonisasian	Persentase	80	80	80	80	30.000,0	Nasional	KemenkumHAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4525	Tata Kelola Komunikasi Publik	4525.AFA.001	NSPK Pengelolaan Bidang Komunikasi Publik	NSPK	2	2	2	2	13.800,0	Pusat	Kemenkominfo
		4525.QMB.001	Diseminasi informasi di wilayah 3T melalui mitra strategis	Layanan	33.000	36.000	39.000	42.000	31.880,2	Pusat	Kemenkominfo
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	4511.PBM.001	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	27.400,0	Pusat	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualitas Informatif											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	4511.QIC.001	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	Lembaga	40	45	55	60	13.700,0	Pusat	Kemenkominfo

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi											
059.GH Program Komunikasi Publik											
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	4511.QCB.001	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Perkara	92	100	110	120	8.300,0	Pusat	Kemkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles											
074.WA Program Dukungan Manajemen											
3335	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama	3335.EAB.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	3.812,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAL.001	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	5	5	5	5	3.985,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAK.001	Audit Internal	Laporan	19	22	23	24	3.200,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAI.001	Layanan Informasi Publik	Layanan	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAI.002	Layanan Keprotokoleran	Layanan	1	1	1	1	2.682,0	Pusat	Komnas HAM
		3335.EAI.003	Layanan Kerja Sama	Layanan	1	1	1	1	4.095,0	Pusat	Komnas HAM
3336	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	3336.EAH.001	Layanan Manajemen Organisasi	Indeks	BB	A	A	A	4.250,0	Pusat	Komnas HAM
		3336.EAN.001	Dokumen Keuangan Unit Eselon I	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	4.250,0	Pusat	Komnas HAM
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional											
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM											
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.PFA.001	Standar Norma dan Pengaturan HAM	NSPK	4	4	4	4	36.170,0	Pusat	Komnas HAM
		5679.ABD.002	Hasil Kajian/Penelitian HAM	Rekomendasi dan Kebijakan	2	7	9	11	19.354,0	Pusat	Komnas HAM
5681	Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.PBD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	10	10	10	10	24.277,0	Pusat	Komnas Perempuan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		5681.PBD.005	Kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja	Rekomendasi Kebijakan	6	8	10	15	19.500,0	Pusat	Komnas Perempuan
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN											
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya											
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4771	Kegiatan Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4771.AAC.001	Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan PPSP	Rancangan Peraturan	1	1	1	1	15.770,36	Kantor Pusat	Kemenkeu
015.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara											
6208	Perumusan Kebijakan Administratif	6208.AAG.001	Peraturan Menteri Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Peraturan Menteri	2	2	2	2	343,6	Kantor Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.1.1.(a) Rasio Pajak terhadap PDB											
010.CM Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa											
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	3991.UAE.001	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	Laporan	23	23	23	23	16.500,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1237.UBA.002	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Daerah	48	48	48	48	10.457,0	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/ Pengurus Kelembagaan Desa	1248.UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	Orang	2.312	2.430	2.520	2.250	8.774,2	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat	Persen	100	-	-	-	21.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	Persen	75	100	-	-	-	Daerah	Kemen PPN/ Bappenas
		6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah	Persen	50	75	100	-	-	Pusat dan Daerah	Kemen PPN/ Bappenas
		6269.FAB.500	Jumlah fitur yang diperbaiki, disempurnakan, atau ditambahkan	Jumlah	3	3	3	3	12.000,0	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.2.1.(a) Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB											
(Kode Program) Program xxx											
(Kode Kegiatan)	Kegiatan xxx	(Kode RO)	RO xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa											
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4773	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	4773.PAC.937	Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah	Laporan Kajian	1	-	-	-	686,5	Pusat	Kemenkeu
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara berkembang termasuk negara-negara kurang berkembang											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6262	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	6262.ABB.408	Jumlah Kebijakan Percepatan Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	Rekomendasi	3	3	3	3	-	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4501	Pengembangan jaringan <i>fixed broadband</i> dan <i>mobile broadband</i>	4501.QDC.001	Akses Internet tetap Pitalebar	Titik/Lokasi	688	1.000	1.050	1.100	100.700,0	Pusat	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.001	Palapa Ring	Kabupaten/ Kota	57	57	57	57	9.615.700,0	Tersebar	Kemenkominfo
4501	Pengembangan jaringan <i>fixed broadband</i> dan <i>mobile broadband</i>	4501.UBA.001	Penerapan Saluran Telekomunikasi (<i>Ducting</i>) Bersama	Kabupaten/ Kota	2	4	6	8	25.500,0	Tersebar	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.8.1* Persentase pengguna internet											
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.002	BTS/ <i>Last Mile</i>	Lokasi (kumulatif)	2.417	3.704	9.510	9.510	23.557.000,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	Gbps	31	37	37	37	11.715.244,0	Tersebar	Kemenkominfo
		4961.RAI.004	Akses Internet	Lokasi (kumulatif)	15.532	37.532	77.532	117.532	8.968.840,0	Tersebar	Kemenkominfo
INDIKATOR TPB/SDGs :											
17.9.1.(a) Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST											
17.9.1.(b) Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6268	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	6268.PEC.400	Jumlah <i>Knowledge Sharing</i> Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Kegiatan	1	1	1	1	13.500,00	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
015.CE Program Kebijakan Fiskal											
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	4762.ABA.003	Rekomendasi kebijakan dan strategi diplomasi terkait ekonomi pembangunan internasional	Rekomendasi	6	6	6	6	14.136,0	Pusat	Kemenkeu

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4764.ABA.006	Pelaksanaan Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral	Rekomendasi	6	6	6	6	9.542,7	Pusat	Kemenkeu
015.WA Program Dukungan Manajemen											
6389	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	6389.FAM.002	Perjanjian Penyaluran Hibah	Perjanjian	6	-	-	-	180,1	Pusat	Kemenkeu
011.AA Program Diplomas dan Kerja sama Internasional											
6026	Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	6026.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Bantuan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia	Rekomendasi Kebijakan	8	8	9	9	9.197,2	Pusat	Kemenlu
		6026.AEH.002	Promosi Aset Seni dan Budaya	Promosi	3	3	3	3	26.959,6	Pusat	Kemenlu
		6026.AEH.003	Promosi Aset Diplomas	Promosi	53	59	63	66	26.031,7	Pusat	Kemenlu
063.WA Program Dukungan Manajemen											
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	Kesepakatan	2	2	2	2	5.000,0	Pusat	Badan POM
032.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP											
2322	Legislasi, Litigasi dan Kerja sama	2322.PEC.001	Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	Kesepakatan	1	1	1	1	27.000,0	Pusat	KKP
018.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian											
1747	Fasilitasi Bantuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Pertanian	1747.AEC.102	Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian	Kesepakatan	1	1	1	1	523,0	Pusat	Kementan
090.EF Program Perdagangan Dalam Negeri											
3726	Peningkatan Tertib Ukur	3726.AEF.063	SDM yang mengikuti <i>technical assistance</i> program KSST bidang <i>metrology legal</i>	Orang	40	40	40	40	1.673,5	Kota Bandung	Kemendag
023.DK Program Pendidikan Tinggi											
4259	Pengembangan Kelembagaan	4259.QEJ.001	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Orang	528	396	396	396	178.626,6	Pusat	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2021	2022	2023	2024					
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran										
6395 Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	6395.AEE.001	Kemitraan Bidang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	32	34	36	38	3.198,4	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.002	Kemitraan Bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	10	9	9	8	829,6	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.005	Kemitraan Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang IPA di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	3	3	3	3	777,8	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.006	Kemitraan Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	3	4	4	4	391,7	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.AEE.007	Kemitraan Bidang PAUD dan Parenting	Kesepakatan	12	12	12	12	2.635,0	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.001	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang PTJJ di Kawasan Asia Tenggara	Orang	5.000	11.000	7.000	8.000	16.117,7	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.002	Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model Bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara	Orang	2.000	2.000	2.000	2.000	5.368,0	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.004	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Matematika di Kawasan Asia Tenggara	Orang	690	545	570	720	4.343,3	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.005	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang IPA di Kawasan Asia Tenggara	Orang	1.250	2.230	1.500	1.500	12.417,2	Pusat	Kemendikbud Ristek
	6395.DCI.006	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa di Kawasan Asia Tenggara	Orang	420	1.850	570	620	5.954,2	Pusat	Kemendikbud Ristek

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		6395.DCI.007	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	5.388,5	Pusat	Kemendikbud Ristek
		6395.PEE.001	Kemitraan Bidang Gizi dan Pangan di Kawasan Asia Tenggara	Kesepakatan	5	16	7	7	988,1	Pusat	Kemendikbud Ristek
		6395.SCI.001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka pengembangan dan implementasi model pangan dan gizi	Orang	2.000	0	5.000	5.000	7.027,9	Pusat	Kemendikbud Ristek
		6395.SDC.001	Jumlah model yang dikembangkan dan diimplementasikan di kawasan Asia Tenggara	model	2	0	3	3	5.985,9	Pusat	Kemendikbud Ristek
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.10.1.(a) Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati											
090.EE Program Perdagangan Luar Negeri											
3714	Penyelenggaraan Atase Perdagangan	3714.ABB.101	Laporan Informasi Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	11.513,1	Pusat	Kemendag
		3714.ABB.102	Laporan Analisis Intelijen Bisnis	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	10.175,5	Pusat	Kemendag
		3714.ABB.103	Laporan Data Statistik Perdagangan	Rekomendasi Kebijakan	25	25	25	25	8.104,5	Pusat	Kemendag
3731	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	3731.PEB.001	Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	Forum	3	3	3	3	2.922,5	Pusat	Kemendag
3740	Perundingan Perdagangan Jasa	3740.PBB.002	Roadmap Jasa Research dan Development	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
		3740.PBB.003	Analisis Daya Saing Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Komunikasi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	20.000,0	Pusat	Kemendag
3741	Perundingan Perdagangan Multilateral	3741.PEC.001	Partisipasi Aktif pada Mini Ministerial Meeting WTO, KTM WTO dan Sidang Reguler WTO	Kesepakatan	3	3	3	3	10.373,8	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	3742.PEA.001	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN	Kegiatan	8	8	8	8	19.100,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEA.002	Koordinasi Penanganan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	Kegiatan	1	1	1	1	1.300,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEA.003	Koordinasi Pemenuhan AEC Blueprint 2025	Kegiatan	2	2	2	2	1.012,2	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.001	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	Kesepakatan	1	1	1	1	2.368,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.002	ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	Kesepakatan	1	1	1	1	300,4	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.006	Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Kesepakatan	1	1	1	1	5.715,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.007	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-China FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	2.030,7	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.008	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Korea FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.147,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.009	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Japan CEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.360,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.011	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.841,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.012	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Hongkong FTA	Kesepakatan	1	1	1	1	1.083,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.013	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Canada	Kesepakatan	1	1	1	1	633,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.014	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EU	Kesepakatan	1	1	1	1	1.109,6	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.015	Kerja Sama Perdagangan ASEAN USTR	Kesepakatan	1	1	1	1	400,0	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.016	Kerja Sama Perdagangan ASEAN EAEU	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.017	Kerja Sama Perdagangan ASEAN Russia	Kesepakatan	1	1	1	1	309,9	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.018	Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP	Kesepakatan	1	1	1	1	1.142,2	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.019	Kerja Sama Perdagangan dalam East Asian Summit (EAS)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3742.PEC.020	Kerja Sama Perdagangan dalam ASEAN Plus Three (APT)	Kesepakatan	1	1	1	1	219,5	Pusat	Kemendag
		3742.PEC.021	Kerja Sama Perdagangan dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Kesepakatan	1	1	1	1	792,7	Pusat	Kemendag
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral	3743.PEA.001	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Bilateral	Kegiatan	3	3	3	3	5.681,3	Pusat	Kemendag
		3743.PED.001	Indonesia-EU CEPA	Perjanjian	1	1	1	1	3.009,0	Pusat	Kemendag
		3743.PED.009	Indonesia-Malaysia BTA	Perjanjian	1	1	1	1	2.109,7	Pusat	Kemendag
3744	Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	3744.PEC.001	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	7.093,8	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.002	Kerja Sama Fasilitas Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Kesepakatan	1	1	1	1	6.893,9	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.003	Kerja Sama Antar Fora APEC	Kesepakatan	2	2	2	2	1.446,6	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.005	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	Kesepakatan	3	3	3	3	2.394,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.008	Kerja Sama Perdagangan Negara G20	Kesepakatan	3	3	3	3	2.418,0	Pusat	Kemendag
		3744.PEC.009	Kerja Sama Perdagangan Negara OKI	Kesepakatan	2	2	2	2	2.765,6	Pusat	Kemendag
		3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	3738.PBB.001	Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	Rekomendasi Kebijakan	70	92	94	88	218.500,0
3738.PEF.001	Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional			Orang	600	1.000	1.000	1.000	7.099,8	Pusat	Kemendag
3738.PBB.003	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional			Rekomendasi Kebijakan	7	7	7	7	40.800,0	Pusat	Kemendag
3738.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perundingan			Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	4.658,6	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3738.UAC.001	Peningkatan Kapasitas Negosiasi Perundingan Perdagangan Internasional	Orang	100	170	170	170	4.225,7	Pusat	Kemendag
3745	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3745.QCB.001	Penanganan Kasus <i>Trade Remedy</i> dan Hambatan Teknis Perdagangan	Perkara	30	30	30	30	22.807,1	Pusat	Kemendag
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas											
090.EE Program Perdagangan Luar Negeri											
3751	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	3751.PEH.002	Display Produk Ekspor di Luar Negeri	Promosi	3	4	5	6	3.454,8	Pusat	Kemendag
		3751.QAC.001	InaExport Daerah (Surabaya)	Badan usaha	1	2	3	4	3.000,0	Pusat	Kemendag
3753	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	3753.PBB.001	Analisa dan informasi pasar ekspor di negara tujuan ekspor utama/potensial	Rekomendasi Kebijakan	6	7	8	9	3.200,0	Pusat	Kemendag
		3753.PBB.002	Analisa dan informasi pasar ekspor di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Rekomendasi Kebijakan	4	5	6	7	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3753.QAC.001	Layanan <i>Inquiry</i> dan Temu Bisnis	Badan usaha	50	50	50	50	671,7	Pusat	Kemendag
		3753.QMA.003	Pengembangan <i>Market Place</i> Berorientasi Ekspor	Layanan	1	1	1	1	2.800,0	Pusat	Kemendag
3754	Pengembangan Promosi dan Citra	3754.PEH.001	Pameran ke Negara Mitra Dagang Mitra Utama	Promosi	5	5	7	8	3.844,3	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.002	Pameran Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Promosi	5	6	7	8	8.249,2	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.003	Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	Promosi	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.004	Partisipasi China International Import Expo-Shanghai	Promosi	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.005	Partisipasi Pameran Hannover Messe	Promosi	1	1	1	1	2.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.006	Partisipasi Pameran Terintegrasi Lainnya	Promosi	4	5	6	7	2.700,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.007	Pameran Trade Expo Indonesia	Promosi	1	1	1	1	5.252,9	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		3754.PEH.008	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	Promosi	5	5	6	7	7.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.PEH.009	Partisipasi Expo 2020 Dubai	Promosi	1	1	0	0	235.000,0	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.001	Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Badan usaha	60	65	70	75	6.302,3	Pusat	Kemendag
		3754.QDH.002	Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Badan usaha	35	40	45	50	6.751,3	Pusat	Kemendag
3755	Kerja Sama Pengembangan Ekspor	3755.PEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Kesepakatan	5	6	7	8	2.300,0	Pusat	Kemendag
		3755.QDH.001	Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Badan usaha	100	110	120	130	3.000,0	Pusat	Kemendag
3756	Pengembangan SDM Bidang Ekspor	3756.SCF.001	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Orang	3.577	3.677	3.777	3.877	30.989,7	Pusat	Kemendag
3777	Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	3777.AEH.001	Promosi ITPC	Promosi	57	57	57	57	66.004,4	Pusat	Kemendag
		3777.PBB.004	Market Intelligence	Rekomendasi Kebijakan	22	23	24	25	6.260,2	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.002	Buyer Inquiry	Badan usaha	144	240	240	336	10.000,0	Pusat	Kemendag
		3777.QAC.003	Co Working Space di Pasar Potensial	Badan usaha	6	7	8	9	1.200,0	Pusat	Kemendag
3975	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	3975.UBA.001	Optimalisasi Ekspor Daerah	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14	14	14	14	5.651,6	Pusat (Dekonsentrasi)	Kemendag
		3975.UBA.002	Fasilitas Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34	34	34	34	41.732,1	Pusat (Dekonsentrasi)	Kemendag
		3975.UBA.003	Fasilitas Pengembangan Promosi di Kawasan Perbatasan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	4	4	4	3.541,0	Pusat (Dekonsentrasi)	Kemendag
3730	Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	3730.QDG.001	Fasilitas Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan	UMKM	60	60	60	60	8.000,0	Pusat	Kemendag

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6262	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	6262.FAE.105	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi RKP Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Dokumen	1	1	1	1	-	Pusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun											
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional											
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	6269.ABL.508	Kebijakan Percepatan Lingkup Pengembangan Pendanaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	10.670,0	Terpusat	Kemen PPN/ Bappenas
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)											
033.WA Dukungan Manajemen											
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4197.ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	8.446,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	4	94.253,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	4.357,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	6.010,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	11.757,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	3	3	3	124.230,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	17.136,0	Terpusat	Kemen PUPR

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
		4197.ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	5.762,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	61.108,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	5.920,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	26.838,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	10.150,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	107.250,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	10.250,0	Terpusat	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi											
033.WA Dukungan Manajemen											
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4197.AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2	2	2	21.859,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	13	10	12	12	34.600,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	4	4	4	3	25.881,0	Terpusat	Kemen PUPR
		4197.AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	1	2	2	2	80.403,0	Terpusat	Kemen PUPR
INDIKATOR TPB/SDGs:											
17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional											
17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional											
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik											
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	2896.BMA.004	Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	Layanan/ Publikasi/ Laporan	38	38	38	38	27.183,2	Pusat, Provinsi	BPS

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024			
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	2906.BMA.003	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan rakyat	Layanan/ Publikasi/ Laporan	5	5	5	5	6.136,2	Pusat	BPS
		2906.BMA.006	Publikasi/Laporan Susenas	Layanan/ Publikasi/ Laporan	525	525	525	525	1.272.467,2	Pusat, Provinsi/ Kab/Kota	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi											
054.WA Program Dukungan Manajemen											
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	2882.EAG.001	Layanan Penyusunan Produk Hukum	Layanan	1	1	1	1	11.809,8	Pusat	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan											
054.WA Program Dukungan Manajemen											
2881	Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	2881.EAB.002	Dokumen Renja-KL	Layanan	1	1	1	1	1.454,7	Pusat	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs:											
17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik											
17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar											
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik											
2896	Pengembangan Analisis Statistik	2896.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektoral	Lembaga	1	1	1	1	209,4	Pusat	BPS
INDIKATOR TPB/SDGs: 17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020											
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik											
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Keteagakerjaan	2905.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	Layanan/ Publikasi/ Laporan	515	35	0	0	2.193.671,1	Pusat, 514 Provinsi/ Kab/Kota	BPS

INDIKATOR TPB/SDGs: 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)											
010.CP Program Tata Kelola Kependudukan											
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1271.UBA.002	Fasilitasi pembentukan data kelahiran dan kematian yang terintegrasi antar lembaga	Daerah	5	5	5	5	23.900,0	34 provinsi	Kemendagri
024.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi											
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	2072.SDC.001	Model Penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian	Model	5	5	3	3	100.626,5	17 Provinsi dan 17 kabupaten /kota	Kemenkes

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN I

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 136/M.PPN/HK/12/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)
TAHUN 2021 - 2024**